



**PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJ)
TAHUN 2023**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j)**

**UNIT KERJA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Jalan. A. Syairani Pelaihari Telp. (0512) 21274

RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia- Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan sebuah laporan yang memuat penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategik (Renstra).

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaihari, 30 Januari 2024

Kepala BPKAD
Kabupaten Tanah Laut,



Muhammad Darmin, S.IP, M.Si
NIP. 196612271987031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	3
C. Isu Strategis.....	9
D. Produk dan Layanan	11
E. Sistematika Penyajian.....	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	20
A. Visi RPJMD.....	20
B. Misi RPJMD.....	21
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	21
D. Indikator Kinerja Utama	46
E. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023.....	47
F. Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	56
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	57
1. Sasaran RPJMD.....	59
2. Analisa Capaian Sasaran Strategis SKPD.....	61
3. Eselon II (Kepala Badan).....	61
2.1.1. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 1	63
2.1.2. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 2.....	71
4. Eselon III.B (Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan)	74
2.1.3. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 3.....	74
4.1). Eselon IV.A (Kasubbid Anggaran).....	77

4.2). Eselon IV.A (Kasubbid Perbendaharaan & Verifikasi).....	89
5. Eselon III.B (Kepala Bidang Akuntansi).....	97
2.1.5. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 3.....	97
5.2). Eselon IV.A (Kasubbid Akuntansi Pendapatan & Pengelolaan Kas).....	98
5.3). Eselon IV.A (Kasubbid Akuntansi Belanja & Beban).....	119
6. Eselon III.B (Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset).....	142
2.1.6. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 4.....	142
6.1). Eselon IV.A (Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan)..	145
6.3). Eselon IV.A (Kasubbid Pemanfaatan dan Pemindahtanganan).....	161
7. Eselon III.B (Kepala Bidang Penatausahaan Aset)	183
2.1.9. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 4.....	183
7.1). Eselon IV.A (Kasubbid Perencanaan Kebutuhan).....	184
7.2). Eselon IV.A (Kasubbid Inventarisasi).....	192
8. Eselon III.A (Sekretaris).....	207
2.1.11. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 5.....	207
8.1). Eselon IV.A (Kasubbag Umum dan Kepegawaian).....	209
8.3). Eselon IV.A (Kasubbag Keuangan).....	219
8.2). Eselon IV.A (Kasubbag Perencanaan).....	224
B. Akuntabilitas Keuangan.....	230
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023.....	230
2. Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD BPKAD tahun 2023 Berdasarkan Sasaran, Program dan Sub Kegiatan.....	235
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023.....	261

BAB IV PENUTUP.....	298
A. Kesimpulan.....	298
B. Strategi Peningkatan Kinerja	310

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Hasil Reviu	
Lampiran 2 Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 bertanda tangan	
Lampiran 3 Cascading (Pohon Kinerja)	
Lampiran 4 Matrik Keselarasan Tahun 2023	
Lampiran 5 Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2023	
Lampiran 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023	
Lampiran 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018-2023	
Lampiran 8 IKU 2023	
Lampiran 9 SOP LAKIP	
Lampiran 10 SK Tim Penyusun LAKIP SKPD Tahun 2023	
Lampiran 11 Monev Renstra	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut salah satu perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, BPKAD Kabupaten Tanah Laut berwenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) kepada Bupati atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang dialokasikan dan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pelaksanaannya juga telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP

dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2023, disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 serta dalam mencapai misi tujuan organisasi. Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 antara lain didasarkan atas :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 55 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) hal-hal yang dimuat tentunya meliputi Penilaian kinerja yang menyangkut baik segi-segi kuantitas dan kualitas dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, motivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian budget, mendorong SKPD agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menuntun perbaikan dalam memberikan pelayanan publik. Dari pemahaman seperti itu dapat dirinci dalam butir-butir penting untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah antara lain yaitu :

- Seberapa jauh efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Seberapa jauh kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain apakah terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Seberapa banyak (kuantitas) dan bagaimana mutu (kualitas) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.
- Bagaimana dengan ketepatan lokasi serta waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan.

B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Dasar hukum pembentukan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 5 ayat (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya pada ayat (3) kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.
2. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Atas dasar ketentuan itu, maka BPKAD selain menjalankan tugas-tugas dan fungsinya selaku SKPD, juga melaksanakan tugas dan fungsi selaku SKPKD

(Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun tugas Kepala SKPKD selaku PPKD sesuai Pasal 7 Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan fungsi BUD.
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Menetapkan SPD.
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
9. Menyajikan informasi keuangan daerah.
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 8 Permendagri no. 13 Tahun 2006, Kuasa BUD mempunyai tugas :

1. Menyiapkan anggaran kas.
2. Menyiapkan SPD.
3. Menerbitkan SP2D.
4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
5. Memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
7. Menyimpan uang daerah.
8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah.
9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
12. Melakukan penagihan piutang daerah.

Selanjutnya sesuai Pasal 9 Permendagri No.13 Tahun 2006, PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas :

1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
3. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah.
4. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

5. Menyajikan informasi keuangan daerah.
6. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan.
- d. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban.
- e. Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Inventarisasi;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan.
- f. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut terdapat tingkat eselonering sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Eselon II B
- b. Sekretaris Eselon III A

- c. Kepala Bidang (ada 4 Bidang) Eselon III B
- d. Para Kepala Sub Bagian (di bawah Sekretaris ada 3) Eselon IVA
- e. Para Kepala Sub Bidang(di bawah Kepala Bidang ada 8) Eselon IVA.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, BPKAD Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2023 memiliki PNS berjumlah 42 orang yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan struktural dan staf yang terdiri dari:

a) Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :

- S-2 : 1 orang
- S-1 : 22 orang
- D-III : 15 orang
- SLTA : 4 orang
- SLTP : 0 orang
- SD : 0 orang

b) Berdasarkan Golongan, terdiri dari :

- IV/c : 1 orang
- IV/b : 1 orang
- IV/a : 4 orang
- III/d : 6 orang
- III/c : 8 orang
- III/b : 5 orang
- III/a : 11 orang
- II/d : 6 orang
- II/c : 0 orang
- II/b : 0 orang
- II/a : 0 orang

- I/d : 0 orang
- c) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf, terdiri dari :
- Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 5 orang
 - Eselon IV : 11 orang
 - Jabatan Fungsional: 1 orang
 - Staf : 22 orang
 - Staf Fungsional : 2 orang

C. ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal (SWOT) dapat ditetapkan dan dirumuskan yang menjadi isu-isu strategis pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2018-2023 adalah sebagai berikut :

a). Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin, karena apabila salah pada tahap penganggaran, sudah tentu akan semakin bertambah salah pada waktu pelaksanaan belanja, sehingga akan menyulitkan pada waktu penatausahaan dan akan diragukan akuntabilitasnya saat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan

belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

b). Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan isu-isu yang tidak bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan sangat menentukan, tidak saja bagi kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib rakyat Tanah Laut. Proses penganggaran yang baik, kesesuaian pelaksanaan belanja, penatausahaan keuangan yang tertib, dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, karena apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak kekurangannya, maka penilaian atau opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI menjadi kurang/minus pula. Dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disampaikan setiap tahun mengharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal ini sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

c). Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset daerah. Disadari bahwa untuk pengelolaan aset daerah dahulu-dahulunya terpinggirkan, namun sekarang ini menjadi hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disusun dan disajikan dengan benar dan dapat diyakini kewajarannya kalau

pengelolaan aset daerah yang disajikan tidak tertib dan meragukan. Oleh karena itu penataan aset daerah menjadi salah satu prioritas untuk segera dituntaskan dan terus dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

D. PRODUK DAN LAYANAN

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun terakhir cukup berhasil, tetapi bukan berarti sempurna, tentunya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi, sehubungan dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut selain tugas dan fungsi selaku SKPD juga sebagai SKPKD (PPKD) dan BUD. Tidak mudah memang untuk mencapai apa-apa yang telah ditetapkan, karena dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renja SKPD yang juga adalah merupakan implementasi dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD. maka BPKAD Kabupaten Tanah Laut diharapkan mewujudkan Tujuan dan Sasaran SKPD yang telah ditetapkan tersebut seperti yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

Sedangkan kondisi sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung produk dan pelayanan pada BPKAD untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah SDM aparatur dengan sarana dan prasarana lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.

Produk dan layanan yang ada pada BPKAD Kab. Tanah Laut adalah berdasarkan dengan tugas pokok fungsi yang dimiliki dan digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut sebagai berikut di bawah ini :

- A. Produk dan Layanan pada Bidang Belanja dan Pembiayaan meliputi:
- 1) Penyusunan Penganggaran Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Lainnya;
 - 2) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
 - 3) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
 - 4) Penerbitan SKPP PNS Pensiun, Meninggal Dunia (Janda/Dudanya) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut)
 - 5) Mutasi Gaji antar SKPD (Dalam Pemerintah Kabupaten Tanah laut)
 - 6) Penggunaan BTT untuk Mendanai Keadaan Darurat
 - 7) Penggunaan BTT untuk Mendanai Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- B. Produk dan Layanan pada Bidang Akuntansi meliputi;
- 1) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 - 2) Laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Kabupaten Tanah Laut.
 - 3) Pelaksanaan Rekonsiliasi Keuangan Triwulan SKPD dan SKPKD BPKAD Kab. Tanah Laut.
 - 4) Pelaporan DAK Fisik Kab. Tanah Laut.
 - 5) Pelaporan DAK Non Fisik Kab. Tanah Laut.
 - 6) Pelaksanaan Koreksi dan Pengembalian Belanja Kab. Tanah laut.
 - 7) Pelaksanaan Rekonsiliasi Belanja Modal (Aset) Bidang Akuntansi dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kab. Tanah laut.
 - 8) Laporan Bulanan Bendahara Penerimaan Kab. Tanah Laut
 - 9) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kab. Tanah Laut Sub Bid Belanja dan Beban

- 10) Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Pusat antara Kab. Tanah laut dengan KPPN dan KPP PRATAMA Banjar Baru.
 - 11) Penyusunan Perda Perbub Pemerintah Daerah Kab. Tanah laut.
 - 12) Pelaksanaan pengajuan User Simcloud BPKAD Kab. Tanah laut.
 - 13) Pelaksanaan Rekonsiliasi Pendapatan dan Piutang Kabupaten Tanah Laut.
 - 14) Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tanah Laut
 - 15) Pelaksanaan Koreksi Pendapatan Kabupaten Tanah Laut
 - 16) Penyusunan LKPD Kabupaten Tanah Laut.Sub Bid Pendapatan dan Pengelolaan Kas
 - 17) Pelaksanaan Rekonsiliasi Kas Daerah Kab. Tanah Laut.
 - 18) Pelaksanaan Penyusunan Laporan Bulanan SIKD BPKAD Kab. Tanah Laut.
- C. Produk dan Layanan pada Bidang Penatausahaan Aset
- 1) Pembukuan Barang Milik Daerah
 - 2) Pelaporan Barang Milik Daerah
 - 3) Proses Inventarisasi (sensus) Barang Milik Daerah
 - 4) Penatausahaan Barang Persediaan.
 - 5) Pelaporan Barang Pakai habis.
 - 6) Penyusunan Stándar Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Berdasarkan Usulan SKPD
 - 7) Penyusunan Stándar Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
 - 8) Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Stándar Belanja (ASB) Bersifat Pekerjaan fisik.

- 9) Penyampaian Usulan Stándar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Stándar Belanja (ASB) Bersifat Pekerjaan fisik. Berdasarkan Perubahan Usulan maupun Usulan Baru dari SKPD
- 10) Perubahan RKBMD

D. Produk dan Layanan pada Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset

- 1) Proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Hibah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 2) Proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Penjualan.
- 3) Proses Penilaian Dalam Rangka Penyusunan Neraca Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 4) Proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Penyertaan Modal
- 5) Proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Tukar Menukar.
- 6) Proses Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 7) Proses Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- 8) Proses Penggunaan Barang Milik Daerah Penetapan Status Barang Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut
- 9) Proses Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah
- 10) Penggunaan Barang Milik Daerah Pengalihan Status Barang Milik Daerah
- 11) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah
- 12) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Kerjasama pemanfaatan Infrastruktur (KPSI)

- 13) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Sewa
- 14) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Pinjam Pakai
- 15) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
- 16) Penggunaan Barang Milik Daerah Penetapan Status Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain
- 17) Pengamanan Administrasi Tanah Barang Milik Daerah
- 18) Pengamanan Hukum Tanah Barang Milik Daerah
- 19) Pengamanan Fisik Tanah Barang Milik Daerah
- 20) Pengamanan Fisik Gedung dan/atau Bangunan Barang Milik Daerah
- 21) Pengamanan Administrasi dan Hukum Gedung dan/atau Bangunan Barang Milik Daerah
- 22) Pengamanan Hukum Kendaraan Barang Milik Daerah
- 23) Pengamanan Fisik dan Administrasi Kendaraan Barang Milik Daerah
- 24) Pengamanan Rumah Tangga Barang Milik Daerah
- 25) Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- 26) Pembuatan Permohonan Surat Pengantar Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Tanah laut Melalui Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor (SIM PKB).

Adapun sumber daya yang ada pada BPKAD Kab. Tanah Laut adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

**Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

No	Jenis Barang	Jumlah Barang		No	Jenis Barang	Jumlah Barang	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	buah	46	Mesin Jilid	2	buah
2	A.C. Split	32	buah	47	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	buah
3	Alat Dapur lainnya	2	buah	48	Mesin Pemotong Rumput	2	buah
4	Alat Kantor Lainnya	1	buah	49	Mesin Pengereng Tangan	2	buah
5	Alat Pembersih lainnya	2	buah	50	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	buah
6	Alat Pendingin lainnya	3	buah	51	Microphone/Wireless MIC	2	buah
7	Alat Penghancur Kertas	1	buah	52	Monitor	1	buah
8	Alat Studio Pemetaan lainnya	2	buah	53	Note Book	1	buah
9	Bangku Tunggu	7	buah	54	P.C Unit	68	buah
10	Brandkas	4	buah	55	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	buah
11	Camera Electronic	1	buah	56	peralatan ukur, gip dan feeting lainnya (dst)	1	buah
12	CCTV - Camera Control Television System	18	buah	57	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	buah
13	Digital Multi Tester	1	buah	58	Pompa Air	1	buah
14	External CD/ DVD Drive (ROM)	2	buah	59	Portable Compressor	1	buah
15	External/ Portable Hardisk	12	buah	60	Printer (Peralatan Personal Komputer)	96	buah
16	Filing Cabinet Besi	28	buah	61	Rak Besi	85	buah
17	Genset	2	buah	62	Router	4	buah
18	Gordyin/Kray	6	buah	63	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	15	buah
19	Handy Cam	2	buah	64	Scooter	7	buah
20	Hard Disk	2	buah	65	Sepeda Motor	13	buah
21	Hub	2	buah	66	Server	1	buah
22	Karpet	8	buah	67	Sofa	3	buah
23	Kipas Angin	5	buah	68	Sound System	2	buah
24	Kursi Besi/Metal	41	buah	69	Stabilisator	2	buah
25	Kursi Biasa	1	buah	70	Tangga	1	buah
26	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	15	buah	71	Televisi	2	buah
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	buah	72	Termometer Standar	1	buah

LKj BPKAD TAHUN 2023

28	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	buah	73	Tool Kit Set	1	buah
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	buah	74	Uninterrupted Power Supply (UPS)	50	buah
30	Kursi Putar	59	buah	75	White Board	3	buah
31	Kursi Rapat	113	buah	76	Wireless Access Point	2	buah
32	Kursi Rapat Pejabat lainnya	3	buah	77	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2	buah
33	Kursi Tamu	2	buah	78	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3	buah
34	Lap Top	23	buah	79	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	buah
35	Layar Film/Projector	3	buah	80	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	buah
36	Lemari Besi/Metal	20	buah	81	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	buah
37	Lemari Kaca	1	buah	82	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2	buah
38	Lemari Kayu	11	buah	83	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2	buah
39	Loudspeaker	1	buah	84	Pagar Permanen	1	buah
40	Meja Kerja Besi/Metal	1	buah	85	Selasar	1	buah
41	Meja Kerja Kayu	86	buah	86	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1	buah
42	Meja Komputer	2	buah	87	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1	buah
43	Meja Rapat	58	buah	88	Jaringan listrik lainnya	3	buah
44	Mesin Bor Tangan	1	buah	89	Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian	1	buah
45	Mesin Gerinda	1	buah	90	Hukum	1	buah

Terdapat keterkaitan antara jumlah SDM aparatur dengan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga dapat menunjang dan mendukung dalam rangka pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut khususnya dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang

sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD
2. Eselon II (Kepala Dinas/Badan)
3. Eselon III (Kepala Bidang) B
 - 1). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.1
 - 2). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) B.2
5. Eselon III.A (Sekretaris/Kepala Bagian) A
 - 1). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) A.1
 - 2). Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/Kasi) A.2

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023
2. Ringkasan Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran, Program
3. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja 2023
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan
6. Monev Renstra
7. Matriks Keselarasan
8. Rencana Aksi

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI RPJMD

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018–2023 dengan memperhitungkan potensi (kekuatan), peluang dan kelemahan serta ancaman (kendala) yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Tanah Laut 2018-2023 yaitu : **Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI”** dimana dari visi itu diartikan sebagai berikut :

- a. **Berkarya**; Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. **Inovatif**; Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- c. **Tertata**; Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- d. **Religius**; Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- e. **Aktual**;
- f. **Sinergis**; Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. MISI RPJMD

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam **5 Misi** sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan mendukung Misi ke- 2 dan Misi ke- 3 Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi BPKAD Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini, kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 yaitu bertepatan dengan tahun ke empat tahun Renstra akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 pada pembahasan selanjutnya.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dan melihat latar belakang serta

mencermati fenomena – fenomena yang berkembang, maka Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib,
3. Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien.

Pernyataan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Hal ini dapat dipahami mengingat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan BPKAD Kabupaten Tanah Laut handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui tujuan tersebut diharapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa Pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Kepala Badan beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut ke dalam sasaran. Oleh karena itu sasaran haruslah terinci dan dapat diukur. Uraian dari tujuan dan sasaran jangka panjang yang akan di capai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang ditetapkan. Konsep dasar strategi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan, jadi merupakan cara atau langkah mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan progam/kegiatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan periode 2018-2023.

Adapun sasaran startegi yang telah ditetapkan dan yang akan dicapai BPKAD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan
5. Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan

Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan adalah disusunnya program dan kegiatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi. Program dan kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan.

Renstra yang disusun oleh SKPD tentulah harus bersinergi dengan RPJMD nya, karena hal ini terkait dengan pencapaian visi, misi yang ada dalam RPJMD. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja oleh SKPD dalam Renstra untuk lima tahun ke depan harus mendukung bagi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Visi Kepala Daerah sebagaimana tersebut diatas agar bisa diwujudkan harus dituangkan dan dirinci ke dalam misi Kepala Daerah yang ditetapkan untuk BPKAD Kabupaten Tanah Laut harus menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai gambaran aktivitas yang akan dilaksanakan. Untuk menggambarkan Visi, Misi, Kepala Daerah dan Tujuan, Sasaran Strategi dan indikator-indikator beserta target-targetnya pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2023																	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT																	
NO	VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN/NIKU	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Ket
					2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	Persentase ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Kepala Badan
										2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	BAIK(82)	BAIK(83)	BAIK(84)	BAIK(85)	BAIK(86)	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan
										3. Meningkatkan kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan
											Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Akuntansi
											Persentase kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Pemkab dan Pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Akuntansi
2	-	-	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.	Persentase peningkatan kualitas tertib penatausahaan dan pengelolaan aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	4. Meningkatkan kualitas pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	87%	89%	90%	92%	95%	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset
											Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki EPKB sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
											Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
											Persentase BMD yang dimantapkan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Penatausahaan Aset
											Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
											Persentase RGBMD SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Penatausahaan Aset
											Persentase Inventarisasi BMD yang akurat sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Penatausahaan Aset
3	Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan	Persentase kinerja layanan yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretaris
											Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%	
											Nilai Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	-	-	60	65	70	
											Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
											Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	
											Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	66	67	68	69	70	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Visi, Misi Kepala Daerah , tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya telah sesuai dengan dokumen Renstra SKPD yang telah ditetapkan, yang menjadi acuan pedoman yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama 5 (lima) tahun atau masa Renstra 2018-2023.

Untuk menggambarkan bahwa penyelarapan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja

SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel matrik keselarasan berikut ini :

**MATRIK KESELARASAN RENSTRA SKPD TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI”

Misi 2 : Menciptakan Inovasi disegala sendi kehidupan Masyarakat dan pengembangan Industri Kreatif

Misi 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja Pengelolaan keuangan secara tertib, akuntabel & transparan

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan

Tujuan 2 : Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penatausahaan aset daerah secara tertib

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan

Tujuan 3 : Terwujudnya tata kelola administrasi yg tertib, efektif dan efesien

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN BERORIENTASI	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/BUKAN IKU	NO	PROGRAM	PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	ANGGARAN (RP.)
----	-------------------	----------------------	-----------	-----------------------------	---------------	----	---------	------------------------------------	----	-----------------------	-------------------------------------	----------------

		NT ASI HA SIL (Y/ T)					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ya	1.Opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah	Ya	IKU												
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Ya	2.Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Ya	IKU												
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	Ya	3.Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU	1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					

	an															
											Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	Ya	59.643.027	Terkait
											Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Ya	48.646.200	Terkait
											Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	Ya	14.844.613	Terkait
											Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	Ya	14.844.699	Terkait
											Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	Ya	3.800.610	Terkait

												Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD	Ya	3.871.950	Terkait
												Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perda APBD dan Perkada APBD	Ya	207.129.980	Terkait
												Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perda Perubahan APBD dan Perkada Perubahan APBD	Ya	154.312.113	Terkait
												Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Ya	28.341.775	Terkait

											Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Pemerintah Kabupaten Tanah	jumlah dokumen	Ya	14.456.000	Terkait
											Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemerintah Kabupaten Tanah	jumlah kali	Ya	1.620.000	Terkait
											Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pemerintah Kabupaten Tanah	jumlah dokumen	Ya	13.326.000	Terkait
											Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	jumlah dokumen	Ya	193.495.282	Terkait

			5.Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU						3	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
												Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Desa yang tersalurkan Bantuan Keuangan	Ya	246.343.464.346	Terkait
												Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Ya	22.172.915.145	Terkait
			6.Persentase kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Pemkab dan Pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU						4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					

											Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Ya	74.812.998	Terkait
											Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Ya	218.337.456	Terkait

												Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Ya	34.192.365	Terkait
												Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Ya	-	Terkait
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan		7.Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU							Pengelolaan Barang Milik Daerah					Terkait

		Ya	8.Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU	2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	5	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah buku rekonsiliasi pengamanan dan pemeliharaan BMD Jumlah Pembuatan Papan Nama Kepemilikan TMD , Jumlah Pembuatan Patok Tanda Batas TMD, Jumlah Penyelesaian Penyertifikatan, Jumlah Permohonan BPKB Duplikat , Jumlah Permohonan Penyertifikatan	Ya	396.675.125	
			9.Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU							Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Buku Hasil Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan alat angkutan Darat Bermotor Jumlah Pemeliharaan Rumah Negara	Ya	12.407.911.235	Terkait

LKj BPKAD TAHUN 2023

												Jumlah Rehab Rumah Negara				
			10.Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Ya	115.288.960	Terkait
		Ya	11.Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	Ya	BUKAN IKU						Penilaian Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Obyek BMD yang dinilai untuk dicatat, dimanfaatkan dan dipindahtangkan	Ya	177.064.980	Terkait

			12.Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan									Penyusunan Standar Harga	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Ya	69.282.234	Terkait
												Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Ya	4.874.185.254	Terkait
												Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ya	49.896.438	Terkait
												Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah	Ya	281.168.559	Terkait
												Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah	Ya	86.237.535	Terkait
												Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD	Ya	46.703.960	Terkait

												Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD peserta Pembinaan Pengelolaan BMD	Ya	96.289.245	Terkait
5	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	Ya	14.Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	Ya	BUKAN IKU	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	Baik	Ya	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
												Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Ya	6.569.361	Terkait
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Ya	1.120.200.835	Terkait
												Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Barang Cetak	Ya	72.822.362	Terkait

											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ya	1.616.000.000	Terkait
											Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Terkait
											Pengadaan Mebel	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah jenis pengadaan mebel	Ya	-	Terkait
									7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ya	312.000.000	Terkait

												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ya	468.768.000	Terkait
										8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	Ya	16.250.000	Terkait
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	Ya	68.750.000	Terkait

LKj BPKAD TAHUN 2023

												Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	Ya	19.800.000	Terkait
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	Ya	20.113.200	Terkait
			15.Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik							9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
												Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	-	Ya	69.930.000	Terkait
			16.Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terkait

											Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Ya	8.113.769.343	Terkait
											Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	Ya	13.162.576	Terkait
											<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					Terkait
			17.Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan							10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Ya	8.549.972	

			18.Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	Ya	9.478.191	Terkait
Jumlah total Anggaran																300.537.244.894,00	

Tabel matrik keselarasan dibuat untuk memudahkan bagi BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam menetapkan kinerja serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, sehingga terdapat keselarasan antara Renstra SKPD dengan Rencana Kerja Tahunan SKPD atau Perjanjian Kinerja SKPD, sehingga perencanaan dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaras dan berkesinambungan.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

No.	Kinerja Utama/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Bagian Sekretariat BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut seperti tersaji pada tabel diatas merupakan dasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyajikan laporan kinerja pada SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya.

Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategi BPKAD Nomor 1 yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah adalah meliputi pengukuran peningkatan kinerja keuangan dan asset daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut yaitu Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Auditor kegiatannya berupa Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dengan penanggungjawab Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategi BPKAD Nomor 2 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah adalah meliputi pengukuran Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah oleh masyarakat kegiatannya berupa Hasil Survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan penanggungjawab Bagian Sekretariat.

E. PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023

Perjanjian kinerja SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 didasarkan atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dimana berdasarkan Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2023 telah tergambar tolak ukur dan target kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran.

Kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran 2023 yang telah tergambar dalam DPA-SKPD BPKAD Tahun Anggaran 2023 itulah ditetapkan

LKj BPKAD TAHUN 2023

menjadi Perjanjian Kinerja SKPD BPKAD Tahun 2023. Untuk menggambarkan Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan beserta target-targetnya serta keselarasan dengan Renstra SKPD dan juga sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat disajikan sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Jabatan	Sasaran Strategi	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Kepala Badan	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah		Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	BAIK
2	Sekretaris		Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%
				Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	100%
				Nilai Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	70
				Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%

LKj BPKAD TAHUN 2023

				Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%
				Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	70 (B)
3	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	100%
				Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	100%
4	Kepala Bidang Akuntansi		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	Persentase kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Pemkab dan Pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%
5	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset		Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	95%
				Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100%
				Persentase BMD	100%

LKj BPKAD TAHUN 2023

				yang telah dipelihara sesuai ketentuan	
				Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	100%
				Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%
6	Kepala Bidang Penatausahaan Aset		Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan	Persentase inventarisasi BMD yang akurat sesuai ketentuan	100%
				Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	100%

Tabel perjanjian kinerja tahun 2023 seperti tergambar diatas telah sesuai dan telah tersaji pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Pejabat Struktural dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada awal tahun sebelum pelaksanaan DPA dan setelah PERDA APBD Tahun 2023 ditetapkan. Sehingga terdapat kesesuaian antara tabel perjanjian kinerja secara keseluruhan dengan dokumen perjanjian kinerja seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dengan disesuaikan dengan target sasaran strategis yang telah disajikan pada dokumen Renstra SKPD.

F. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian/Penetapan kinerja

Tahun 2023, melaksanakan 3 Program, 11 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
A	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		
1		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 2). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3). Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 4). Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 5). Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 6). Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 7). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 8). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 9). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 10). Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

2		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1). Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 2). Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah 3). Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 4). Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 5). Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 6). Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 7). Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1). Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2). Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 3). Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan

			<p>Semesteran</p> <p>4). Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>5). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</p> <p>6). Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</p>
4		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>1). Sub Kegiatan Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan</p> <p>2). Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</p>
B	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		
1		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<p>1). Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga</p> <p>2). Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</p> <p>3). Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>4). Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah</p> <p>5). Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah</p>

			6). Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah 7). Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah 8). Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 9). Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 10). Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 11). Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
C	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1). Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2). Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1). Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2). Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD
3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	1). Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2). Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3). Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4). Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2023 BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja tahun ke lima Renstra 2018-2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

LKj BPKAD TAHUN 2023

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa Pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara akuntabel, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

Untuk menggambarkan kinerja sasaran strategis target dan realisasinya di lingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dari Eselon II sampai dengan Eselon IV selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 DAN 2023																										
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT																										
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN %	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN %	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN %	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN %	KEY			
1	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara lebih akurat, tepat, akurat, dan transparan.	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%	Kepala BPKAD																		
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai	82	87	106,10%	82	90	109,76%	83	93	112,05%	84	94,16	112,10%	85	95,32	112,14%	86	97,02	112,81%			
			3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	3. Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan anggaran sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100%	Kabid Belanja & Pembiayaan
			4. Persentase satekholder yang dilayani pencairan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
			5. Persentase kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Pemkab dan Pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	Kabid Akuntansi
2	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah	4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan	6. Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	%	100	100	100%	87	100	114,96%	89	30	33,70%	90	140	155,55%	92	109	118,48%	95	60	63,16%				
			7. Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	0	0%	100	0	100%	0	0	0%	0	0	0%				
			8. Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	150	150%	100	120	120%	100	133,30	133,30%	100	500	500%				
			9. Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	107	107%	Kabid PPA
			10. Persentase Pemeliharaan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	108,80	108,80%	100	2700	2700%	100	850	850%	100	1170	1170%	100	245	245%				
			11. Persentase RKMMD SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	Kabid PA
3	Tertutupnya tata kelola Administrasi yang lebih efektif dan efisien	5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan	13. Persentase kinerja sapras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100%		
			14. Nilai Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	65,41	109,02%	65	77,80	119,69%	70	79,39	113,41%		
			15. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	Sekretaris
			16. Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
			17. Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
			18. Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Nilai	64,15	64,74	100,92%	66	74,98	113,61%	67	88,43	131,99%	68	88,91	130,75%	69	80,5	116,67%	70	81,5	116,43%				

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 5 Sasaran Strategis dan 18 indikator sasaran yang telah ditargetkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, rata-rata telah tercapai seluruhnya 100% dan terdapat 5 indikator sasaran yang realisasinya melebihi target, namun pada tahun 2023 terdapat 1 indikator yang tidak ada realisasinya dan terdapat 1 indikator yang realisasinya tidak tercapai atau ada penurunan dari tahun sebelumnya.

Selain itu juga disajikan rincian 5 sasaran strategis dan 18 Indikator sasaran sesuai target dan realisasi pencapaian per sasaran strategis serta perbandingan tersebut dapat dilihat baik peningkatan maupun penurunan dalam realisasi pencapaian per sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Untuk menggambarkan analisa pencapaian per sasaran strategis pada tabel yang disajikan diatas dapat diuraikan pada sub bab berikutnya, agar dapat memberikan informasi pencapaian selama 1 (satu) tahun dan bagaimana trend yang terjadi pada setiap tahun selama Tahun Renstra 2018-2023.

1. SASARAN RPJMD

Mencermati Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut, jika dihubungkan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan yaitu : 1). Misi yang ke 2 (dua) yaitu Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif , misi ke 2 ini pada BPKAD dimaksudkan dalam rangka mendukung kegiatan Pameran Pembangunan yang dilaksanakan setiap memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut. Namun Misi ke 2 ini tidak menjadi indikator sasaran pada RPJMD hanya dicantumkan pada Pohon Kinerja BPKAD dan yang melaksanakannya adalah Bagian Sekretariat. 2). Misi ke 3 (tiga) yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dan uraian tentang Visi Tertata : Pelaksanaan pemerintahan yang bisa

dipertanggungjawabkan kepada pemegang mandat tertinggi yaitu masyarakat. Termasuk didalamnya adalah penilaian terhadap tata kelola keuangan yang harus tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Misi ke 3 Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yang harus dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Untuk menggambarkan keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra SKPD selama kurun waktu 5 (lima) Tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Sasaran RPJMD Misi 3 Kabupaten Tanah Laut yang menjadi tanggungjawab Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut

No	SASARAN RPJMD (IKU BUPATI)	INDIKATOR SASARAN	Satuan	RPJMD					RENCANA STRATEGIS											KETERANGAN (CATATAN)
				TARGET					TARGET					REALISASI						
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	33	
MISI 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)																				
Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi																				
I		Indeks Reformasi Birokrasi		6,0	6,1	6,2	6,3	6,4		6,1										
1.	Sasaran 1.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (Kategori)		B (68,00)	BB (71)	BB (74)	BB (77)	A (81)		BB (71)										
		Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran RPJMD sesuai target yang telah ditentukan selama kurun waktu 5 (lima tahun) yaitu Misi Ke 3 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi dengan Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator sasaran

RPJMD yaitu Opini Pengawasan Eksternal (BPK) terhadap kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan hasil sebagai berikut untuk tahun ke 1 yaitu tahun 2019 telah tercapai 100%, pada tahun ke 2 yaitu tahun 2020 juga telah tercapai 100%, pada tahun ke 3 yaitu tahun 2021 juga telah tercapai 100%, kemudian pada tahun ke 4 yaitu tahun 2022 juga telah tercapai 100% dan pada tahun ke 5 yaitu tahun 2023 juga telah tercapai 100% sehingga selama kurun waktu RPJMD tahun ke 1, tahun ke 2, tahun ke 3, tahun ke 4 dan tahun ke 5 RPJMD telah mencapai targetnya yaitu mempertahankan Opini WTP. Sedangkan Misi yang ke 2 yaitu Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif, pada BPKAD dimaksudkan dalam rangka mendukung kegiatan Pameran Pembangunan yang dilaksanakan setiap memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

2. ANALISA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS SKPD

Untuk menggambarkan tabel realisasi capaian sasaran strategis beserta analisa capaiannya yaitu berjumlah 5 Sasaran Strategis dengan 18 indikator sasaran dapat dijelaskan per indikator sasaran strategis dengan target dan realisasinya serta dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam pembahasan ini akan dibandingkan selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018,2019,2020,2021,2022 dan 2023 sehingga tergambar capaian kinerja per sasaran serta penanggungjawabnya secara terinci dengan penjelasan berikut ini.

3. ESELON II (KEPALA BADAN)

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023 yang telah ditetapkan adalah juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPKAD 2023

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		PENJELASAN RUMUS	PENANGGUNGJAWAB / SUMBER DATA
			SATUAN	TARGET		
1	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Indeks	Baik (86)	Hasil survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Bagian Sekretariat BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Target indikator IKU pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut disajikan disesuaikan dengan target indikator yang telah disajikan pada dokumen Renstra SKPD, dan pada Pohon Kinerja dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dan target ini telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan dilaksanakan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai Pimpinan SKPD. Sebagaimana telah disajikan pada tabel sebelumnya bahwa IKU SKPD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sasaran Strategis SKPD dan Kepala Badan mengemban Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2 SKPD yaitu merupakan target perjanjian kinerja Kepala Badan, maka selanjutnya dapat dilihat realisasi yang telah dicapai dari tahun 2018 sampai dengan pada tahun 2023 dengan penjelasan yang lebih rinci pada pembahasan selanjutnya. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan tugas dan fungsinya

didukung dengan SDM yang cukup berkualitas di bidangnya masing-masing walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari seluruh aparatur di lingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yaitu sebanyak 42 PNS yang terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 5 (lima) orang Pejabat Eselon III, 11 (sebelas) orang Pejabat Eselon IV, dan 25 (dua puluh lima) orang staf serta dibantu staf PTT sebanyak 19 (Sembilan belas) orang yang siap membantu dan melayani tugas dan fungsi yang dibutuhkan Organisasi. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah tercapai kinerjanya 100% dengan didukung SDM yang berkualitas tersebut walaupun dengan segala keterbatasan jumlah yang tersedia namun tetap dapat melaksanakan target target kinerja dengan realisasi capaian kinerja 100%.

2.1.1. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 1

Sasaran Strategis nomor 1 adalah menjadi tanggungjawab Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon II sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis nomor 1 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian tergambar pada tabel sebagai berikut:

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 (Kepala BPKAD)																						
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																						
No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
					Target	Realisasi																
1	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
			Rata-rata capaian kinerja				100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator sasaran Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah capaian kinerjanya mencapai target yang telah

ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 juga mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Sehingga realisasi tersebut sudah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu Opini WTP.

Dalam rangka untuk mendukung indikator sasaran nomor 1 sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang juga merupakan IKU BPKAD nomor 1 ini dilaksanakan seluruh Kepala Bidang (Kepala Bidang Belanja & Pembiayaan, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset dan Kepala Bidang Penatausahaan Aset) beserta seluruh Kasubbid dibawahnya dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

Untuk menggambarkan bahwa penyelarasan berkaitan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, baik target IKU SKPD dan target IKU Kabupaten serta capaian IKU SKPD maupun IKU Kabupaten dapat dijelaskan dibawah ini.

Bahwa Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan target WTP dan telah terealisasi dengan capaian WTP dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP oleh BPK RI atas LKPD tahun 2013 untuk yang pertama kali dengan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) mengungkapkan sebanyak 14 temuan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 7 temuan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 Laporan Keuangan SKPD Akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual), sehingga masih berbasis Cash menuju akrual yang belum sepenuhnya berbasis AkruaI.

- Kemudian pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2014 untuk yang kedua kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan mengungkapkan sebanyak 4 temuan dengan bukti surat Nomor 8B/LHP/XIX.BJM/05/2015 tanggal 25 Mei 2015.
- Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD tahun 2015 untuk yang ketiga kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 9 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 3 temuan, dengan bukti surat Nomor 07.A/LHP/XIX.BJM/05/2016 dan Nomor 07.B/LHP/XIX.BJM/05/2016 serta Nomor 07.C/LHP/XIX.BJM/05/2016 tanggal 27 Mei 2016
- Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini dari BPK RI atas LKPD tahun 2016 untuk yang keempat kalinya dengan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 7 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 temuan, dengan bukti surat Nomor 12.A/LHP/XIX.BJM/05/2017 dan Nomor 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017.
- Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 untuk yang kelima kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 3 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 11.B/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei 2018. sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
- Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 untuk yang keenam kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

sebanyak 8 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2018 dan Nomor : 12.C/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

- Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 untuk yang ketujuh kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 10 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 6 temuan, bukti surat Nomor : 7.B/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan bukti surat Nomor : 7.C/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

- Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 untuk yang kedelapan kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 26 temuan, bukti surat Nomor : 12.A/LHP/IX.BJM/05/2021 tanggal 27 Mei 2021, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

- Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk yang kesembilan kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 19 temuan dengan bukti surat Nomor : 5.B/LHP/XIX.BJM/05/2022 tanggal 13 Mei 2022, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

- Sedangkan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 untuk yang kesepuluh kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian

Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 19 temuan dengan bukti surat Nomor : 9.B/LHP/XIX.BJM/05/2023 tanggal 4 Mei 2023, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel pada tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan 100%.

Untuk mencapai target tersebut dikarenakan adanya :

1. Komitmen Aparatur dan Pemangku Kepentingan
 - a. Penguatan Komitmen Bebas Temuan dan Rekomendasi Pemeriksa pada Tahun 2015 dengan penandatanganan pakta integritas
 - b. Peningkatan Intensitas Koordinasi Internal dan Eksternal
2. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
 - a. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur Pemda
 - b. Sistem Reward and Punishment
 - c. Penataan Organisasi dan Kelembagaan
3. Sistem Informasi Keuangan Daerah
 - a. SIMDA-Kepulauan dan Pendapatan (Simdang F-MIS) dan Aplikasi SIPD
 - b. SIMDA-BMD
4. Kelengkapan Regulasi Daerah
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Melalui upaya-upaya tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut optimis bisa mempertahankan Opini WTP selama semua dilakukan secara konsisten dan

berkelanjutan. Untuk kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut akan menuangkan action plan mempertahankan Opini WTP dalam sebuah Peraturan Bupati Tanah Laut.

Progres Action Plan/rencana aksi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- 1.Pimpinan Daerah telah mensosialisasikan tentang adanya regulasi terbaru berkaitan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada setiap pelaksanaan coffee morning untuk seluruh pimpinan SKPD.
- 2.Melakukan rapat koordinasi/penyamaan persepsi dengan Kasubbag Keuangan,Kasubbag Umum, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengurus barang untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
- 3.Dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan aset, Pemerintah Daerah (BPKAD) telah mengadakan pembinaan terhadap entitas akuntansi, sosialisasi regulasi, melaksanakan rekonsiliasi dan monitoring, melaksanakan FGD untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada Pemerintah Daerah.
- 4.Dalam menyamakan persepsi tentang pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi serta BPK dan BPKP.
5. Bupati Tanah Laut telah menetapkan revisi Kebijakan Akuntansi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 125 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
6. Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset sudah membuat jaringan online berbasis website dengan menggunakan SIMDA-Kuangan dan Pendapatan (Simdang F-MIS) dan Aplikasi SIPD.

7. Pemerintah Daerah akan melakukan penyesuaian kode rekening secara bertahap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah
8. Pemerintah Daerah akan memberikan penghargaan setiap tahunnya bagi SPKD terbaik, Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Para Pimpinan SKPD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
2. Kurangnya koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
3. Kurangnya tenaga Akuntansi pada setiap SKPD terutama di SKPKD.
4. Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.
5. Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset belum sepenuhnya memahami tentang Akuntansi Berbasis Akrual dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
6. Sering terjadi mutasi tenaga teknis pengelola keuangan dan aset, sehingga harus ada pembenahan ulang bagi SKPD terkait.
7. Belum terintegrasi antara Aplikasi SIPD dengan Simda Keuangan FMIS dengan SIMDA BMD.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan setiap adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada pelaksanaan coffe morning.
2. Melakukan rapat-rapat koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
3. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dalam rangka mendukung penyusunan LKPD untuk penyediaan Data Dana BOS, Dana BOP dan Data DAK Fisik dan DAK Non Fisik secara tepat waktu dan dengan pihak BKD dalam hal pemerataan tenaga IT.
4. Melakukan Pembinaan entitas akuntansi,melaksanakan rekonsiliasi,monitoring, sosialisasi regulasi, FGD tentang pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
5. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap tenaga ahli/tenaga teknis pengelola keuangan dan Aset dalam hal mutasi unit kerja.
6. Memberikan penghargaan bagi Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.

Dalam rangka untuk mendukung indikator sasaran nomor 1 ini yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab 4 (empat) Kepala Bidang dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yaitu Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan,

Kepala Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Kepala Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut dan dapat dijelaskan melalui Sasaran Strategis masing-masing jabatan struktural Eselon III dan IV pada pembahasan selanjutnya.

Sedangkan untuk membandingkan capaian WTP di Kabupaten Tanah Laut dengan capaian WTP di Provinsi Kalimantan Selatan serta capaian WTP secara Nasional di Kemendagri dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu bahwa capaian WTP secara Nasional di Kementerian Dalam Negeri telah mendapatkan Opini WTP 9 kali berturut turut sampai dengan tahun 2022, sedangkan capaian WTP di Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendapatkan Opini WTP 8 kali berturut turut sampai dengan tahun 2020 sama dengan Kabupaten Tanah Laut yang telah mendapatkan Opini WTP 10 kali berturut turut sampai dengan tahun 2022, sehingga dengan demikian capaian kinerja telah tercapai 100% dan sampai dengan akhir tahun Renstra 2023 ditargetkan akan tercapai 100% atau akan mempertahankan Opini WTP sampai akhir tahun Renstra pada tahun 2023.

2.1.2. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 2

Sasaran Strategis nomor 2 adalah menjadi tanggungjawab Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon II sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis nomor 2 ini adalah merupakan Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian tergambar pada tabel yang selanjutnya dapat dilihat realisasi yang telah dicapai dari tahun 2018 sampai dengan pada tahun 2023 sebagai berikut :

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 (Kepala BPKAD)																						
Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah																						
No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
					Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai	82	87	106,1	82	90	109,76	83	93	112,05%	84	94,16	112,10%	85	95,32	112,14%	86	97,02	112,81%
			Rata-rata capaian kinerja				106,10			109,76			112,05%			112,10%			112,14%			112,81%

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama BPKAD nomor 2 ini maka sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 selama 10 (sepuluh) tahun dilaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKPD khususnya terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah terhadap 4 bidang pelayanan yaitu pelayanan satu pintu di Sekretariat, pelayanan bantuan keuangan lainnya, pelayanan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pada bidang Akuntansi. Jumlah responden sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dari Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survei kepada masyarakat yang menjadi konsumen dari 4 bidang pelayanan tersebut, dengan jumlah responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam periode 1 tahun 2023 per Triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2023. Dari hasil survey tersebut didapat nilai indeks dengan hasil 87 dari target 82 pada tahun 2018 atau capaian 106,10%, kemudian pada tahun 2019 didapat nilai indeks dengan hasil 90 dari target 82 atau capaian sebesar 109,76%, pada tahun 2020 didapat nilai indeks dengan hasil 93 dari target 83 atau capaian sebesar 112,05%, pada tahun 2021 didapat nilai indeks dengan hasil 94,16 dari target 84 atau capaian sebesar 112,10%, pada tahun 2022 didapat nilai indeks dengan hasil 95,32 dari target 85 atau capaian sebesar 112,14%, sedangkan pada tahun 2023 didapat nilai indeks dengan hasil 97,02 dari target 86 atau capaian sebesar 112,81% sehingga dengan demikian terdapat peningkatan trend kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pencapaian nilai hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD

Kabupaten Tanah Laut berada dalam mutu pelayanan SANGAT BAIK, sehingga dengan demikian realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. atau terdapat peningkatan sebesar 0,67% dari tahun 2022, sehingga telah tercapai target akhir Tahun RPJMD (2023) sesuai yang diharapkan. Dengan demikian bahwa dengan adanya hasil survey kepuasan masyarakat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut berada dalam mutu pelayanan Sangat Baik.

Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1). Kurangnya pengetahuan responden dalam mengisi kuisisioner
- 2). Keterbatasan SDM yang khusus untuk mendistribusikan dan mengumpulkan kuisisioner

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi sebagai berikut :

- 1).Melakukan pendampingan kepada responden
- 2).Menunjuk SDM khusus yang mendistribusikan dan mengumpulkan kuisisioner

Dalam rangka untuk mendukung indikator sasaran nomor 2 ini dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Berikut ini tabel yang menggambarkan efesiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja tahun 2023 yang menjadi tanggung jawab Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut :

TABEL EFESIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023											
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT											
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN % 2023	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi	Penanggungjawab
1.	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%	91,43%	100%	8,57%	Kepala Badan
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2 Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai	86	97,02	112,81%				

Penjelasan tabel diatas adalah sebagai berikut bahwa capaian kinerja pada sasaran ke 1 dan sasaran ke 2 adalah sebesar 100% dan 112,81%, sedangkan realisasi anggaran untuk itu sebesar 91,43% dari anggaran sebesar Rp 300.537.244.894,- terealisasi sebesar Rp 274.778.042.543,- sehingga terdapat efesiensi penggunaan anggaran sebesar 8,57%. Dengan demikian dari kedua sasaran yang menjadi tanggungjawab Kepala Badan atau IKU Kepala Badan tahun 2023 dengan capaian kinerja yang rata-rata tercapai diatas 100% dengan rata-rata realisasi anggaran diatas 80% maka terdapat efesiensi penggunaan anggaran rata-rata sebesar 20%.

Untuk menggambarkan masing-masing tanggungjawab dari pengemban sasaran 1 dan pengemban sasaran 2 Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

3. ESELON III.B (Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan)

3.1. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 3

Sasaran Strategis nomor 3 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis nomor 3 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 (Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan)																				
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan																				
No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023(%)	
					Target	Realisasi														
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	3	Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		4	Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata capaian kinerja				100,00			100,00			100,00				100,00			100,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan dan Persentase Stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan adalah perjanjian kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan dengan realisasi capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung indikator sasaran nomor 3 ini dilaksanakan oleh Kasubbid Anggaran dengan pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan yaitu paling lambat pada tanggal 31 Desember.

Pada tahun 2018 penetapan APBD Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 dan untuk penetapan APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2018 Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Sedangkan pada tahun 2019 penetapan APBD Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019 Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan

Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2019 Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Pada tahun 2020 penetapan APBD Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2020 Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Pada tahun 2021 penetapan APBD Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2021 Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2021 Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%. Realisasi tersebut sudah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 100%.

Pada tahun 2022 penetapan APBD Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2022 Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2022 Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%. Realisasi tersebut sudah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 100%.

Pada tahun 2023 penetapan APBD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023 Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Oktober 2023 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%. Realisasi tersebut sudah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 100%.

Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan SDM yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah yang

tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur dilingkungan Bidang Belanja dan Pembiayaan yaitu sebanyak 14 PNS yang terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Eselon IV, 1 (satu) orang staf JFT dan 11 (sebelas) orang staf serta dibantu staf PTT sebanyak 3 (tiga) orang yang siap membantu dan melayani tugas dan fungsi yang dibutuhkan Organisasi. Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah tercapai kinerjanya 100% dengan realisasi anggaran rata-rata 91,25% dari pagu anggaran sebesar Rp 269.334.617.552,- terealisasi sebesar Rp 245.764.793.056,- sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran di Bidang Belanja dan Pembiayaan tahun 2023 rata-rata sebesar 8,75%, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023											
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT											
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN % 2023	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi	Penanggungjawab
		3.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	3 Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	%	100	100	100%	91,25%	100%	8,75%	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan
			4 Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100%				

3.1.1). Eselon IV (Kasubbid Anggaran)

Sasaran Strategis nomor 3 dengan indikator sasaran no 3 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atau Pejabat Eselon III.B tersebut, dilaksanakan atau menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bidang Anggaran atau Pejabat Eselon IV.A sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani. Untuk menggambarkan pencapaian kinerja Kasubbid Anggaran Tahun 2023 yang menjadi tanggungjawabnya akan dipaparkan dari pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja beserta analisisnya yaitu sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS sesuai ketentuan	1	Jumlah Dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS sesuai ketentuan	4 dokumen	4 dokumen	100%
2	Melaksanakan Sosialisasi Penyusunan RKASKPD sesuai ketentuan	2	Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi dan memahami penyusunan RKA sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
3	Melaksanakan Pembahasan RKASKPD sesuai ketentuan	3	Jumlah SKPD yang mengikuti pembahasan RKA sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
4	Melaksanakan Penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai ketentuan	4	Jumlah Dokumen Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	100%
5	Melaksanakan fasilitasi evaluasi atas Raperda dan Raperkada APBD serta Raperda dan Raperkada Perubahan APBD ke Pemprov sesuai ketentuan	5	Jumlah dokumen Raperda dan Raperkada APBD serta Raperda dan Raperkada Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi Gubernur	4 dokumen	4 dokumen	100%
6	Melaksanakan fasilitasi Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD sesuai ketentuan	6	Jumlah Dokumen Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	100%

7	Melaksanakan penyusunan penerbitan Penyediaan Dana Anggaran SKPD sesuai ketentuan	7	Jumlah SPD SKPD dan PPKD yang diterbitkan sesuai ketentuan	84 SPD	84 SPD	100%
8	Melaksanakan pembinaan penganggaran SKPD sesuai ketentuan	8	Jumlah SKPD yang dibina dalam penganggaran sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023

No.	ProgramKegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	AnggaranRp	Realisas Rp	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
A.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA danPPAS			59.643.027	41.393.400	69,40	
		Jumlah Dokum en KUA dan PPAS yang Disusu n	2 Dok		2 Dok	100	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			48.646.200	40.360.600	82,96	
		Jumlah Dokum en Peruba han KUA dan Peruba han PPAS yang Disusu n	2 Dok		2 Dok	100	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD			14.844.613	14.084.000	94,87	

		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dok		40 Dok	100	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			14.844.699	13.590.500	91,55	
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dok		40 Dok	100	
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			3.800.610	1.182.000	31,10	
		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dok		40 Dok	100	
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			3.871.950	1.022.000	26,39	
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dok		40 Dok	100	

No.	ProgramKegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	AnggaranRp	Realisas Rp	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD danPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			207.129.980	131.267.470	63,37	
		Jumlah dok. Perda APBD dan Perkada APBD	2 Dok		2 Dok	100	
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang PerubahanAPBD dan Peraturan KepalaDaerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			154.312.113	85.566.000	53,50	
		Jumlah dok. Perda P- APBD dan Perkada P- APBD	2 Dok		2 Dok	100	
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi sertaKebijakan Bidang Anggaran			28.341.775	19.699.000	69,50	
		Jumlah Dokume n Regulasi serta Kebijaka nBidang Anggara n	2 Dok		2 Dok	100	
A.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
1	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kasdan SPD			6.360.978	3.935.800	61,87	

		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalia ndan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	84 Dok		84 Dok	100%	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--------	------	--

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbid Anggaran Tahun 2023

A. Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023

- 1) Penyusunan KUA-PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sesuai ketentuan dengan target 4 dokumen sampai akhir Triwulan IV Tahun 2023 sudah terealisasi 100%.
- 2) Pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan RKA SKPD sesuai ketentuan dengan target 40 SKPD sampai akhir Triwulan IV Tahun 2023 ini sudah tercapai 100%.
- 3) Pelaksanaan Pembahasan RKA SKPD sesuai ketentuan dengan target 40 SKPD sampai akhir Triwulan IV Tahun 2023 sudah terlaksana 100%.
- 4) Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperda tentang Perubahan APBD sesuai ketentuan dengan target 2 dokumen sampai akhir Triwulan IV sudah tercapai 100%.
- 5) Pelaksanaan Fasilitasi terkait Evaluasi atas Raperda dan Raperkada APBD serta Raperda dan Raperkada Perubahan APBD oleh Pemerintah Provinsi melalui Bakeuda Provinsi Kal-Sel sesuai ketentuan dengan target 4 dokumen sampai akhir Triwulan IV sudah terlaksana 100%.
- 6) Pelaksanaan Fasilitasi terkait Penetapan Perda tentang APBD dan Perda tentang Perubahan APBD sesuai ketentuan dengan target 2 dokumen sampai dengan akhir Triwulan IV sudah terlaksana 100%.
- 7) Penyusunan/Penerbitan Penyediaan Dana Anggaran SKPD dan PPKD sesuai ketentuan dengan target 84 SPD telah tercapai 100%.
- 8) Pelaksanaan Pembinaan terkait Penganggaran SKPD sesuai ketentuan dengan target 40 SKPD sampai dengan akhir Triwulan IV telah terlaksana 100%.

B. Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2023

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, pagu anggaran sebesar Rp59.643.027,- dengan realisasi sampai akhir Triwulan IV sebesar Rp41.393.400,- atau hanya sebesar 69,40%, masih terdapat sisa pagu anggaran diantaranya pada anggaran untuk PPN dan sisa uang perjalanan dinas yang tidak terealisasi.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, pagu anggaran sebesar Rp48.646.200,- dengan realisasi sampai akhir Triwulan IV sebesar Rp40.360.000,- atau hanya sebesar 82,96%, masih terdapat sisa pagu anggaran diantaranya pada anggaran untuk PPN yang tidak terealisasi.

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, pagu anggaran sebesar Rp14.844.613,- dengan realisasi sampai akhir Triwulan IV sebesar Rp14.084.000,- atau sebesar 94,87%, masih terdapat sisa pagu anggaran diantaranya pada anggaran untuk PPN yang tidak terealisasi.
- 4) Sub Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, pagu anggaran sebesar Rp14.844.699,- dengan realisasi sampai akhir Triwulan IV sebesar Rp13.590.500,- atau sebesar 91,55%, masih terdapat sisa pagu anggaran diantaranya pada anggaran untuk PPN yang tidak terealisasi.

- 5) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, pagu anggaran sebesar Rp3.800.610,- dengan realisasi sampai akhir Triwulan IV sebesar Rp1.182.000,- atau hanya sebesar 31,10%, masih terdapat sisa pagu anggaran diantaranya pada anggaran makanan dan minuman rapat yang tidak dapat direalisasikan.
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD, pagu anggaran sebesar Rp3.817.950,- dengan realisasi sampaiakhir Triwulan IV sebesar Rp1.022.000,- atau hanya 26,39%, masih terdapat sisa pagu anggaran diantaranya pada anggaran makanan dan minuman rapat yang tidak dapat direalisasikan.
- 7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, pagu anggaran sebesar Rp207.129.980,- dengan realisasi sampai akhir Triwulan IV sebesar Rp131.267.470,- atau hanya 63,37%, masih terdapat sisa pagu anggaran diantaranya pada anggaran diantaranya pada anggaran untuk PPN, Honorarium Narasumber, perjalanan dinas ke luar daerah dan makanan dan minuman rapat yang tidak dapat direalisasikan.
- 8) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, pagu anggaran sebesar Rp154.312.113,- dengan realisasi sampai akhir Triwulan IV sebesar Rp85.566.000,- atau sebesar 53,50%, masih terdapat sisa pagu anggaran diantaranya pada anggaran untuk PPN, Honorarium Narasumber, perjalanan dinas ke luar daerah dan makanan dan minuman rapat yang tidak dapat direalisasikan.
- 9) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, pagu anggaran sebesar Rp28.341.775,- dengan realisasi hanya sebesar Rp19.699.000,- atau sebesar 69,50,22%. masih terdapat sisa pagu anggaran diantaranya pada anggaran untuk PPN.
- 10) Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, pagu anggaran sebesar Rp6.360.978,- dengan realisasi hanya sebesar Rp3.935.800,- atau sebesar 61,87,24%. sisa pagu anggaran diantaranya pada anggaran untuk PPN.

Kasubbid Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 6 (enam) orang staf dengan 5 (lima) orang ASN dan 1 (satu) orang Non ASN. Kasubbid Anggaran telah menyelesaikan/memenuhi seluruh target kinerja utama seperti yang tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi

- Tidak ada permasalahan dan kendala yang berarti

Rencana Aksi pada Tahun 2024

- Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2025
- Penyusunan KUA dan PPAS untuk Tahun 2025

Foto-Foto Kegiatan Kasubbid Anggaran Tahun 2023



Pembahasan RKA-SKPD Tahun 2024



Sosialisasi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2024



Pencetakan dan Penjilidan Dokumen



LKj BPKAD TAHUN 2023

3.1.2). Eselon IV (Kasubbid Perbendaharaan dan Pembiayaan)

Sasaran Strategis nomor 3 dengan indikator sasaran no 4 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan atau Pejabat Eselon III.B tersebut, dilaksanakan atau menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi atau Pejabat Eselon IV.A1 sesuai dengan Program dan Kegiatan, Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani. Untuk menggambarkan pencapaian kinerja Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi Tahun 2023 yang menjadi tanggungjawabnya akan dipaparkan dari pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja beserta analisisnya yaitu sebagai berikut :

1. Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan SP2D, penatausahaan keuangan daerah yang tertib sesuai dgn PerUU dan sebagai bahan dokumen pertanggungjawaban	1	Jumlah SP2D, SP2B, SPB, Daftar Penguji dan SKPP yang diterbitkan sesuai ketentuan	4.000 SP2D, 250 SP2B, 4 SPB, SKPP 230	8.071 SP2D, 252 SP2B, 4 SPB, SKPP 249	100%
2	Melaksanakan perhitungan Pembayaran JKK-JKM dan IWP 4% sesuai ketentuan	2	Jumlah Laporan Hasil Perhitungan Pembayaran JKK-JKM dan IWP 4% sesuai ketentuan	12 Lap. JKK, 12 Lap. JKM dan 12 Lap. IWP	12 Lap. JKK, 12 Lap. JKM dan 12 Lap. IWP	100%
3	Melaksanakan sosialisasi penatausahaan keuangan untuk Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai ketentuan	3	Jumlah Bendahara Pengeluaran SKPD yang disosialisasikan tentang penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	40 SKPD	42 SKPD	100%
4	Melaksanakan monitoring penatausahaan keuangan SKPD sesuai ketentuan	4	Jumlah SKPD yang termonitoring dalam penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	40 Stakeholder	42 Stakeholder	100%
5	Melaksanakan koordinasi/konsolidasi/evaluasi dengan stakeholder mengenai penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	5	Jumlah stakeholder yang dikoordinasi/dikonsolidasi /dievaluasi mengenai penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	40 Stakeholder	42 Stakeholder	100%
6	Melaksanakan penyediaan bahan penganggaran belanja transfer, belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	6	Jumlah dokumen penganggaran belanja transfer, belanja tidak terduga dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

7	Melaksanakan pelayanan penyaluran belanja transfer, belanja tidak terduga sesuai ketentuan	7	Jumlah pemohon yang menerima penyaluran belanja transfer, belanja tidak terduga sesuai ketentuan	135 Orang	135 Orang	100%
8	Melaksanakan sosialisasi penatausahaan pembiayaan daerah bagi Aparatur Desa sesuai ketentuan	8	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti dan memahami sosialisasi penatausahaan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	135 Orang	135 Orang	100%
9	Melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang melakukan monitoring terkait penyaluran dana hibah dan bansos sesuai ketentuan	9	Jumlah SKPD yang menerima dana hibah dan bansos yang terkoordinasi sesuai ketentuan	6 SKPD	6 SKPD	100%
10	Melaksanakan penyusunan Laporan Pembiayaan Daerah sesuai ketentuan	10	Jumlah dokumen Laporan Pembiayaan Daerah yang dilaporkan sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2. Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran RP	Realisasi	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
A.1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
1	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			2.250.000	1.350.000	60%	
		Jumlah Jenis	4.000 SP2D, 250 SP2B, 4 SPB, SKPP 230		8.071 SP2D, 252 SP2B, 4 SPB, SKPP 249	100%	
2	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			1.620.000	0	0%	
		Jumlah Kali	12 Lap. JKK, 12 Lap. JKM dan 12 Lap. IWP		12 Lap. JKK, 12 Lap. JKM dan 12 Lap. IWP	100%	
3	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan			13.326.000	11.706.000	87%	

	Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						
		Jumlah Dokumen	2 dokumen		2 Dokumen	100 %	
4	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			193.495.282	152.845.171	78%	
	Melaksanakan monitoring penatausahaan keuangan SKPD sesuai ketentuan	Jumlah SKPD	40 SKPD		42 SKPD	100%	
	Melaksanakan koordinasi/konsolidasi/evaluasi dengan stakeholder mengenai penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah SKPD	40 SKPD		42 SKPD	100%	
5	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen	3 dokumen	1.958.702	1.686.400	86 %	
6	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen	49.336.132	36.886.750	75%	
7	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan	130 Laporan	246.343.464.346	244.652.753.666	99%	
8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen	1 dokumen	14.456.000	14.306.000	99%	
9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dokumen	1 dokumen	22,172,915,145	540,899,999	2%	

3. Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbid Perbendaharaan dan Pembiayaan Tahun 2022

A. Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan SP2D, penatausahaan keuangan daerah yang tertib sesuai dgn PerUU dan sebagai bahan dokumen pertanggung jawaban dengan indikator Jumlah SP2D, SP2B, SPB, dan SKPP yang diterbitkan sesuai ketentuan sebagaimana yang ditargetkan yaitu 4.000 SP2D, 250 SP2B, 4 SPB dan 230 SKPP. sampai dengan Triwulan IV telah dicapai sebanyak 8.071 SP2D, 252 SP2B, 4 SPB dan 249 SKPP atau dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian tersebut dengan menggunakan sistem SIPD Kemendagri untuk penerbitan SP2D, Manual/Excel untuk penerbitan SP2B, Manual/Excel untuk penerbitan SPB serta Sistem SIMGAJI PT.Taspen untuk penerbitan SKPP.

- 2) Melaksanakan perhitungan Pembayaran JKK-JKM dan IWP 4% sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Perhitungan Pembayaran JKK-JKM dan IWP 4% sesuai ketentuan sebagaimana ditargetkan yaitu 24 Lap. JKK, 24 Lap. JKM dan 24 Lap. IWP, saat ini telah penyampaian laporan sebanyak 24 Lap. JKK, 24 Lap. JKM dan 24 Lap. IWP sehingga capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Telah dibuat Petunjuk Teknis Penatausahaan sebagai dasar acuan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada 42 SKPD/Unit SKPD berupa Surat Edaran Penatausahaan Keuangan, Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan aktor-aktor pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Biaya perjalanan dinas dilingkup pemerintah daerah
- 4) Melaksanakan monitoring penatausahaan keuangan SKPD sesuai ketentuan dengan indikator Jumlah SKPD yang termonitoring dalam penatausahaan keuangan serta melaksanakan koordinasi/konsolidasi/evaluasi dengan stakeholder mengenai penatausahaan keuangan sesuai ketentuan dengan indikator yaitu sebanyak 42 Stakeholder/SKPD dilingkup Pemerintah Daerah.
- 5) Dokumen Surat Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2023
- 6) Penerbitan SPP-SPM Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Tahap I dan Tahap II serta kurang salur bagi hasil pajak daerah direalisasikan ke 130 desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
- 7) Tersalurkannya Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk penanganan korban bencana kebakaran, bencana puting beliung dan korban bencana abrasi serta warga penyandang penyakit.
- 8) Sosialisasi kepada SKPD teknis terkait pelaksanaan hibah dan bansos Tahun Anggaran 2022 serta penganggaran hibah dan bansos pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 9) Tersalurkan Belanja Tak Terduga kepada kepada SKPD Teknis yang menangani penanganan bencana kebakaran, abrasi dan puting beliung di Kabupaten Tanah Laut.

B. Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2023

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan pagu anggaran Rp. 2.250.000,- sampai dengan akhir Triwulan IV pencapaian realisasi sebesar Rp. 1.350.000,- atau 60%. Ditahun 2023, Bendahara Pengeluaran SKPD menggunakan produk dari Bank Kalsel dalam hal transaksi non tunai berupa IBB dan OSP.

- 2) Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan pagu anggaran Rp. 1.620.000,- sampai dengan akhir Triwulan IV telah terealisasi Rp. 0,- (37%). Sub Kegiatan ini dengan target kinerja melakukan Rekonsiliasi dengan 40 SKPD maupun dengan Pihak PT. Taspen, BPJS Kesehatan maupun dengan pihak Bank Kalsel sebanyak 4 kali (Triwulanan) dengan hasil yaitu 12 Lap. JKK, 12 Lap. JKM dan 12 Lap. IWP.
- 3) Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 13.326.000,- sampai dengan akhir Triwulan IV telah terealisasi Rp. 11.706.000,- (87%). Petunjuk Teknis Penatausahaan sebagai dasar acuan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada 42 SKPD/Unit SKPD berupa Surat Edaran Penatausahaan Keuangan, Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan aktor-aktor pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Biaya perjalanan dinas dilingkup pemerintah daerah.
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 193.495.282,- sampai dengan akhir Triwulan IV telah terealisasi Rp. 152.845.171,- (78%). Sub Kegiatan ini dengan target kinerja sebanyak 40 SKPD/Stake Holder melalui monitoring penatausahaan keuangan SKPD, melalui koordinasi/konsolidasi dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan keuangan SKPD dengan capaian kinerja 42 SKPD melalui monitoring dan 42 SKPD melalui koordinasi/konsolidasi dan evaluasi khususnya kepada Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pengelola Gaji SKPD
- 5) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 1.958.702 dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp 1.686.400 (86%), dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi kepada SKPD teknis terkait peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2023 tentang tatacara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari. APBD.
- 6) Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 49.336.132 dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp 36.886.750 atau capaian sebesar 75 %, Sub Kegiatan ini untuk kegiatan sosialisasi dan koordinasi kepada aparat pemerintah desa se Kabupaten Tanah Laut .
- 7) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 14.456.000

dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp 14.306.000 atau capaian sebesar 99%. Kegiatan melalui koordinasi dengan Bank Kalsel Cabang Pelaihari.

- 8) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan Pagu anggaran Sebesar 246.343.464.346 dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp 219.164.599.540 atau capaian sebesar 99%, Sub Kegiatan ini melaksanakan penyaluran Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan tahap I dan Tahap II. untuk Dana Desa Tahap I, Tahap II, Tahap III dan BLT bulan 1 sd 12 disalurkan melalui pemotongan langsung dari rekening kas daerah ke rekening kas desa oleh KPPN.
- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 22,172,915,145 dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp. 540,899,999 atau capaian keuangan sebesar 2%, Sub Kegiatan ini terealisasi untuk pengembalian kelebihan setor oleh KPKNL dan penyaluran Dana Belanja Tak Terduga kepada SKPD teknis yang menangani penanganan bencana kebakaran, abrasi dan puting beliung di Kabupaten Tanah Laut.

C. Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

- Secara teknis, Sistem SIPD Kemendagri 2023 sudah dapat memenuhi dan berjalan baik dalam hal kebutuhan fitur Penganggaran sampai pelaksanaan Penatausahaan namun masih belum dapat mengakomodir dalam hal pencatatan akuntansi dan pelaporan.
- Terkendala pada Bantuan Keuangan Khusus yang tidak dapat disalurkan ke desa penerima karena tidak sesuai dengan prosedur yang diatur pada Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus
- Tambahan Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa tidak tersalurkan terkendala Perubahan Peraturan Bupati oleh Dinas PMD.
-

D. Rencana Aksi

- Menjalankan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Memberikan wawasan/pengetahuan lebih kepada pengelola keuangan SKPD khususnya dalam hal penatausahaan Sistem SIPD
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak Bank terkait Transaksi Non Tunai agar lebih mempermudah sistem yang sudah dijalankan.
- Melaksanakan koordinasi dengan SKPD yang melakukan pembinaan ke desa sehubungan dengan tidak realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa.
- Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan dan juga monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial kepada SKPD teknis terkait.

Kasubbid Perbendaharaan dan Pembiayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung SDM yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan

jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur dilingkungan Subbid Perbendaharaan dan Pembiayaan yaitu sebanyak 6 (enam) orang staf PNS serta dibantu staf PTT sebanyak 2 (dua) orang yang siap membantu dan melayani tugas dan fungsi yang dibutuhkan Organisasi. Kasubbid Perbendaharaan dan Pembiayaan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah tercapai kinerjanya 100% dengan realisasi keuangan rata-rata sebesar 61,25% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran rata-rata diatas 38% dari 1 Program 2 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Kasubbid Perbendaharaan dan Pembiayaan pada tahun 2023.

Foto-Foto Kegiatan





4. ESELON III.B (Kepala Bidang Akuntansi)

4.1. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 3

Sasaran Strategis nomor 3 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Akuntansi atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis nomor 3 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Akuntansi dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 (Kepala Bidang Akuntansi) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan																				
No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	
					Target	Realisasi														
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	5	Persentase kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Pemkab dan Pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja							100,00			100,00			100,00			100,00			100,00	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Pemkab dan Pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan capaian kinerjanya baik pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan pada tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %, yaitu dibuktikan dengan telah tersajinya LKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya serta telah disampaikan secara tepat waktu untuk dilakukan Audit oleh Tim Auditor. Realisasi tersebut sudah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis Kepala Bidang Akuntansi nomor 3 Indikator sasaran ini dilaksanakan oleh Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas dan Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban dengan pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA Tahun 2023 dapat diuraikan pada pembahasan berikut dibawah ini.

Berikut ini tabel yang menggambarkan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja tahun 2023 yang menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Akuntansi :

LKj BPKAD TAHUN 2023

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023											
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT											
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN % 2023	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi	Penanggungjawab
		3.Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	5 Persentase kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Pemkab dan Pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	89,79%	100%	10,21%	Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan SDM yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur dilingkungan Bidang Akuntansi yaitu sebanyak 3 PNS yang terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Eselon IV dan 1 (satu) orang staf PNS serta dibantu staf PTT sebanyak 4 (empat) orang yang siap membantu dan melayani tugas dan fungsi yang dibutuhkan Organisasi. Kepala Bidang Akuntansi telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah tercapai kinerjanya 100% dengan realisasi anggaran rata-rata 89,79% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran di Bidang Akuntansi rata-rata sebesar 10,21% dari 1 Program 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Akuntansi pada tahun 2023.

4.1.1). Eselon IV (Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas)

Pada tahun 2014 Laporan Keuangan SKPD berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual), sehingga capaian kinerja hanya mencapai 50%, karena Laporan Keuangan SKPD belum sepenuhnya berbasis akrual.

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) dan pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 dibuat berdasarkan Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 ini adalah sebagai Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yaitu BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Demikian juga pada tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual telah disampaikan oleh seluruh SKPD dan telah di Audit oleh BPK – RI dan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual. Dengan demikian bahwa pelaporan keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berbasis Akrual dapat dijamin terpenuhi 100%.

Untuk mendukung Sasaran strategis No 3 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Akuntansi diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas yaitu dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas Tahun 2023 sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Melaksanakan koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang melakukan koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas sesuai ketentuan	15 SKPD	15 SKPD	100%
2	Melaksanakan Pembinaan Bendahara Penerimaan SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Bendahara Penerimaan yang terbina dan memahami mekanisme pelaporan keuangan sesuai ketentuan	15 Bendahara Penerimaan	15 SKPD	100%
3	Melaksanakan fasilitasi terhadap stakeholder dalam penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan	Jumlah stakeholder yang difasilitasi dalam penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan	10 SKPD	10 SKPD	100%

4	Melaksanakan monitoring SKPD yang mengelola pendapatan dan piutang sesuai ketentuan	Jumlah SKPD yang termonitoring pendapatan dan piutang sesuai ketentuan	15 SKPD	15KPD	100%
5	Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pendapatan dan Piutang Pemkab sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pendapatan dan Piutang Pemkab hasil konsolidasi sesuai ketentuan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
6	Melaksanakan koordinasi penerimaan pajak daerah atas belanja SKPD	Jumlah SKPD yang melaksanakan koordinasi penerimaan pajak daerah atas belanja SKPD	40 SKPD	1 Dokumen	100%
7	Melaksanakan konsolidasi Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD, Laporan JKN, Laporan Dana BOS, Laporan SIKD sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD, Laporan JKN, Laporan Dana BOS, Laporan SIKD sesuai ketentuan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
8	Melaksanakan Monitoring Kas SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Kas SKPD yang termonitoring sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
9	Melaksanakan Rekonsiliasi Kas SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Kas SKPD yang telah direkonsiliasi sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian %
Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						

1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			Rp88.586.578,00	Rp79.551.035,00	89,80%
		Jumlah Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			Rp34.192.365,00	Rp28.496.420,00	83,34%
		Jumlah Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	95%
3	Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Rp74.812.988,00	Rp68.081.600,00	91,00%
		Jumlah Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%

Analisis Pencapaian Kinerja Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas Tahun 2023

1. Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023

1. Tahun 2023 Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas telah membuat SK Tim Koordinasi Akuntansi Pendapatan dan Penerimaan Kas SKPD per Triwulan beserta besaran honorarium, SK Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pendapatan dan Pengelolaan Kas beserta SK Besaran Honorarium, SK Tim Penyusunan Laporan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) beserta SK Besaran Honorarium, SK Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, SK Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan SK Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah beserta Besaran Honorarium, dan SK Tim Rekon Kas BBLUD per triwulan.
2. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengeluaran Kas melakukan verifikasi atas transaksi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah dengan inputan pendapatan dan belanja SKPD se-Kabupaten Tanah Laut.

3. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas sudah melaksanakan koordinasi akuntansi penerimaan dan kas sesuai ketentuan yang dilaksanakan dengan mengundang Bendahara Penerimaan se-Kabupaten Tanah Laut berjumlah 15 (lima belas) SKPD sudah terealisasi sebanyak 4 kali (per-triwulan) yaitu Triwulan IV TA. 2022 pada tanggal 16 dan 17 Februari 2023, Triwulan I Tahun 2023 pada tanggal 15 dan 16 Mei 2023, Triwulan II pada tanggal 17 dan 18 Juli 2023 dan Triwulan III Tahun 2023 pada tanggal 13 dan 14 November 2023 dengan menggunakan Aplikasi SIPD dan FMIS sebagai dasar pelaksanaan rekonsiliasi. Realisasi hasil koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas sebanyak 4 (empat) laporan.
4. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas melakukan pembinaan penginputan pendapatan di SIPD dan FMIS dilakukan dengan menerima konsultasi Bendahara Penerimaan yang masih mempelajari Aplikasi SIPD dan Aplikasi FMIS.
5. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas melakukan pembinaan terhadap Bendahara Penerimaan dari 15 (lima belas) SKPD dilaksanakan monitoring penginputan pendapatan ke dalam Aplikasi SIPD dan FMIS.
6. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pendapatan dan Pengelolaan Kas Pemkab sesuai ketentuan dengan berkoordinasi dengan SKPD dan telah dihasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Unaudit, Audited dan Daftar Piutang dan Investasi Non Permanen
7. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas melaksanakan monitoring SKPD yang mengelola pendapatan dan piutang sesuai ketentuan dengan melakukan koordinasi dengan SKPD yang mengelola pendapatan dan piutang dan memvalidasi Laporan Bulanan Bendahara Penerimaan yang diterima setiap bulan.
8. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas melaksanakan Monitoring Kas SKPD sesuai ketentuan dengan melakukan verifikasi dan validasi data transaksi harian.
9. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas melaksanakan Rekonsiliasi antara Kas Daerah dengan Bank Kalsel setiap bulannya, dan telah menghasil 12 Hasil Rekonsiliasi Kas Daerah dengan Bank Kalsel.

10. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas melakukan pembinaan PKM dan RSUD BLUD dilakukan dengan menerima konsultasi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD yang masih mempelajari Aplikasi SIPD dan Aplikasi FMIS.
11. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas melaksanakan monitoring Laporan BLUD sesuai ketentuan dengan melakukan verifikasi dan validasi Laporan BLUD yang masuk setiap bulan.
12. Subbid Akuntansi melaksanakan Rekon Kas BLUD per triwulan dengan mengundang RSUD dan PKM BLUD se-Kabupaten Tanah Laut yang diselenggarakan antara lain: Rekon Kas BLUD Triwulan IV TA. 2022 pada tanggal 15 s/d 17 Maret 2023, Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2023 pada tanggal 24 s/d 31 Juli 2023, dan Triwulan III Tahun 2023 pada tanggal 20 s/d 22 November 2023 dengan menggunakan Aplikasi SIPD dan FMIS sebagai dasar pelaksanaan rekonsiliasi.
13. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas melaksanakan koordinasi penerimaan pajak daerah atas belanja SKPD dengan menerima dan memverifikasi Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah atas belanja SKPD yang masuk dalam email setiap bulannya
14. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas melaksanakan konsolidasi Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Laporan Dana BOS, Laporan SIKD sesuai ketentuan, salah satunya dilakukan dengan monitoring dan verifikasi saldo Kas BLUD dari Laporan Bulanan BLUD yang diterima setiap bulan
15. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas membuat Rekap Penyelesaian Kerugian Daerah setiap bulan dengan mengumpulkan STS dan rekening dari pembayaran TGR di Rekening Koran dan mengirimkannya setiap bulan ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan setiap bulan. Dari transaksi pembayaran itu dimasukkan dalam Rekap Penyelesaian Kerugian Daerah setiap bulan yang menghasilkan Laporan Rekap Penyelesaian Kerugian Daerah se-Kabupaten Tanah Laut
16. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas mengirimkan Laporan SIKD setiap bulan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya melalui Aplikasi Sinergi yang menjadi salah satu syarat pencairan DAU.

17. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas menyampaikan Laporan Monitoring Penyerapan DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan DAU Kelurahan dengan penyaluran selama 3 tahap dan berkoordinasi dengan SKPD yang menerima dana DAU Yang Ditentukan Penggunaannya.
18. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas menyampaikan Laporan Realisasi Kinerja Sanitasi Lingkungan Semester I dan Semester II Tahun 2023 ke Kementerian Keuangan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai syarat salur Pencairan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA).
19. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas menyampaikan Laporan Realisasi CHT sebagai syarat salur Penyaluran DBH CHT.
20. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas memverifikasi dan memvalidasi Rekening Koran BOS SD dan SMP Semester I dan Semester II dan Rekap Pendapatan dan Belanja BOS SD dan SMP sebagai bahan Rekon Dana BOS per semester Tahun 2023.
21. Dengan pengimplementasian Aplikasi FMIS dari BPKP sebagai Aplikasi pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas juga melakukan pendampingan Bendahara Penerimaan untuk penginputan pendapatan, penginputan transaksi BLUD dan transaksi Dana BOS pada Aplikasi tersebut
22. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas melakukan koordinasi dengan Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset terkait pendapatan hasil sewa.
23. Subbid Akuntansi melaksanakan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Si-Lkeu bagi BLUD pada tanggal 23 November 2023 dan melaksanakan Rapat Koordinasi dengan pengelola BLUD terkait percepatan dan peningkatan kualitas laporan BLUD pada tanggal 9 November 2023.
24. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah terkait transferan pendapatan yang masuk ke Kas Daerah dan tidak ada SKPD yang melakukan penginputan pendapatannya.

25. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas melakukan konsultasi terkait tuntutan perbendaharaan dengan BPK RI Pusat di Jakarta dan melakukan rekon pemantauan kerugian daerah per semester dengan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
26. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas selaku Sekretaris Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah membuat draft surat tagihan penyelesaian kerugian daerah kepada pihak ketiga dan SKPD terkait kerugian daerah
27. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas membuat 310 (Tiga Ratus Sepuluh) draft Surat Keterangan Lunas untuk ditandatangani Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah atas kerugian daerah yang sudah lunas dan telah diakui lunas oleh BPK RI dan telah dibuatkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara
28. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas melakukan fasilitasi dalam penyelesaian kerugian daerah dengan menyelenggarakan Rapat Penyelesaian Kerugian Daerah pada tanggal 24 November 2023.
29. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas melakukan Sosialisasi Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun 2023 bagi SKPD pada tanggal 7 November 2023.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp88.586.578,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp79.551.035,00 atau capaian sebesar 89,80%
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dengan Pagu anggaran Sebesar Rp34.192.365,00,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp28.496.420,00 atau capaian sebesar 83,34%.
- 3) Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp74.812.988,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp68.081.600,00 atau capaian sebesar 91,00%.

Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung Sumber Daya Manusia yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur di lingkungan Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas yaitu sebanyak 2 (dua) orang PTT yang siap membantu dan melayani tugas dan fungsi yang dibutuhkan Organisasi. Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah tercapai kinerjanya rata-rata 98,33% dengan realisasi keuangan rata-rata sebesar 88,04% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran rata-rata sebesar 30% dari 1 Program 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas pada tahun 2023.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

a. Permasalahan

Penggunaan 2(dua) aplikasi untuk penginputan transaksi keuangan tentu saja memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan. Aplikasi SIPD yang masih dalam tahap pengembangan menimbulkan kesulitan dalam melakukan Cek Inputan dengan Laporan yang dihasilkan. Tidak ada menu CK seperti dalam SIMDA sehingga kesulitan melacak entrian pendapatan yang tidak sesuai rekening koran, sedangkan dalam Aplikasi FMIS masih terdapat kekurangan karena anggaran dilakukan inputan ulang dari Aplikasi SIPD dan terdapat beberapa kode rekening yang tidak diakomodir di Aplikasi FMIS.

- b. Kendala dalam penginputan adalah adanya beberapa akun dalam satu SKPD yaitu pada saat entry pendapatan menggunakan akun Bendahara Penerimaan, kemudian masuk ke Akun PPK saat verifikasi pendapatan, dan melakukan otorisasi menggunakan akun Kepala SKPD. Bagi Bendahara Penerimaan yang memahami aplikasi hal ini tidak menimbulkan kendala, tetapi bagi Bendahara Penerimaan yang sudah tua atau sepuh hal ini tentu menimbulkan kesulitan, sehingga hasil inputan dari pendapatan itu tidak diakui validitasnya. Di samping itu SIPD tidak mengakomodir angka desimal di belakang koma sedangkan transaksi di Kas Daerah dari pendapatan ada transaksi

dengan angka desimal di belakang koma sehingga menimbulkan selisih antara saldo Kas Daerah riil dengan angka di Aplikasi SIPD.

- c. SIPD belum mengakomodir Buku Besar Pendapatan secara konsolidasi, sehingga untuk membreak down pendapatan per jenis harus membuka masing-masing SKPD, baru di jumlah secara manual. Sedangkan pada Aplikasi FMIS dikarenakan inputan ulang maka laporan tidak bisa digunakan karena menunggu inputan SKPD terlebih dahulu.
- d. Masih terdapat beberapa kode rekening yang belum disediakan oleh SIPD antara lain SilPa, sehingga Silpa tahun sebelumnya yang disajikan pada Penerimaan pembiayaan masih menggunakan inputan manual

Upaya Pemecahan Masalah

- Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas membuat file dalam bentuk Excel untuk mengokomodir BKU Kas Daerah karena tidak diakomodir dalam SIPD untuk Kas Daerah Konsolidasi
- Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas membuat file excel cara pengecekan antara inputan yang masuk dengan hasil keluaran dari laporan
- Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas merekap selisih antara Kas Daerah dengan Inputan di SIPD

Rencana Aksi

- Mendata Bendahara Penerimaan yang belum memahami SIPD;
- Mengadakan diskusi permasalahan input data penerimaan pada SIPD;
- Memberikan bantuan pembelajaran pemahaman SIPD kepada Bendahara Penerimaan
- Konsultasi terkait permasalahan SIPD dengan staf yang menangani di Kementerian Dalam Negeri
- Rencana penggunaan FMIS sebagai Aplikasi Pendamping

Foto - Foto Kegiatan Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas Tahun Anggaran 2023

KOORDINASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS TRIWULAN IV TAHUN 2022, TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2023





PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI BPKP



REKON KAS BLUD TRIWULAN IV TAHUN 2022, TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2023

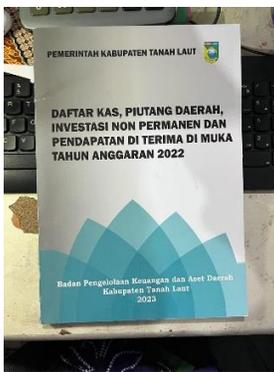
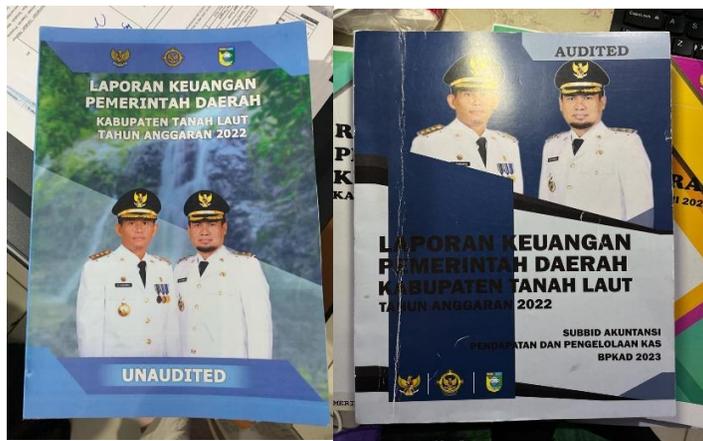




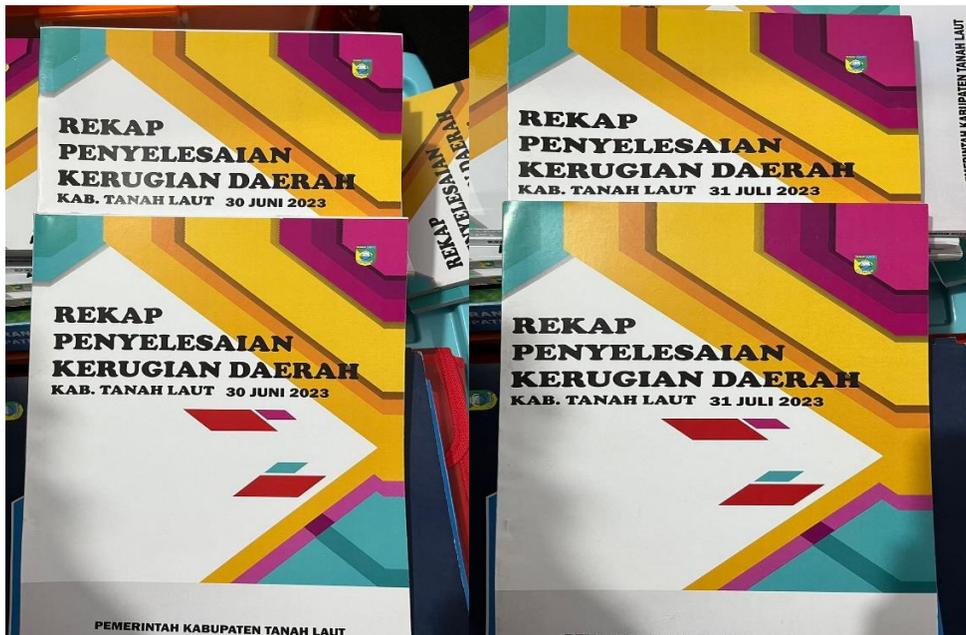
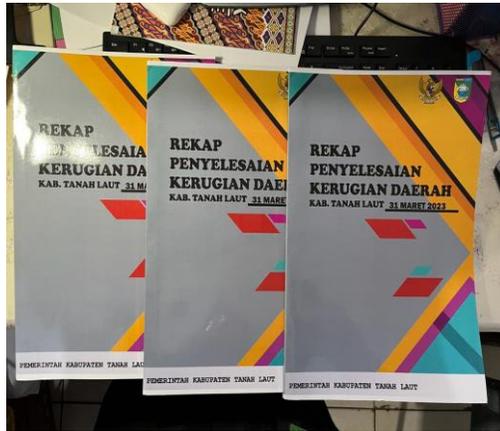
**REVIEW INSPEKTORAT ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022**

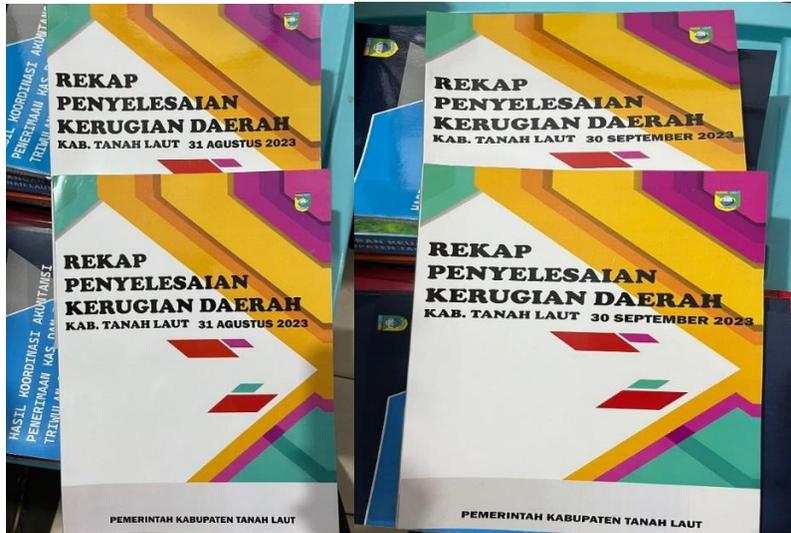


HASIL CETAKAN SUBSID AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KAS









RAPAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TANGGAL 24 NOVEMBER 2023





**RAPAT KOORDINASI TROUBLE SHOOTING ANGGARAN BLUD DAN PENDAPATAN
DI FMIS TANGGAL 14 DESEMBER 2023**





REKON PEMANTAUAN KERUGIAN DAERAH SEMESTER II TAHUN 2023 DI BPK RI



KONSULTASI TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DI BPK RI PUSAT DI JAKARTA



SOSIALISASI APLIKASI SI-LKEU BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN BLUD



RAPAT KOORDINASI DENGAN PENGELOLA BLUD DAN DINAS KESEHATAN



SOSIALISASI SURAT EDARAN LANGKAH-LANGKAH MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 BAGI SKPD





4.1.2). Eselon IV (Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban)

Untuk mendukung Sasaran strategis No 3 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Akuntansi diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban yaitu dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban Tahun 2023 sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan Rekonsiliasi belanja dan beban, Rekonsiliasi Pajak Pusat serta Rekonsiliasi Belanja Modal sesuai ketentuan	1	Jumlah SKPD pengelola belanja dan beban, Pajak Pusat serta Belanja Modal yang telah melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
2	Melaksanakan Pembinaan	2	Jumlah Bendahara Pengeluaran SKPD	40 Bendahara	40 Bendahara	100%

LKj BPKAD TAHUN 2023

	Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai ketentuan		yang terbina dan memahami mekanisme pelaporan keuangan sesuai ketentuan	Pengeluaran	Pengeluaran	
3	Melaksanakan Pembinaan terhadap SKPD penerima DAK sesuai ketentuan	3	Jumlah SKPD yang telah dibina dan memahami mekanisme teknis penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sesuai ketentuan	16 SKPD	16 SKPD	100%
4	Melaksanakan monitoring SKPD yang mengelola belanja dan beban sesuai ketentuan	4	Jumlah SKPD yang termonitoring belanja dan beban sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
5	Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Belanja, Beban dan Aset Pemkab sesuai ketentuan	5	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Belanja, Beban dan Aset Pemkab sesuai ketentuan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
6	Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, DAK Fisik dan DAK Non Fisik atas Realisasi Keuangan Pemkab sesuai ketentuan	6	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, DAK Fisik dan DAK Non Fisik atas Realisasi Keuangan hasil konsolidasi sesuai ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
7	Melaksanakan Pembinaan Pertanggungjawaban keuangan SKPD sesuai ketentuan	7	Jumlah SKPD yang terbina dan memahami mekanisme pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
8	Melaksanakan fasilitasi terhadap pelayanan laporan	8	Jumlah SKPD yang terfasilitasi dalam penyusunan laporan	40 SKPD	40 SKPD	100%

	keuangan SKPD sesuai ketentuan		keuangan sesuai ketentuan			
9	Melaksanakan penyusunan LKPD, Raperda, Raperbup, Perda, Perbup Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan	9	Jumlah Dokumen LKPD, Raperda, Raperbup, Perda, Perbup Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator or Kinerja	Target Kinerja	Anggaran RP	Realisasi	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
A.1	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			92.638.638	88.388.580	95,41	
		Jumlah dokumen	4 Dok		4	100	
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			157.191.942	139.336.450	88,64	
		Jumlah dokumen	7 Dok		7	100	
3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang			218.337.456	188.506.600	86,34	

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran RP	Realisasi	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						
		Jumlah dokumen	6 Dok		6	100	

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbid Akuntansi Belanja & Beban Tahun 2023

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023

- 1) Jumlah SKPD pengelola belanja dan beban, Dana Alokasi Khusus, Pajak Pusat serta Belanja Modal yang telah melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebanyak 40 SKPD, telah terelaisasi untuk Rekonsiliasi Belanja dan Beban dengan SKPD Per-Triwulan, Rekonsiliasi Belanja Modal, Rekonsiliasi DAK dan untuk rekonsiliasi pajak pusat.
- 2) Jumlah Bendahara Pengeluaran SKPD yang terbina dan memahami mekanisme pelaporan keuangan sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebanyak 40 Bendahara Pengeluaran, pada TA 2023 melakukan pembinaan mengenai akuntansi dan pelaporan pada aplikasi SIPD.
- 3) Jumlah SKPD yang telah dibina dan memahami mekanisme teknis penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebanyak 16 SKPD, sudah dilakukan pembinaan terhadap SKPD pengeloa Dana Alokasi Khusus baik Fisik maupun Nonfisik sehingga penyaluran terlaksana 100%.
- 4) Jumlah SKPD yang termonitoring belanja dan beban sesuai ketentuan, dengan target kinerja 40 SKPD, sampai TA 2023 telah dilakukan monitoring terhadap belanja SKPD untuk laporan bulanan dari bulan Januari s.d Desember TA 2023 penyampaian laporan SKPD dibawah tanggal 10 bulan berikutnya.

- 5) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Belanja, Beban dan Aset Pemkab sesuai ketentuan, dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen yaitu (Laporan Hasil Rekonsiliasi Belanja dan Beban dengan SKPD Per-Triwulan, Laporan Hasil Rekonsiliasi Belanja Modal Per-Triwulan, Laporan Hasil Rekonsiliasi Pajak Pusat Per-Semester dan Laporan Hasil Rekonsiliasi DAK), sampai Tahun 2023 sudah terealisasi sebesar 100%.
- 6) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, DAK Fisik dan DAK Non Fisik atas Realisasi Keuangan hasil konsolidasi sesuai ketentuan dengan Target Kinerja Sebanyak 7 dokumen yaitu (Laporan Bulanan, Laporan DAK Fisik Kabupaten Tanah Laut, Laporan DAK Non Fisik Kabupaten Tanah Laut, Laporan Keuangan Belanja dan Beban Audited, Laporan Keuangan Belanja dan Beban Unaudit, Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan dan Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis APBD) telah terealisasi sebanyak 7 dokumen, sehingga realisasi capaian kinerja sebesar 100%.
- 7) Jumlah SKPD yang terbina dan memahami mekanisme pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan, dengan target kinerja 40 SKPD.
- 8) Jumlah SKPD yang terfasilitasi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan, dengan target kinerja 40 SKPD.
- 9) Jumlah Dokumen LKPD, Raperda, Raperbup, Perda, Perbup Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan, dengan Target Kinerja Sebanyak 6 dokumen yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited TA 2022, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Un Audited TA 2022, Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Audited dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Audited, telah terealisasi sebanyak 6 dokumen, sehingga realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun Anggaran 2023

- 1). Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan Pagu anggaran Sebesar Rp92.638.638,00 dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp88.388.580,00 atau capaian sebesar 95,41%.

- 2). Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan Pagu anggaran Sebesar Rp157.191.942,00 dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp139.336.450,00 atau capaian sebesar 88,64%.
- 3). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dengan Pagu anggaran Sebesar Rp218.337.456,00 dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp188.506.600,00 atau capaian sebesar 86,34%

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

- Sumber Daya Manusia di subbidang akuntansi belanja dan beban masih kurang,
- Terdapat mutasi staf (bendahara pengeluaran) di masing-masing SKPD,
- Pelaporan melalui aplikasi FMIS masih dalam proses migrasi dari SIPD,
- Adanya SKPD yang sering mengambatkan laporan tepat waktu.

Rencana Aksi

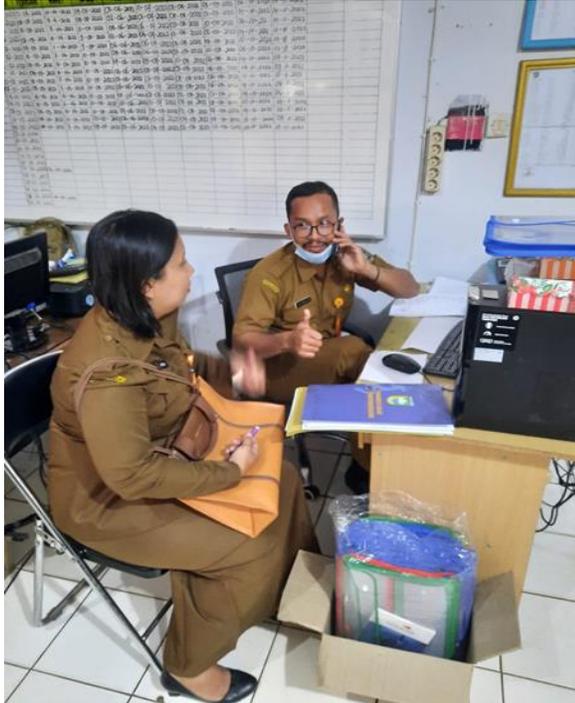
- Meningkatkan kualitas SDM untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun 2023,
- Melakukan Pembinaan untuk meningkatkan kualitas SDM di SKPD,
- Melakukan koordinasi dengan BPKP dan semua SKPD terkait permasalahan migrasi data,
- Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap SKPD mengenai kewajiban SKPD.

Foto - Foto Kegiatan Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban Tahun Anggaran 2023

1). Rekonsiliasi Keuangan Triwulan IV TA 2022 pada tanggal 16 s.d 19 Januari 2023



2). Rekonsiliasi Keuangan Triwulan I TA 2023 pada tanggal 17, 19, 22 s.d 23 Mei 2023



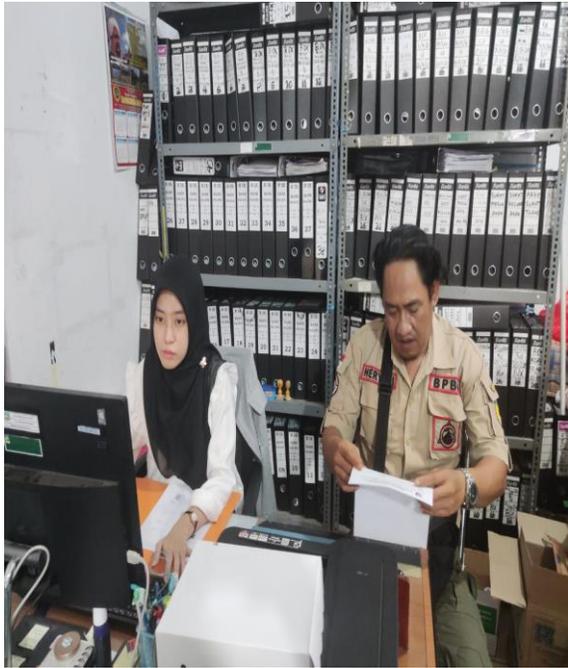


3). Rekonsiliasi Keuangan Triwulan II TA 2023 pada tanggal 14, 15, 16 dan 18 Agustus 2023





4). Rekonsiliasi Keuangan Triwulan III TA 2023 pada tanggal 06 s.d 09 November 2023





5). Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester 2 TA 2022 pada tanggal 27 Februari 2023 dan pada tanggal 05 April 2023



6). Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester I TA 2023 pada tanggal 24 Agustus 2023



7). Rekonsiliasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada tanggal 23 dan 24 Agustus 2023



8). Rekonsiliasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2023



9). Rekonsiliasi Belanja Modal Semester II TA 2022 pada tanggal 24 dan 25 Mei 2023



10). Rekonsiliasi Belanja Modal Semester I TA 2023 pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2023



11). Melaksanakan penginputan saldo awal TA 2023 pada tanggal 12 dan 13 September 2023



12). Melaksanakan Konsultasi terkait Masalah SIPD Ke BPKAD Kota Banjarmasin pada tanggal 23 November 2023



13). Melaksanakan Penyusunan Laporan Bendahara Pengeluaran pada tanggal 07 Desember 2023



14). Melaksanakan FGD terkait Penyusunan Laporan Keuangan SKPD pada tanggal 22 Desember 2023



15). Melaksanakan FGD terkait Penyusunan Laporan Keuangan BLUD pada tanggal 27 Desember 2023



16). Mengikuti Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 di BPKP tanggal tanggal 02 s.d 04 Februari 2023



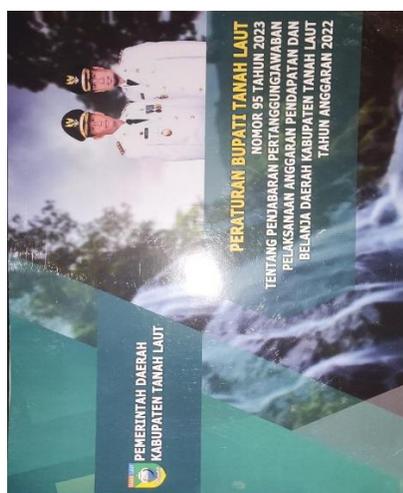
17). Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 23 Oktober 2023

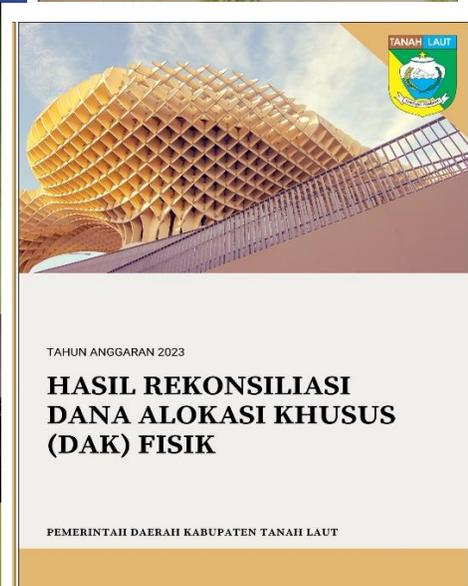
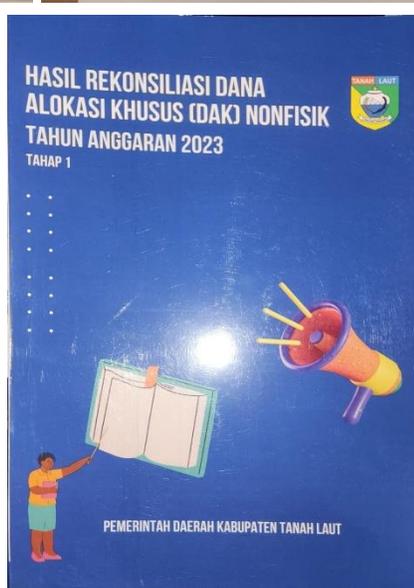
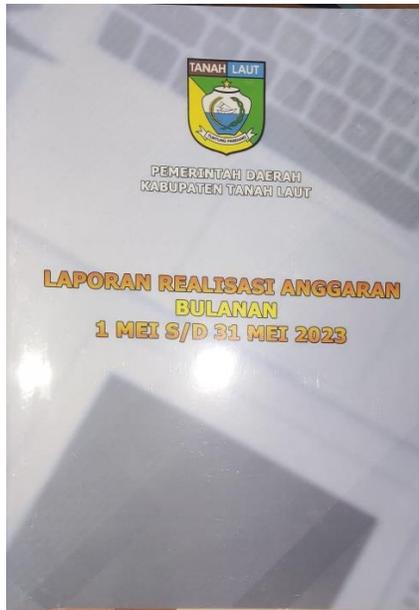


18). Melaksanakan Rapat Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 21 Desember 2023



19). Cetakan







5.ESELON III.B (Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset)

5.1. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 4

Sasaran Strategis nomor 4 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis nomor 4 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 (Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset)																						
Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan																						
No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019			Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)				
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Target	Realisasi		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan	6	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	%	100	100	100	87	100	114,95	89	30	33,70	90	140	155,55	92	109	118,48%	95	60	63,16%
		7	Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		8	Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	150	150	100	120	120	100	133,30	133,30%	100	500	500%
		9	Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100	107	107%
		10	Persentase Pemeliharaan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	108,80%	108,80%	100%	2700%	2700%	100%	850%	850%	100%	1170%	1170%	100%	245%	245%
			Rata-rata capaian kinerja						100,00										304,36			183,03

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan, Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan dan Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan pada tahun 2019 capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 104,99% dari tahun 2018 terdapat peningkatan kinerja sebesar 4,99%. Namun pada tahun 2020 capaian kinerja mengalami peningkatan yaitu 491,75% dari tahun sebelumnya. sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan kinerja sebesar 351,63% dikarenakan adanya musibah covid 19, sehingga untuk indikator sasaran strategis presentase BMD (Tanah) yang memiliki sertifikat sesuai ketentuan hanya tercapai 140% dari target sebesar 90%, atau capaian sebesar 155,55% hal ini dikarenakan adanya dukungan dari Pihak BPN, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kinerja sebesar 37,07% dengan realisasi sebesar 109 dari target sebesar 92 atau capaian kinerja sebesar 118,48%, kemudian indikator sasaran strategis no 7 yaitu Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan tidak tercapai atau 0% dikarenakan pelaksanaan pengajuan permohonan duplikasi BPKB BMD (Kendaraan Bermotor) dari target 2 buah, realisasi 0 buah (tidak dapat realisasi). Namun pada indikator sasaran strategis no 8 milik Kepala Bidang PPA mengalami kenaikan capaian pada tahun 2021 yaitu sebesar 120%, hal ini dikarenakan dari target BMD sebesar 10 telah tercapai sebesar 12 yang dipelihara, sehingga dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan kinerja. Sehingga secara keseluruhan untuk sasaran strategis no 4 Kepala Bidang PPA pada tahun 2021 capaian kinerjanya mengalami peningkatan kinerja sebesar 30,62%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian kinerja juga mengalami peningkatan sebesar 133,30% dari target 100 telah terealisasi sebesar 133,30, sehingga terdapat peningkatan sebesar 13,3% dari tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2023 capaian kinerja juga mengalami peningkatan sebesar 500% dari target 100 telah terealisasi sebesar 500, sehingga terdapat peningkatan sebesar 281,67% dari tahun 2022. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 4 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2023. Rata-rata

realisasi capaian kinerja sasaran no 4 adalah sebesar 91,85%, realisasi tersebut sudah mencapai 96,68% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 95%.

Berikut ini tabel yang menggambarkan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja tahun 2023 yang menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset :

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023											
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT											
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN % 2023	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi	Penanggungjawab
2.	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.	4. Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan	6. Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	%	95	60	63,16%	94,19%	100%	5,81%	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset
			7. Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	%	0	0	0%				
			8. Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	%	100	500	500,00%				
			9. Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	%	100	100	100%				
			10. Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	%	100	245	245%				

Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan SDM yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur dilingkungan Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset yaitu sebanyak 4 PNS yang terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Eselon IV dan 2 (dua) orang staf PNS serta dibantu staf PTT sebanyak 3 (tiga) orang yang siap membantu dan melayani tugas dan fungsi yang dibutuhkan Organisasi. Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah tercapai kinerjanya rata-rata diatas 100% dengan realisasi anggaran rata-rata diatas 94,19% dengan pagu anggaran sebesar Rp 13.096.940.300,- terealisasi sebesar Rp 12,336,529,345,- sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran di Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset rata-rata sebesar 5,81% dari 1 Program 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset pada tahun 2023.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 4 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2023.

5.1.1). ESELON IV (Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan)

Untuk mendukung Sasaran strategis No 3 yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan yaitu dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan Tahun 2023 sesuai dengan Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan pengajuan permohonan penyertifikatan BMD (tanah) sesuai ketentuan	1	Jumlah BMD (Tanah) yang telah memenuhi persyaratan penyertifikatan sesuai ketentuan	125 Persil BMD	75 Persil BMD	60%
2	Melaksanakan pengajuan permohonan duplikasi BPKB BMD (Kendaraan Bermotor) sesuai ketentuan	2	Jumlah BMD (Kendaraan Bermotor) yang telah memenuhi persyaratan Duplikasi BPKB sesuai ketentuan	-	-	-
3	Melaksanakan Rekonsiliasi/Verifikasi Pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	3	Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi/verifikasi pemeliharaan BMD sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%

4	Melaksanakan Penelusuran BMD yang belum jelas lokasinya sesuai ketentuan	4	Jumlah BMD yang ditelusuri sesuai ketentuan	5 Lokasi	9 Lokasi	180%
5	Melaksanakan Pemeliharaan BMD-PPKD sesuai ketentuan	5	Jumlah BMD-PPKD yang dipelihara sesuai ketentuan	3 Buah BMD	15 Buah BMD	500%
6	Melaksanakan Penguasaan Fisik BMD-PPKD sesuai ketentuan	6	Jumlah BMD-PPKD yang dikuasai fisiknya sesuai ketentuan	-	2	200%
7	Melaksanakan monitoring BMD yang dikuasai sesuai ketentuan	7	Jumlah BMD yang dikuasai dimonitoring sesuai ketentuan	30 Kali	25 Kali	83%

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran Rp	Realisasi	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						
A.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah						
1	Pengamanan Barang Milik Daerah			396.675.125	161.176.004	40,63 %	
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 laporan		2 laporan	100%	
2	Pengawasan dan			12.407.911.2	11.959.058.3	96,38	

	Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			35	29	%	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Laporan		3 Laporan	100%	

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan Tahun 2023

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023

1. Jumlah BMD (Tanah) yang telah memenuhi persyaratan penyertifikatan sesuai ketentuan dengan **Target Kinerja sebanyak 125 persil permohonan penyertifikatan**, realisasi sebanyak **75 persil permohonan penyertifikatan** atau **60%**, yaitu penyertifikatan pada tanah peruntukkan :

- 1) Puskesmas Durian Bungkok dengan luas tanah 4.418 m²
- 2) Bangunan Pusat Informasi TIC Gunung Birah dengan luas tanah 36 m²
- 3) Pustu Sungai Rasau dengan luas tanah 204 m²
- 4) Pendopo Makam Keramat Bati-bati dengan luas tanah 103 m²
- 5) Jalan Masuk Akademi Peternakan Swarangan dengan luas tanah 3.132 m²
- 6) Pos UPT Dishub Tabanio dengan luas tanah 1.600 m²
- 7) Rumah Dinas Guru SDN Kuala Tambangan 1 dengan luas tanah 105 m²
- 8) Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN Kuala Tambangan 1 dengan luas tanah 290 m²
- 9) Embung Sei Bakar Lokasi 2 dengan luas tanah 31.140 m²
- 10) Embung Sei Bakar Lokasi 3 dengan luas 5.942 m²
- 11) Embung Sei Bakar Lokasi 4 dengan luas tanah 2.613 m²
- 12) Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Pulau Nyiur Kunyit Desa Kunyit Kecamatan Bajuin) dengan luas tanah 5.253 m²
- 13) Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Kait Kait Baru Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati - Bati) dengan luas tanah 14.641 m²

- 14)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Lambenteng Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati) dengan luas tanah 4.763 m²
- 15)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Padang Raya Desa Pabahanan Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 8.929 m²
- 16)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. H. Ahmad Sofyan Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati) dengan luas tanah 950 m²
- 17)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Kamajaya Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati) dengan luas tanah 2.517 m²
- 18)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Kait Kait Lama Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati) dengan luas tanah 10.181 m²
- 19)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Pulauan Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati) dengan luas tanah 2.664 m²
- 20)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Tambak Batung Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati) dengan luas tanah 5.679 m²
- 21)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Sungai Kacil Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati) dengan luas tanah 11.807 m²
- 22)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Kura-Kura Ringgit Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati) dengan luas tanah 5.501 m²
- 23)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Ahmad Gurim Liang Anggang Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati) dengan luas 2.988 m²
- 24)Jalan Kabupaten Arteri (Jalan Banjarsari Bentok Kampung Desa Bentok Kampung Kecamatan Bati-Bati) dengan luas tanah 9.899 m²
- 25)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. SMP - SMA Batu Ampar Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar) dengan luas tanah 11.450 m²
- 26)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Smp Pantai Linuh Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar) dengan luas 5.228 m²
- 27)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Jilatan Alur 1 Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar) dengan luas tanah 18.328 m²
- 28)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Jilatan Alur 2 Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar) dengan luas tanah 13.111 m²

- 29)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Cileduk Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar) dengan luas tanah 13.894 m²
- 30)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Tajau Pecah - Sumber Mulya 1 Desa Tajau Pecah Kecamatan Tajau Pecah) dengan luas tanah 44.299 m²
- 31)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Tajau Pecah - Sumber Mulya 2 Desa Tajau Pecah Kecamatan Tajau Pecah) dengan luas tanah 10.615 m²
- 32)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Jalan Candi Arta Tajau Pecah Desa Jilatan Kecamatan Tajau Pecah) dengan luas tanah 7.712 m²
- 33)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Handil Maluka - Pantai Harapan Desa Handil Maluka Kecamatan Bumi makmur) dengan luas tanah 26.659 m²
- 34)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Handil Maluka - Labuan Amas Desa Handil Maluka Kecamatan Bumi Makmur) dengan luas tanah 10.443 m²
- 35)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Datu Timang Jorong Desa Benua Raya Kecamatan Jorong) dengan luas tanah 5.364 m²
- 36)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Alur - Simpang 4 Alur Desa Alur Kecamatan Jorong) dengan luas tanah 19.371 m²
- 37)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. PDAM Jorong Desa Jorong Kecamatan Jorong) dengan luas tanah 3.192 m²
- 38)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Mesjid Jorong Desa Jorong Kecamatan Jorong) dengan luas tanah 6.371 m²
- 39)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Polsek Jorong Desa Jorong Kecamatan Jorong) dengan luas tanah 3.271 m²
- 40)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Jorong - Pasar Jorong Desa Jorong Kecamatan Jorong) dengan luas tanah 3.820 m²
- 41)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Biawak Desa Batalang Kecamatan Jorong) dengan luas tanah 10.456 m²
- 42)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Transos 300 - Transos 400 Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong) dengan luas tanah 35.064 m²
- 43)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Sukorejo Sabuhur Desa Sabuhur Kecamatan Jorong) dengan luas tanah 19.625 m²

- 44)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Kintap - Kintap Lama 1 Desa Kintap Kecamatan Kintap) dengan luas tanah 20.628 m²
- 45)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Kintap - Kintap Lama 2 Desa Kintap Kecamatan Kintap) dengan luas tanah 5.797 m²
- 46)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Sumber Jaya 1 Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap) dengan luas tanah 22.348 m²
- 47)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Sumber Jaya 2 Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap) dengan luas tanah 35.754 m²
- 48)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Sumber Jaya 3 Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap) dengan luas tanah 26.476 m²
- 49)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Batu Anting Desa Kintap Kecamatan Kintap) dengan luas tanah 9.475 m²
- 50)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. UPT Pandansari Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap) dengan luas tanah 20.751 m²
- 51)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Trans Blok D Kebun Raya 2 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap) dengan luas tanah 21.071 m²
- 52)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Kintap Lama - Muara Kintap Seberang Desa Kintap Kecamatan Kintap) dengan luas tanah 8.879 m²
- 53)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Trans AU Maluka Baulin Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau) dengan luas tanah 3.956 m²
- 54)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Al Fatah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 18.050 m²
- 55)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Bakti 2 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 2.618 m²
- 56)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Tajau Mulya Batas Jilatan Desa Tajau Mulya Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 19.732 m²
- 57)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. SD - SMP Assalam Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 10.039 m²
- 58)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. K.H. Mansyur Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 13.866 m²

- 59)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Sumber Mulya - Kp. Baru 2 Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 7.162 m²
- 60)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Cengkeh Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 1.655 m²
- 61)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Madu Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 2.295 m²
- 62)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Teratai Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 1.683 m²
- 63)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Pesantren Sirajul Huda Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 12.677 m²
- 64)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Alhikmah Angsau Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 6.976 m²
- 65)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Mesjid Fehin Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 6.906 m²
- 66)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Simpang Rancah Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 6.789 m²
- 67)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Jalan Taqwa Pabahanan Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 7.970 m²
- 68)Jalan Kabupaten Arteri (Jalan 45 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 5.157 m²
- 69)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Pendidikan Tambang Ulang Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang) dengan luas tanah 4.755 m²
- 70)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Plasma Gunung Raja Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang) dengan luas tanah 8.741 m²
- 71)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Datu Insad Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 11.492 m²
- 72)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Simpang Kuburan Muslimin Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 1.879 m²
- 73)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Pancasila Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 10.117 m²

74)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. AMD Sungai Panggang Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang) dengan luas tanah 3.943 m²

75)Jalan Kabupaten Arteri (Jl. Dua Mas Putra Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari) dengan luas tanah 2.805 m².

Tidak tercapainya target atas pembuatan persyaratan penyertifikatan tanah milik Pemkab. Tanah Laut karena kurangnya kerjasama SKPD terkait penunjukkan lokasi tanah yang akan disertifikasi serta terbatasnya jumlah SDM di Subbid Pengamanan dan Pemeliharaan.

2. Jumlah BMD (Kendaraan Bermotor) yang telah memenuhi persyaratan Duplikasi BPKB sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 0 permohonan, pelaksanaan duplikasi BPKB milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak dapat dilaksanakan karena belum diketahuinya keberadaan atas kendaraan dinas yang akan diduplikasi BPKBnya sedangkan syarat untuk pembuatan BPKB duplikat harus adanya cek fisik atas kendaraan dimaksud. Fisik kendaraan dinas dimaksud masih dalam proses penelusuran keberadaannya.
3. Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi/verifikasi pemeliharaan BMD sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak **40 SKPD** realisasi sebanyak **40 SKPD atau 100%**.
4. Jumlah BMD yang ditelusuri sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak **5 lokasi** realisasi sebanyak **9 lokasi** atau **180%**, yaitu:
 - 1) Penelusuran lokasi keberadaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berada di Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar dengan luas tanah ±56.043 m²;
 - 2) Penelusuran lokasi keberadaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berada di Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar dengan luas tanah ±50.000 m²;
 - 3) Penelusuran lokasi keberadaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berada di Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar dengan luas tanah ± 49.993 m²;
 - 4) Penelusuran lokasi keberadaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berada di Desa Kuala Tambangan Kecamatan Takisung dengan luas tanah ±99.997 m²;

- 5) Penelusuran lokasi keberadaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berada di Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung dengan luas tanah ± 16.900 m²;
 - 6) Penelusuran lokasi keberadaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berada di Desa Tungkaran Kecamatan Pelaihari dengan luas tanah ± 50.000 m²;
 - 7) Penelusuran lokasi keberadaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berada di Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari dengan luas tanah ± 10.221 m²;
 - 8) Penelusuran lokasi keberadaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berada di Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari dengan luas tanah ± 21.172 m²;
 - 9) Penelusuran lokasi keberadaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berada di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari dengan luas tanah ± 9.879 m².
5. Jumlah BMD-PPKD yang dipelihara sesuai ketentuan dengan target 3 buah BMD, realisasi **15 buah BMD**, yaitu:
- 1) Pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas PPKD dengan Nomor Polisi DA 1819 LL;
 - 2) Pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas PPKD dengan Nomor Polisi DA 1968 LA;
 - 3) Pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas PPKD dengan Nomor Polisi DA 987 L;
 - 4) Pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas PPKD dengan Nomor Polisi DA 1027 LR (DA 260 L);
 - 5) Pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas PPKD dengan Nomor Polisi DA 1876 LQ (DA 42 L);
 - 6) Pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas PPKD dengan Nomor Polisi DA 277 L;
 - 7) Pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas PPKD dengan Nomor Polisi DA 1875 LQ (DA 234 L);
 - 8) Pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas PPKD dengan Nomor Polisi DA 1370 LJ;
 - 9) Pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas PPKD dengan Nomor Polisi DA 283 L;
 - 10) Pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas PPKD dengan Nomor Polisi DA 1374 LK;
 - 11) Pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas PPKD dengan Nomor Polisi DA 2422 LAM;
 - 12) Pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas PPKD dengan Nomor Polisi DA 1795 LM;
 - 13) Pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas PPKD dengan Nomor Polisi DA 1829 L0;
 - 14) Pemeliharaan BMD berupa rumah dinas PPKD dengan Nomor: 50.13.01/0006;
 - 15) Pemeliharaan BMD berupa rumah dinas PPKD dengan Nomor: 50.13.01/0016.

6. Jumlah BMD-PPKD yang dikuasai fisiknya sesuai ketentuan dengan target 0 Buah BMD, realisasi 2 lokasi BMD tanah, yaitu:
 - 1) Penguasaan fisik BMD tanah dengan melaksanakan pemasangan 1 papan nama kepemilikan dan 4 patok tanda batas tanah yang berada di Desa Ambawang;
 - 2) Penguasaan fisik BMD tanah dengan melaksanakan pemasangan 1 papan nama kepemilikan dan 4 patok tanda batas tanah yang berada di Desa Kandangan Lama.
7. Jumlah BMD yang dikuasai dimonitoring sesuai ketentuan dengan target **30 kali**, realisasi sebanyak **25 kali** atau **83%**.

Tidak tercapainya target atas jumlah BMD yang dikuasai dimonitoring sesuai ketentuan karena banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan serta terbatasnya jumlah SDM di Subbid Pengamanan dan Pemeliharaan.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2023

1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 396.675.125,- realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 161.176.004,- atau sebesar 40,63%, dengan tolak ukur kinerja sebagai berikut :

Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah dengan target 2 laporan realisasi sebanyak 2 laporan atau 100%, yaitu: Laporan hasil rekonsiliasi pengamanan dan pemeliharaan BMD Tahun Anggaran 2023.
2. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.407.911.235,- realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 11.959.058.329,- atau sebesar 96,38%, dengan tolak ukur kinerja sebagai berikut : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan target 3 Laporan realisasi 3 Laporan atau 100%.

Pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah juga telah merealisasikan:

 - 1) Pengadaan Mobil Dinas Perorangan sebanyak 3 unit;
 - 2) Pengadaan Mobil Jabatan sebanyak 14 unit peruntukkan: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satpol PP & Damkar, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan

- SDM, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Set. DPRD, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas PUPRP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesbang dan Politik, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Inspektorat.
- 3) Pengadaan Mobil Operasional Dinas sebanyak 2 unit peruntukkan: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Kantor Kecamatan Kurau.
 - 4) Pengadaan Bis Kecil (Microbus) sebanyak 3 unit.
 - 5) Pengadaan Bus Sedang sebanyak 1 unit.
 - 6) Pengadaan Mobil Operasional - Lapangan sebanyak 2 unit peruntukkan: Operasional Sekretariat Daerah (Bagian Protokol dan Komunikasi) dan Operasional Dinas Tanaman, Hortikultura dan Perkebunan.
 - 7) Pengadaan Sepeda Motor Operasional Kedinasan sebanyak 27 unit peruntukkan: 11 unit untuk operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 15 unit untuk Operasional Kepsek SMP lingkup Pemkab Tanah Laut dan 1 unit untuk operasional Dinas PUPRP.
 - 8) Pengadaan Sepeda Motor Operasional – Lapangan sebanyak 4 unit peruntukkan: 3 unit untuk operasional lapangan Dinas PUPRP dan 1 unit untuk operasional lapangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

1. SDM yang terbatas pada Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan.
2. Banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan, sehingga memerlukan waktu dan SDM yang lebih.
3. Kurangnya kerjasama dari SKPD terkait, khususnya kerjasama dalam penunjukkan batas tanah.
4. Adanya ancaman/tekanan dari pihak ketiga/masyarakat dalam pengamanan aset.
5. Kurangnya kerjasama masyarakat dalam melengkapi berkas administrasi pengamanan aset.

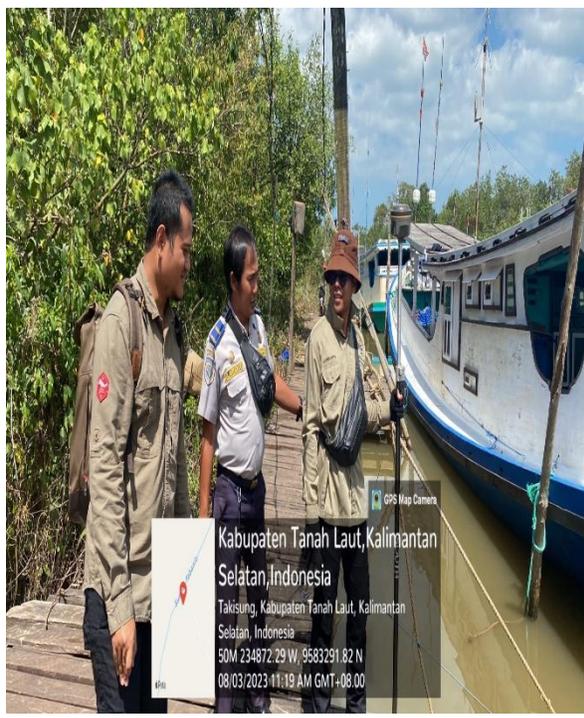
Rencana Aksi

- 1) Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.
- 2) Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal terkait percepatan penyelesaian pengamanan aset.
- 5) Melaksanakan pendekatan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam tertib administrasi kelengkapan berkas pengamanan BMD.
- 6) Melaksanakan sosialisasi kepada aparat desa/pihak ketiga/masyarakat terkait pengamanan BMD.

Foto - Foto Kegiatan

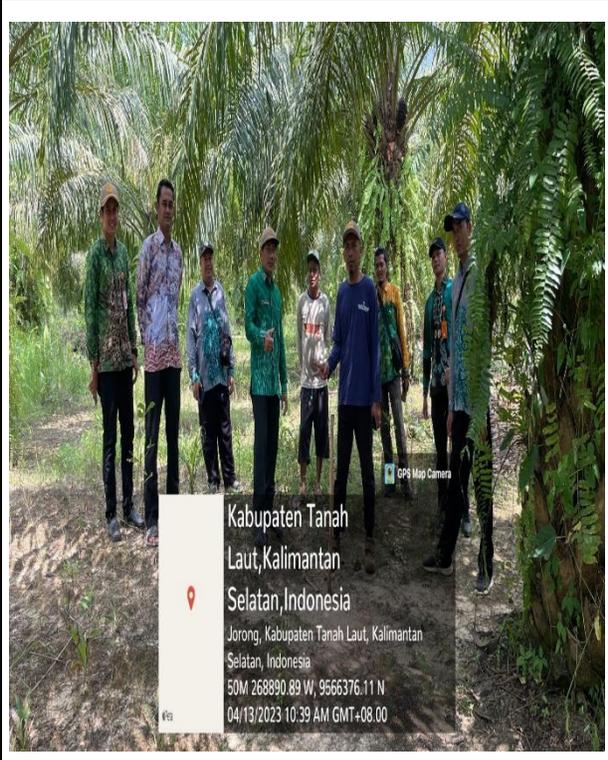
Koordinasi dengan SKPD/instansi terkait



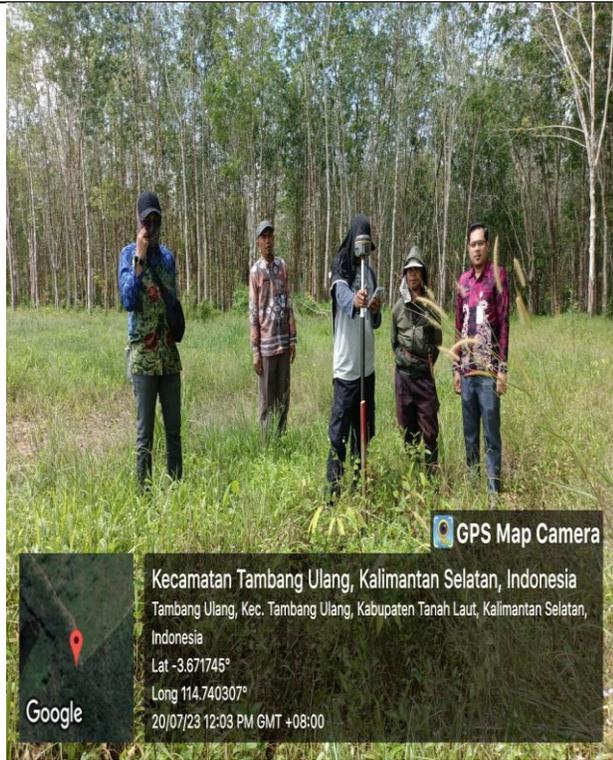


Melaksanakan koordinasi/pendekatan kepada pihak ketiga/masyarakat





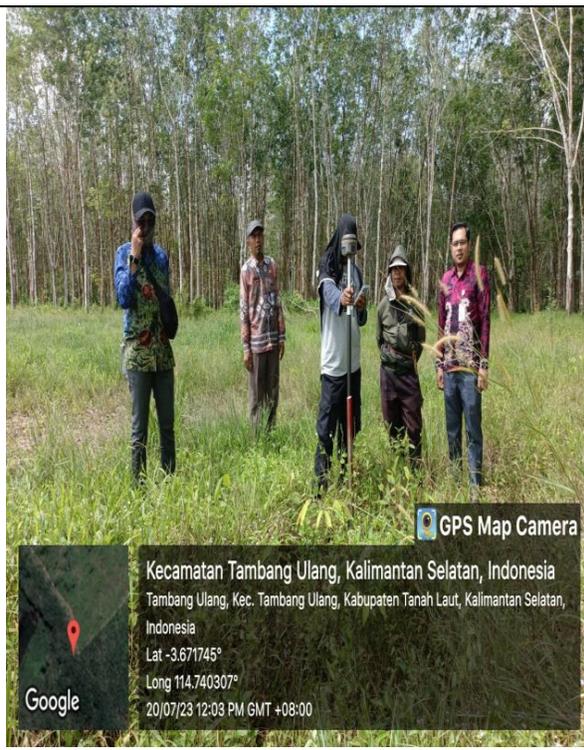
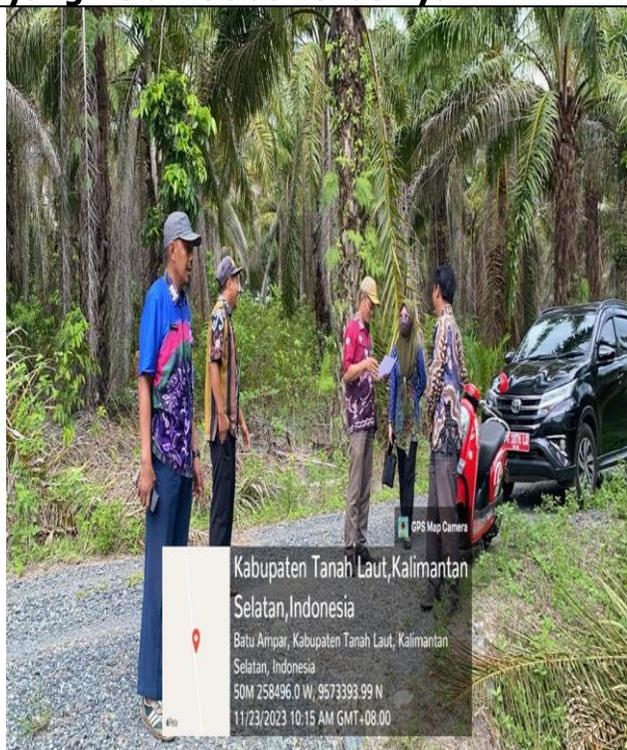
Melaksanakan monitoring pengamanan BMD



Melaksanakan Penelusuran Keberadaan Kendaraan Dinas



Melaksanakan Penelusuran Keberadaan Tanah Milik Pemkab. Tanah Laut yang Belum Jelas Lokasinya



Melaksanakan Pengamanan Fisik TMD (Pemasangan Papan Nama Kepemilikan dan Patok Tanda Batas Tanah)



Melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor





5.1.2). ESELON IV (Kasubbid Pemanfaatan & Pemindahtanganan)

Untuk mendukung Sasaran Strategis No 4 dengan indikator no 10 yaitu Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan dan indikator sasaran no 11 yaitu Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yaitu dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Tahun 2023 sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan Rekonsiliasi/Verifikasi Pemanfaatan & Penggunaan BMD sesuai ketentuan	1	Jumlah SKPD yang dilakukan Rekonsiliasi/Verifikasi Pemanfaatan & Penggunaan BMD sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
2	Monitoring BMD yang dimanfaatkan dan digunakan sesuai ketentuan	2	Jumlah BMD yang dimanfaatkan dan digunakan dimonitoring sesuai ketentuan	42 BMD	45 BMD	107,14 %
3	Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD sesuai ketentuan	3	Jumlah SKPD yang dilakukan Sosialisasi Pemanfaatan & Penggunaan BMD sesuai ketentuan	15 Kali	15 Kali	100%
4	Melaksanakan lelang umum BMD SKPD sesuai ketentuan	4	Jumlah BMD SKPD yang telah dilelang sesuai ketentuan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
5	Melaksanakan pemindahtanganan BMD SKPD sesuai ketentuan	5	Jumlah BMD SKPD yang telah dipindahtangankan sesuai ketentuan	1 dok BMD	1 dok BMD	100%
6	Melaksanakan pemusnahan BMD SKPD sesuai ketentuan	6	Jumlah BMD SKPD yang telah dimusnahkan sesuai ketentuan	10 keg pemusnahan	11 keg pemusnahan	110%
7	Melaksanakan penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	7	Jumlah BMD SKPD yang telah dihapuskan sesuai ketentuan	15 dok BMD	57 dok BMD	380%
8	Melaksanakan penyusunan laporan hasil pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	8	Jumlah dokumen laporan hasil pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	3 dokumen	3 dokumen	100%
9	Melaksanakan penilaian BMD SKPD sesuai ketentuan	9	Jumlah BMD SKPD yang sudah dinilai sesuai ketentuan	10 BMD	88 BMD	880%

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
A	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					
A.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah					
1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah			115.288.960	84.457.438	73,26 %
		Jumlah buku rekap pemindahtanganan (hibah keluar) BMD per 31 Desember 2023	1 dok		1 dok	100%
		Jumlah buku rekap pemindahtanganan (hibah masuk) BMD per 31 Desember 2023	1 dok		1 dok	100%
		Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan	1 dok		1 dok	100%
		Jumlah dokumen monitoring pemanfaatan dan monitoring penggunaan	1 dok		1 dok	100%

		BMD				
		Jumlah dokumen pelaksanaan pemanfaatan BMD	1 dok		1 dok	100%
		Jumlah dokumen pemusnahan BMD per Desember 2023	1 dok		1 dok	100%
		Jumlah dokumen penghapusan BMD per Desember 2023	1 dok		1 dok	100%

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah dokumen rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan BMD	1 dok		1 dok	100%
		Jumlah sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD	15 kali		15 kali	100%
2	Penilaian Barang Milik Daerah			177.064.980	136.592.336	77,14 %
		Jumlah dokumen	5 dok		5 dok	100%

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbid Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Tahun 2023

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023

8. Jumlah SKPD yang dilakukan Rekonsiliasi/Verifikasi Pemanfaatan & Penggunaan BMD sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD.

Sudah dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan BMD untuk periode Januari s/d Juni 2023 (Semester I) serta periode Juli s/d Desember 2023 (semester II) pada:

- a. tanggal 17 Juli 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 pada 13 SKPD, yaitu : Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan serta UPT. RSUD H. Boejasin Pelaihari, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- b. tanggal 21 Juli 2023 dan tanggal 21 Desember 2023 pada 14 SKPD, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Kec. Pelaihari, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. tanggal 24 Juli 2023 dan tanggal 22 Desember 2023 pada 13 SKPD, yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Kabupaten, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kec. Panyipatan, Kec. Jorong, Kec. Takisung, Kec. Kintap, Kec. Bumi Makmur, Kec. Kurau, Kec. Tambang Ulang, Kec. Bajuin, Kec. Bati-Bati, Kec. Batu Ampar.

9. Jumlah BMD yang dimanfaatkan dan digunakan dimonitoring sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 42 BMD, realisasi sebanyak 45 BMD atau 107,14% dengan perincian pelaksanaan sebagai berikut :

1. Monitoring pemanfaatan BMD berupa pinjam pakai gedung oleh BNN Kab. Tanah Laut.
2. Monitoring pemanfaatan BMD berupa tanah di Jalan hutan kota oleh Selamat Riyadi.
3. Monitoring pemanfaatan BMD berupa tanah di Jalan Bangun Banua oleh Zainal Abidin.

4. Monitoring pemanfaatan BMD berupa tanah eks SPDN di Desa Batakan oleh Koperasi Nelayan Sejahtera.
5. Monitoring pemanfaatan BMD berupa bangunan gudang yang di sewa oleh PT. GLM Banjarmasin berlokasi di Jln Telkom Ds. Ambungan.
6. Monitoring penggunaan BMD berupa tanah oleh PDAM Kab. Tala di belakang Gedung Juang Pelaihari.
7. Monitoring penggunaan gedung juang oleh PMII Kab. Tala yang berlokasi di Jl. A. Syairani Pelaihari.
8. Monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan BMD di Kec. Bati-Bati.
9. Monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan BMD di Kec. Panyipatan.
10. Monitoring pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan BMD di Kec. Kurau.
11. Monitoring dalam rangka TL permohonan hibah tanah dari Pemdes Kandangan Lama.
12. Peninjauan lapangan terhadap tanah yang berlokasi di Desa Pagatan Besar dengan Rutan Plh yang direncanakan untuk LP Terbuka.
13. Peninjauan lokasi tanah jalan menuju Pelabuhan Pelaihari di Kec. Jorong sbg TL permohonan PT. Wahyu Putra Ramadhan.
14. Monitoring penggunaan BMD berupa rumdin di Jalan Gembira oleh Orari Lokal Tanah Laut.
15. Monitoring penggunaan BMD oleh PMII Kab. Tala (Gedung Juang).
16. Monitoring penggunaan BMD oleh PDAM Tirta Dharma Kab. Tala (tanah yang tercatat di Sekretariat DPRD).
17. Melaksanakan cek lokasi lahan di Ds. Ambungan yg rencana dihibahkan kpd Galaxy International School.
18. Monitoring pemanfaatan BMD di Kec. Takisung.
19. Peninjauan lokasi utk pembangunan dermaga kegiatan angkutan.wisata religi di Pantai Batakan Baru Kec. Panyipatan.
20. Survei lapangan dlm rangka pemanfaatan tanah pemkab oleh Sdr. Zainal Abidin di Kel. Angsau.
21. Monitoring BMD pada ktr eks. Kel. Pelaihari yang direncanakan digunakan oleh PWRI Kab. Tanah Laut.
22. Monitoring BMD dalam rangka pelaksanaan mutasi BMD di eks. Kel. Angsau.
23. Monitoring BMD terkait rencana penggunaan lahan di gunung kayangan dgn pihak Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut.
24. Monitoring BMD berupa tanah berlokasi di Ds. Ambungan yg akan dimanfaatkan oleh eks. Karyawan PG Pelaihari.
25. Monitoring penggunaan BMD berupa kendaraan dinas roda 2 (dua) yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanah Laut.
26. Monitoring BMD berupa eks. Bangunan Kantor Kelurahan Karang Taruna yg direncanakan digunakan oleh FKPP Tala.
27. Monitoring BMD berupa sebagian gedung PKK yg rencananya digunakan oleh MUI dan BWI Kab. Tanah Laut.

28. Cek lokasi kelurahan Pabahanan dlm rangka penggunaan BMD utk TL permohonan dari PGRI dan TK. Murni.
 29. Monitoring BMD berupa eks gedung Kantor Kec. Panyipatan yang rencana akan dipinjampakaikan kepada Kodim 1009/Tla utk Koramil.
 30. Monitoring BMD berupa 1 unit rumdin yg dipinjampakaikan kepada Kapolres Tala yang rencananya akan dikembalikan kpd Pemerintah Kab. Tanah Laut.
 31. Monitoring pemanfaatan BMD di Kec. Bajuin berupa 1 (satu) buah rumah negara golongan II Type A Permanen yang ditempati oleh Petugas Jaga Malam.
 32. Monitoring pemanfaatan BMD di Kec. Kurau berupa sebagian tanah untuk penempatan booth ATM yang terletak di Jalan Swadaya No. 111 Desa Padang Luas dan disewa oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pleihari.
 33. Monitoring pemanfaatan tanah yang berlokasi di sekitar area pasar Kurau (di pinggiran jalan Swadaya RT. 03 Desa Kurau) oleh Murjani sebagai tempat untuk mendirikan warung/kios untuk tempat dagangan.
 34. Monitoring pemanfaatan BMD berupa gedung dan bangunan yang berlokasi di Jalan Pembangunan Kec. Pelaihari yang dipinjampakaikan kepada BNN Kab. Tanah Laut.
 35. Monitoring pemanfaatan dan penggunaan BMD di Kec. Jorong.
 36. Monitoring pemanfaatan dan penggunaan BMD di Kec. Kintap.
 37. Monitoring pemanfaatan dan penggunaan BMD di Kec. Batu Ampar.
 38. Monitoring penggunaan BMD berupa 1 (satu) unit rumah dinas oleh Persatuan Wartawan Indonesia yang berlokasi di Jalan Gembira Kec. Pelaihari.
 39. Monitoring BMD berupa bangunan Menara Pantau yang berlokasi di Gunung Kayangan yang rencananya akan dimanfaatkan oleh pihak lain.
 40. Monitoring BMD berupa bangunan food court yang berlokasi di obyek wisata Bajuin yang rencananya akan dimanfaatkan oleh pihak lain.
 41. Monitoring pemanfaatan BMD berupa bangunan yang berlokasi di Jalan Abadi Kec. Pelaihari yang disewa oleh PD. Baratala Tuntung Pandang.
 42. Monitoring pemanfaatan BMD berupa bangunan gudang yang berlokasi di Jalan Telkom Desa Ambungan yang disewa oleh PT. Gede Langgeng Makmur Banjarmasin.
 43. Monitoring pemanfaatan BMD berupa 1 (satu) buah rumah dinas yang berlokasi di Jalan Karya yang disewa oleh Khairandi dan Abdul Bakar.
 44. Monitoring pemanfaatan BMD berupa 1 (satu) buah rumah dinas yang berlokasi di Jalan Pancapan yang disewa oleh Rohib Hidayat.
 45. Monitoring pemanfaatan BMD berupa sebagian bangunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut yang disewa oleh Santer Evolution Management untuk Kafetaria.
10. Jumlah SKPD yang dilakukan Sosialisasi Pemanfaatan & Penggunaan BMD sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 15 kali telah dilaksanakan keseluruhan, sehingga capaian realisasi adalah 100%, dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanah Laut pada tanggal 16 Mei 2023.
 2. Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut pada tanggal 23 Mei 2023.
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanah Laut pada tanggal 25 Mei 2023.
 4. Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanah Laut pada tanggal 30 Mei 2023.
 5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut pada tanggal 6 Juni 2023.
 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tanah Laut pada tanggal 13 Juni 2023.
 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut pada tanggal 20 Juni 2023.
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut pada tanggal 21 Juni 2023.
 9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tanah Laut pada tanggal 27 Juni 2023.
 10. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut pada tanggal 13 Juli 2023.
 11. Sekretariat DPRD Kab. Tanah Laut pada tanggal 18 Juli 2023.
 12. Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut pada tanggal 20 Juli 2023.
 13. RSUD H. Boejasin Pelaihari pada tanggal 26 September 2023.
 14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut pada tanggal 22 November 2023.
 15. Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut pada tanggal 27 November 2023.
11. Jumlah BMD SKPD yang telah dilelang sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 1 kegiatan dan capaian realisasi adalah 100%. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :
- a. Telah dilaksanakan lelang BMD berupa 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Negara (Wakil Bupati Tanah Laut) yaitu 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero / Dakkar -H (4x4) 8 A/T - White Color Vin 2018 perolehan tahun 2018 DA. 2 L.
 - b. Lelang yang dilaksanakan berupa lelang khusus dengan nilai jual sebesar Rp. 164.391.200,-. Dan telah dilakukan pembayaran oleh Pejabat bersangkutan pada tanggal 13 Oktober 2023 serta BMD tersebut telah diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima Barang nomor 000.2.3.2/18/BAST/BPKAD/2023 tanggal 13 Oktober 2023.
12. Jumlah BMD SKPD yang telah dipindahtangankan sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 1 dokumen BMD dan terealisasi sebanyak 1 dokumen BMD (100%) dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :
1. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa 2 unit kendaraan dinas roda 2 kepada Pemerintah Desa Handil Suruk Kec. Bumi Makmur.
 2. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa 1 unit kendaraan roda 4 kepada Pengurus Masjid Al Ibnor Tanah Laut.

3. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa 1 unit kendaraan roda 4 kepada Perkumpulan Relawan Tala Jaya.
4. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa 36 buah kasur kepada Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut.
5. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa Alat pemadam kebakaran kepada Barisan Pemadam Kebakaran Arissa Kelurahan Angsau.
6. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa sebagian tanah kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Tanah Laut.
7. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa 1 unit kendaraan dinas roda 2 kepada Pemerintah Desa Sabuhur Kec. Jorong.
8. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa 1 unit kendaraan roda 4 kepada SMK Negeri 2 Pelaihari.
9. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa 1 buah bangunan Posyandu kepada Pemerintah Desa Ketapang Kec. Bajuin.
10. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa 1 unit kendaraan dinas roda 2 kepada Pemerintah Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur.
11. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa 1 unit kendaraan roda 4 kepada Gereja Kalimantan Evangelis Maranatha Pelaihari.
12. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa 1 unit kendaraan roda 4 kepada Yayasan Bunyan Syadid (Pondok Pesantren Sirajul Huda).
13. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa Fasilitas Umum Lainnya (Paving Block) Pemerintah Desa Jilatan Alur Kec. Batu Ampar.
14. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa sebagian tanah kepada Pemerintah Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang.
15. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa 1 unit kendaraan roda 4 kepada SMK Negeri 1 Kintap.
16. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa 1 unit kendaraan dinas roda 2 kepada Pemerintah Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan.
17. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa 1 unit kendaraan dinas roda 2 kepada Pemerintah Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari.
18. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa tanah dan bangunan kepada Pemerintah Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap.
19. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa sebagian tanah kepada Kementerian Agama Kab. Tanah Laut (untuk gedung Balai Nikah di Kec. Kintap).
20. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa peralatan musik kepada Harmoni Tala Band.
21. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa bongkaran bangunan gedung Balairung Pelaihari dan Pustu Lok Serapang kepada Pengurus TK/TP Al-Qur'an Thariqatul Jannah Unit 259 Lok Serapang Kel. Pelaihari.
22. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa 1 unit kendaraan dinas roda 2 kepada Pemerintah Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati.
23. Pemindahtanganan BMD (hibah) berupa 13 buah sumur artesis kepada Pemerintah Desa: Tajau Mulya RT. 01/001 Kec. Batu Ampar, Pantai Harapan Kec. Bumi Makmur, Sungai Jelai RT. 01, RT. 04, RT. 09 Kec. Tambang Ulang, Panyipatan RT. 02, RT. 07,

RT. 08 Kec. Panyipatan, Tanjung Dewa RT. 015/005 Kec.
 Panyipatan, Tambak Sarinah RT. 06 Kec. Kurau, Benua Raya Kec. Bati-
 Bati sebanyak 3 buah dan kepada Pemerintah Prov. Kalimantan
 Selatan SMA Negeri Bumi Makmur.

13. Jumlah BMD SKPD yang telah dimusnahkan sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 10 kegiatan pemusnahan dan sudah terealisasi sebanyak 11 kegiatan (110%) dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pemusnahan BMD	SKPD
1.	Peralatan dan Mesin	Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, RSUD H. Boejasin, Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kec. Batu Ampar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Kec. Jorong, Kec. Takisung, Kec. Kintap, Kec. Bajuin, Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
2.	Gedung dan bangunan	Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Pelaihari, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Pendapatan Daerah, Kelurahan Sarang Halang,
3.	Karya seni asli lain-lain	Dinas Kesehatan

14. Jumlah BMD SKPD yang telah dihapuskan sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 15 dokumen BMD dan sudah teralisasi sebanyak 57 dokumen BMD (380%) dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Uraian Penghapusan BMD	SKPD
1.	Peralatan dan Mesin	Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, RSUD H. Boejasin, Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kec. Batu Ampar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Kec. Jorong, Kec. Takisung, Kec. Kintap, Kec. Bajuin, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kelurahan Angsau,
2.	Gedung dan bangunan	Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Pelaihari, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Pendapatan Daerah, Kelurahan Sarang Halang,
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan (sumur artesis)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
3.	Karya seni asli lain-lain	Dinas Kesehatan

15. Jumlah dokumen laporan hasil pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 3 dokumen BMD, realisasi sebesar 100%. Dokumen dimaksud adalah :

1. Dokumen hasil pemindahtanganan berupa hibah masuk, hibah keluar dan penjualan/lelang BMD.
2. Dokumen pemusnahan BMD barang milik daerah tahun anggaran 2023.
3. Dokumen penghapusan barang milik daerah tahun anggaran 2023.

16. Jumlah BMD SKPD yang sudah dinilai sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 10 BMD dan sudah teralisasi sebanyak 88 BMD (880%) dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :

1. Penilaian sewa tanah yang berlokasi di Desa Kandangan Lama Kec. Panyipatan sebanyak 2 bidang.
2. Penilaian sewa tanah yang berlokasi di Desa Batakan Kec. Panyipatan sebanyak 1 bidang.
3. Penilaian sewa sebagian tanah yang berlokasi di Desa Ambungan Kec. Pelaihari sebanyak 1 bidang.
4. Penilaian kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 3 unit.
5. Penilaian kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 56 unit.
6. Penilaian kendaraan bermotor roda 3 sebanyak 2 unit
7. Penilaian grader + attachment sebanyak 1 unit.
8. Penilaian gedung dan bangunan sebanyak 22 unit.

17. Rekapitulasi hibah masuk tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Uraian	PIHAK I	PIHAK II/SKPD Tujuan	Nilai (Rp)
1.	Hibah Bangunan Posyandu sebanyak 1 buah dengan luasan 61,79 m ²	Hj. Ida Laila, S.Pd	Drs. H. Dahniel Kifli, M.AP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	116.199.750
2.	Hibah Tanah seluas 485 m ²	Gusti Rizal Wardhana Putra, ST	Drs. H. Dahniel Kifli, M.AP Kelurahan Karang Taruna.	240.000.000
3.	Hibah Bangunan sebanyak 1 buah dengan luasan 97 m ²	Mahrudin	Drs. H. Dahniel Kifli, M.AP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	52.700.000
4.	Hibah Tanah seluas 96 m ²	Muhammad dan Kurniawati	Drs. H. Dahniel Kifli, M.AP Kelurahan Pelaihari	72.000.000
5.	Hibah Tanah seluas 94 m ²	H. Hamdie Effendi	Drs. H. Dahniel Kifli, M.AP Kelurahan Pelaihari	141.000.000
6.	Hibah Tanah seluas 58 m ²	H. Hamdie Effendi	Drs. H. Dahniel Kifli, M.AP Kelurahan Pelaihari	87.000.000
7.	Hibah Tanah seluas 101,25 m ²	Sohyar	Drs. H. Dahniel Kifli, M.AP Kelurahan Pelaihari	75.937.500
8.	Hibah Bangunan Parkir Pertama	Sulistiani	Drs. H. Dahniel Kifli, M.AP	7.500.000

LKj BPKAD TAHUN 2023

	dengan luasan 66 m ²		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
9.	Hibah Bangunan Parkir dengan luasan 42 m ²	Sulistiani	Drs. H. Dahniel Kifli, M.AP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.350.000
10.	Hibah Tanah seluas 262 m ²	Tan Selamat	Drs. H. Dahniel Kifli, M.AP Dinas Kesehatan	15.000.000
11.	Hibah Tanah seluas 60 m ²	Sugianto	Drs. H. Dahniel Kifli, M.AP Kelurahan Pabahanan	45.000.000

No.	Uraian	PIHAK I	PIHAK II/SKPD Tujuan	Nilai (Rp)
12.	Hibah Tanah seluas 258 m ²	Suardana Pelangi	Drs. H. Dahniel Kifli, M.AP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.000.000
13.	Hibah Tanah seluas 600 m ²	Sutiman	Drs. H. Dahniel Kifli, M.AP Dinas Kepemudaan dan Olahraga	60.000.000
14.	Hibah 1 unit Air Conditioner	Prigerhani	Drs. H. Dahniel Kifli, M.AP	10.200.000
	Hibah 1 unit Air Conditioner		Kecamatan Kintap	9.586.850
15.	Bangunan WC	Edy Purwanto	Drs. H. Dahniel Kifli, M.AP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.300.000
16.	Bangunan WC	Muhammad Anto	Drs. H. Dahniel Kifli, M.AP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000
17.	Hibah 1 unit bangunan halte sampah	Gunawan Chandra	Drs. H. Dahniel Kifli, M.AP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.	70.737.500
18.	Hibah Peralatan TIK SMP (BMN)	Drs. Mulyatsah, M.M (Direktur SMP, Ditjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud, Ristek RI)	Drs. Zainal Abidin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.105.000
19.	Hibah: 1 unit motor perpustakaan keliling (BMN)	Rohani Br Tohang, S.E., M.Si (Perpustakaan Nasional RI)	Drs. Antoeng Mas Rhoedy Erhansyah, M.Si Dinas Perpustakaan dan	20.227.158

			Kearsipan	
	Koleksi buku			14.724.034
	Box motor			9.990.000
20.	Hibah Sumur Bor Dalam (BMN)	Dr. Siti Sumilah Rita Susilawati, S.T., M.Sc (Sekretaris Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)	Safarin, S.IP., M.Si Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.537.604.310
21	Hibah Bantek Perlengkapan Jalan Pemenang WTN (BMN)	Zulmardi, ATD, MM (Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Kementerian Perhubungan RI)	Gentry Yuliantono Dinas Perhubungan	2.379.067.500

Prioritas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2023

3. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 115.288.960,- realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 84.457.438,- atau sebesar 73,26%, dengan tolak ukur kinerja sebagai berikut :

- 1) Jumlah buku rekap pemindahtanganan (hibah keluar) BMD per 31 Desember 2023, dengan target 1 dokumen, realisasi sebesar 1 dokumen atau 100%.
- 2) Jumlah buku rekap pemindahtanganan (hibah masuk) BMD per 31 Desember 2023 dengan target 1 dokumen, realisasi sebesar 1 dokumen atau 100%.
- 3) Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan dengan target 1 dokumen, realisasi sebesar 1 dokumen atau 100%.
- 4) Jumlah dokumen monitoring pemanfaatan dan monitoring penggunaan BMD dengan target 1 dokumen, realisasi sebesar 1 dokumen atau 100%.
- 5) Jumlah dokumen pelaksanaan pemanfaatan BMD dengan target 1 dokumen, realisasi sebesar 1 dokumen atau 100%.
- 6) Jumlah dokumen pemusnahan BMD per Desember 2023 dengan target 1 dokumen, realisasi sebesar 1 dokumen atau 100%.
- 7) Jumlah dokumen penghapusan BMD per Desember 2022 dengan target 1 dokumen, realisasi sebesar 1 dokumen atau 100%.
- 8) Jumlah dokumen rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan BMD dengan target 1 dokumen, realisasi sebesar 1 dokumen atau 100%.
- 9) Jumlah sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD dengan target 15 kali dan telah dilaksanakan sebanyak 15 kali (100%).

4. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 177.064.980,- realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 136.592.336,- atau sebesar 77,14%, dengan tolak ukur kinerja adalah jumlah dokumen sebanyak 5 dokumen dan realisasi sebesar 100%.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

LKj BPKAD TAHUN 2023

6. Pemanfaatan BMD memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan PAD serta meningkatkan fasilitas publik. Namun faktanya banyak asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang belum mampu menghasilkan keuntungan bagi daerah, dengan pengertian bahwa pemanfaatan asset belum optimal serta rendahnya fungsi manfaat asset.
7. Masih terdapat pihak lain yang memanfaatkan barang milik daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kab. Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Dalam hal penilaian barang milik daerah baik untuk pemindahtanganan maupun pemanfaatan, Pemerintah Kab. Tanah Laut masih tergantung kepada Tim Penilai dari KPKNL Banjarmasin yang bisa dilaksanakan tergantung penjadwalan dari mereka. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kab. Tanah Laut belum memiliki Tim/Personil Penilai yang berkompeten.

Rencana Aksi

- 7) Melakukan sosialisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD secara lebih intensif dalam rangka meningkatkan pemahaman SKPD terhadap aturan terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan.
- 8) Melakukan pembenahan administrasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD agar sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kab. Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 9) Pengoptimalan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD dengan melibatkan Instansi terkait yang sudah tergabung dalam Tim Monitoring Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Tanah Laut.
- 10) Mendorong pemanfaatan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi daerah atau yang mendatangkan PAD.
- 11) Mengintensifkan komunikasi dengan KPNKL untuk Penilai BMD.
- 12) Berkoordinasi dengan BKPSDM Kab. Tanah Laut untuk membuka peluang berupa Diklat ataupun Formasi untuk penyediaan SDM Penilai BMD.

Foto - Foto Kegiatan

1. **Kegiatan monitoring Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2023**



2. Kegiatan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2023



3

Pe



LKj BPKAD TAHUN 2023



9. Kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun 2023





5. Kegiatan Simulasi



6. Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan, Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD di 15 SKPD

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanah Laut



2. Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut



3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanah Laut



4. Badan Dendatan Daerah Kab. Tanah Laut





S



8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut



9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut



n



c





12. Sekretariat DPRD Kab. Tanah Laut



14. RSUD H. Roeliasin Palahari





6.ESELON III.B (Kepala Bidang Penatausahaan Aset)

6.1. Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 4

Sasaran Strategis nomor 4 adalah menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Penatausahaan Aset atau Pejabat Eselon III.B sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani

Sasaran strategis nomor 4 adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penatausahaan Aset dengan tabel pencapaian sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 (Kepala Bidang Penatausahaan Aset)																				
Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan																				
No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi										
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan	11	Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		12	Persentase inventarisasi BMD yang akurat sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja						100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase BMD yang dicatat dengan akurat sesuai ketentuan capaian kinerjanya trendnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, dibuktikan dengan telah disajikannya Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari LKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diaudit oleh BPK RI untuk mendapatkan opini terhadap pengelolaan keuangan dan aset setiap tahunnya.

Berikut ini tabel yang menggambarkan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja tahun 2023 yang menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Penatausahaan Aset sebagai berikut :

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023											
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT											
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN % 2023	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi	Penanggungjawab
		4. Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan	11 Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	91,28%	100%	8,72%	Kepala Bidang Penatausahaan Aset
			12 Persentase inventarisasi BMD yang akurat sesuai ketentuan	%	100	100	100%				

Kepala Bidang Penatausahaan Aset dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan SDM yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur dilingkungan Bidang Penatausahaan Aset yaitu sebanyak 9 PNS yang terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Eselon IV dan 7 (tujuh) orang staf PNS serta dibantu staf PTT sebanyak 2 (dua) orang yang siap membantu dan melayani tugas dan fungsi yang dibutuhkan Organisasi. Kepala Bidang Penatausahaan Aset telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah tercapai kinerjanya rata-rata tercapai 100% dengan realisasi anggaran rata-rata diatas 91,28% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran di Bidang Penatausahaan Aset rata-rata sebesar diatas 8,72% dari 1 Program 1 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Penatausahaan Aset pada tahun 2023.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 4 Kepala Bidang Penatausahaan Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Perencanaan Kebutuhan dan Kasubbid Inventarisasi dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2023 dengan penjelasan dibawah ini.

6.1.1). ESELON IV (Kasubbid Perencanaan Kebutuhan)

Untuk mendukung Sasaran strategis No 4 Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan dengan indikator sasaran no 12 yaitu Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Penatausahaan Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Perencanaan Kebutuhan yaitu dengan melaksanakan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Perencanaan Kebutuhan Tahun 2023 sesuai dengan Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	1	Jumlah Dokumen RKBMD yang disusun SKPD sesuai ketentuan	40 Dokumen	40 Dokumen	100% RKBMD TA.2024
2	Melaksanakan penyusunan Standar Satuan Harga sesuai ketentuan	2	Jumlah Dokumen Buku Standar Satuan Harga sesuai ketentuan	1 dokumen	2 dokumen	200% Perbup SSH 2024
3	Melaksanakan Pembuatan Standar Kebutuhan Barang sesuai ketentuan	3	Jumlah Dokumen Buku Standar Kebutuhan Barang sesuai ketentuan	40 dokumen	40 dokumen	100%
4	Melaksanakan Rekonsiliasi/Verifikasi Barang Pakai Habis dan RKBMD sesuai ketentuan	4	Jumlah SKPD yang direkonsiliasi/verifikasi Barang Pakai Habis sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100%
5	Melaksanakan Sosialisasi Standar Satuan Harga dan Perbup sesuai ketentuan	6	Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi Standar Satuan Harga dan Perbup sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100% Sosialisasi Draf SSH
6	Melaksanakan Monitoring Barang Pakai Habis sesuai ketentuan	7	Jumlah Barang Pakai Habis SKPD yang telah termonitoring sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100 %

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran RP	Realisasi	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Pengelolaan						

LKj BPKAD TAHUN 2023

	Barang Milik Daerah						
A.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah						
1	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			28.341.775	19.699.000	69,50 %	
		Jumlah dokumen	1 Dok		1 Dok	100%	
2	Penyusunan Standar Harga			69.282.234	47.607.000	68,71%	
		Jumlah dokumen	2 Dok		2 Dok	100%	
3	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			4.874.185.254	4.453.570.135	91,37%	
		Jumlah dokumen	41 Dok		41 Dok	100%	

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbid Perencanaan Kebutuhan Tahun 2023

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023

- 1). Jumlah SKPD yang melakukan penyusunan RKBMD (untuk RKBMD Tahun Anggaran 2024) dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD sampai Triwulan IV Tahun 2023 ini sudah masuk semua, sehingga realisasi kinerja 100%.
- 2). Jumlah dokumen Buku Standar Satuan Harga dengan Target Kinerja Sebanyak 2 dokumen (Buku Standar Satuan Harga Tahun 2024), sudah terealisasi 2 dokumen, sehingga realisasi capaian sebesar 100%.
- 3). Jumlah dokumen Buku Standar Kebutuhan Barang dengan Target Kinerja sebanyak 40 dokumen (Buku Standar Kebutuhan Barang Tahun 2024), sampai dengan TW IV ini sudah selesai, sehingga capaian kinerja terealisasi sebesar 100%.
- 4). Jumlah SKPD yang di rekonsiliasi/ verifikasi Barang Pakai Habis dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD, terealisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 ini sebanyak 40 SKPD, sehingga capaian kinerja terealisasi sebesar 100%.
- 5). Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi Standar Satuan Harga/ Peraturan Bupati Tanah Laut dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD, terealisasi 40 SKPD, sehingga capaian kinerja terealisasi sebesar 100%
- 6). Jumlah Barang Pakai Habis SKPD yang telah termonitoring Tahun 2023 dengan Target Kinerja sebanyak 40 SKPD sampai Triwulan IV Tahun 2023 ini sebanyak 40 SKPD , sehingga realisasi kinerja 100%.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2023

- 1). Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 28.341.775,- sudah terealisasi Rp. 19.699.000,- atau 69,50%. Pada Tahun 2023 akan di cetak 1 (satu) Peraturan Bupati Tanah Laut yaitu Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2022 tentang tata cara pembukuan, inventarisasi dan

Pelaporan BMD dan sudah dicetak, tetapi makan minum rapat pembahasan raperbup yang direncanakan 5 kali terealisasi 1 kali rapat.

- 2). Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 69.282.234,- dengan realisasi sebesar Rp 47.607.000,- atau capaian sebesar 68,71%, Sub Kegiatan ini sudah selesai penyusunan Perbup tentang SSH dengan fisik 100%, tetapi makan minum rapat SSH direncanakan 5 kali rapat, terealisasi 2 kali rapat dan Sosialisasi draf SSH direncanakan 3 kali terealisasi 1 kali saja
- 3). Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 4.874.185.254,- dengan realisasi sd TW IV sebesar Rp 4.453.570.135,- atau capaian sebesar 91,37%.
Dokumen yang menjadi target sebanyak 41 dokumen dan sudah terealisasi 41 dokumen (40 SKPD dan UPT Rsud H.Boejasin) atau 100%.
Pada sub kegiatan ini juga ada kinerja yang menjadi tanggungjawab Subbid Perencanaan Kebutuhan yaitu Penyediaan kendaraan dinas operasional dan jabatan dengan cara Sewa. Pada Tahun 2023 ini Kendaraan dinas yang disewakan adalah sebanyak 41 (empat puluh satu) unit dengan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak terealisasi.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

1. Masih terdapat beberapa pengurus barang SKPD yang masih terlambat menyerahkan laporan- laporan.
2. Dalam penyusunan Standar Satuan Harga, kendala yang dihadapi adalah kesulitan sebagian anggota tim dalam mensurvei harga barang/ jasa dilapangan.
3. Usulan Standar Satuan Harga tambahan di tahun berkenaan, membuat SKPD beramai-ramai mendatangi BPKAD.
4. Monitoring ke 40 SKPD tidak ada kendala, tetapi permasalahan persediaan juga ada di UPT, sehingga untuk monitoring sampai level UPT masih kekurangan SDM dengan hanya 4 orang dengan jumlah UPT sekitar 300, sehingga banyak Perjalanan dinas ke kecamatan tidak bisa realisasi

Rencana Aksi

1. Meningkatkan percepatan pengumpulan pelaporan dengan lebih sering menghubungi / kontak dengan SKPD untuk kepentingan kelancaran pelaporan.
2. Mengoptimalkan Aplikasi SIBaPer untuk mempercepat laporan dan stock opname persediaan
3. Usulan Standar Satuan Harga tambahan di tahun berkenaan diusulkan melalui aplikasi SIPD, sehingga mengurangi tatap muka.

Foto - Foto Kegiatan Subbid Perencanaan Kebutuhan Triwulan IV Tahun 2023

1). Foto Sosialisasi PerBup tentang Standar Satuan Harga Tahun 2024



2). Foto Kendaraan Sewa



3). Buku Perbup SSH 2024



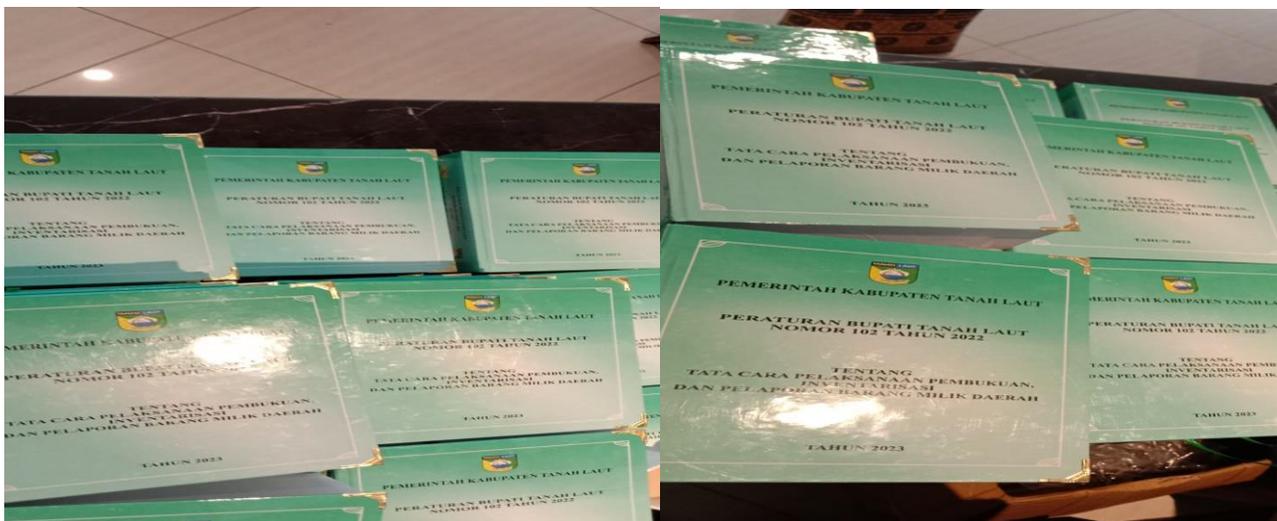
4). Buku Standar Kebutuhan BMD 2023



5). Buku RKBMD 2023



6). Buku Perbup 102 tahun 2022



7). Sosialisasi Aplikasi SIBaPer



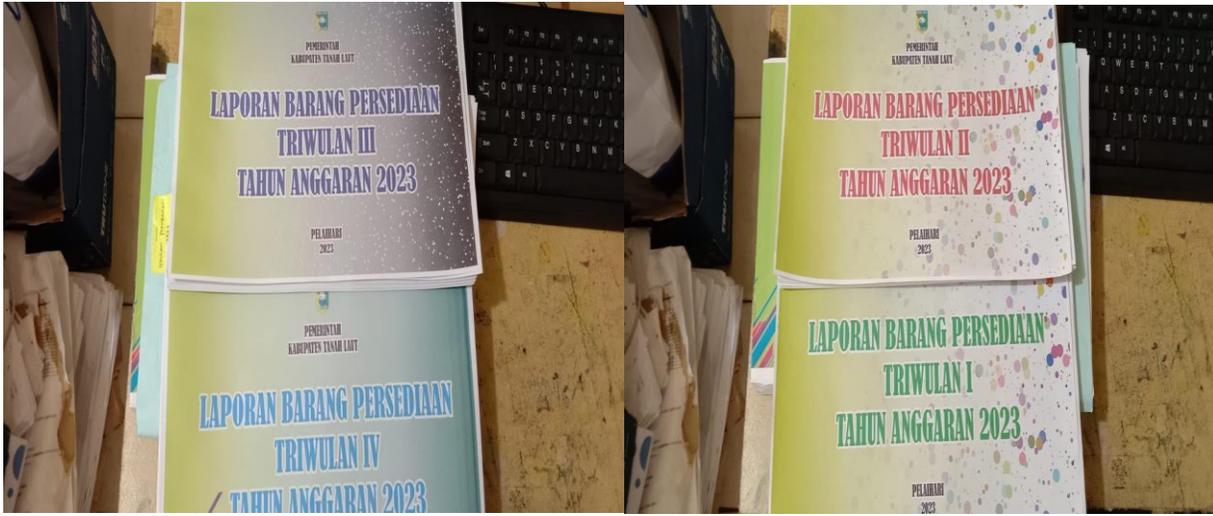
8). Rekonsiliasi barang pakai habis



9). Berita Acara rekonsiliasi 2023 dan Stock Opname 2022



10). Laporan barang persediaan TW I-IV 2023



6.1.2). ESELON IV (Kasubbid Inventarisasi)

Untuk mendukung Sasaran strategis No 4 Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan dengan indikator sasaran no 12 yaitu Persentase BMD yang dicatat dengan akurat yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Penatausahaan Aset diatas dilaksanakan oleh Kasubbid Inventarisasi yaitu dengan melaksanakan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbid Inventarisasi Tahun 2023 sesuai dengan Program dan Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan Updating Data BMD pada KIB SKPD sesuai ketentuan	1	Jumlah Dokumen KIB SKPD yang terupdate sesuai ketentuan	16 Dokumen	16 Dokumen	100
	Melaksanakan Rekonsiliasi/verifikasi Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan	2	Jumlah Belanja Modal SKPD yang telah direkonsiliasi/verifikasi dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan	8 Dokumen	8 Dokumen	100

LKj BPKAD TAHUN 2023

3	Melaksanakan Sensus / Inventarisasi BMD dan tindaklanjut Hasil Sensus BMD sesuai ketentuan	3	Jumlah BMD SKPD yang telah disensus / diinventarisasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1 Dokumen -	1 Dokumen -	100
4	Melaksanakan Monitoring Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan	4	Jumlah Belanja Modal SKPD yang telah termonitoring sesuai ketentuan	40 SKPD (12 Keg)	40 SKPD (12 keg)	100
5	Melaksanakan Sosialisasi Penatausahaan BMD SKPD sesuai ketentuan	5	Jumlah SKPD yang telah tersosialisasi dan menerapkan Penatausahaan BMD sesuai ketentuan	40 SKPD	40 SKPD	100
6	Melaksanakan Pembinaan SKPD dalam rangka pengelolaan BMD sesuai ketentuan	6	Jumlah SKPD yang mengikuti Pembinaan dan menerapkan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	40 SKPD (12 Keg)	40 SKPD (12 keg)	100

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						
A.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah						
1	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	1 Dok	86.237.535	74.464.500	86,35	
2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	8 Dok	46.703.960	45.052.000	96,46	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	16 Dok	281.168.559	267.860.596	95,27	

LKj BPKAD TAHUN 2023

4	Pembinaan Pengelolaan BMD	Jumlah dokumen	1 Dok	96.289.245	87.297.750	90,66	

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbid Inventarisasi Tahun 2023

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023

- 1). Jumlah dokumen KIB SKPD yang terupdate sesuai ketentuan sebanyak 16 dokumen yaitu :
 1. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Tanah (KIB A) Unaudit 40 SKPD per 31 Desember 2022 .
 2. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Tanah (KIB A) Audited 40 SKPD per 31 Desember 2022 .
 3. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B) Unaudit 40 SKPD per 31 Desember 2022 .
 4. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B) Audited 40 SKPD per 31 Desember 2022 .
 5. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan (KIB C) Unaudit 40 SKPD per 31 Desember 2022 .
 6. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan (KIB C) Audited 40 SKPD per 31 Desember 2022 .
 7. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) Unaudit 40 SKPD per 31 Desember 2022 .
 8. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) Audited 40 SKPD per 31 Desember 2022 .
 9. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya (KIB E) Unaudit 40 SKPD per 31 Desember 2022 .
 10. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya (KIB E) Audited 40 SKPD per 31 Desember 2022 .
 11. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Kontruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) Unaudit 40 SKPD per 31 Desember 2022 .
 12. Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Kontruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) Audited 40 SKPD per 31 Desember 2022 .
 13. Buku Rekap Mutasi Barang Milik Daerah Unaudit Tahun Anggaran 2022
 14. Buku Rekap Mutasi Barang Milik Daerah Audited Tahun Anggaran 2022
 15. Buku Induk Inventaris Kabupaten per 31 Desember 2022

16. Buku Induk Inventaris Kabupaten Ekstrakomtabel per 31 Desember 2022

Dari 16 dokumen updating data KIB (Kartu Inventaris Barang) SKPD tersebut diatas sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi cetak dokumennya, sebanyak 16 dokumen. Secara fisik dan target pada sub kegiatan tersebut telah terealisasi 100 %.

2).Jumlah Belanja Modal SKPD yang telah direkonsiliasi/verifikasi dan disampaikan Lapornya sesuai dengan Target Kinerja sebanyak 8 dokumen yaitu :

1. Buku Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 Semester II
2. Buku Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 Semester I
3. Buku Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022 Semester II
4. Buku Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 Semester I
5. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa TA.2022 Triwulan IV
6. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa TA.2023 Triwulan I
7. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa TA.2023 Triwulan II
8. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa TA.2023 Triwulan III

Dari 8 Dokumen tersebut diatas sampai dengan Triwulan IV telah terealisasi sebanyak 8 Dokumen . Secara kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai target, sehingga capaian realisasi fisiknya mencapai 100 %.

3).Jumlah BMD SKPD yang telah disensus/diinventarisasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu :

1 Dokumen berupa Buku Laporan Kegiatan Inventarisasi tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan Inventarisasi /Sensus BMD dilaksanakan tiap 5 (lima) tahun sekali. Terakhir kita melaksanakan sensus pada tahun 2018 dan tahun 2023 merupakan batas akhir untuk melaksanakan Inventarisasi/Sensus BMD kembali.

Dasar hukum untuk melaksanakan Inventarisasi adalah sebagai berikut :

1. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Permendagri Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
4. Surat edaran Bupati Tanah laut Nomor : 032/1375/PA/BPKAD/V/2023, tanggal 19 Mei 2023.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. Gambaran umum Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi Barang Milik Daerah, tujuannya agar tersedia data Barang Milik Daerah yang baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik.

Pada tahun 2023 dilaksanakan Inventarisasi secara serentak di level Pengelola, Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang, dengan output Laporan Hasil BMD yang dikelompokkan menjadi 11 (sebelas) kelompok permasalahan.

Seluruh SKPD harus berkomitmen untuk

1. Melaksanakan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah di lingkup SKPD sebagai pengguna barang dengan sungguh sungguh serta tertib sesuai ketentuan yang berlaku, mendukung secara penuh kepada Inventarisasi Barang Milik Daerah pada SKPD baik secara motivasi, bimbingan, dan pembiayaan pelaksanaan Inventarisasi.
2. Melaksanakan kegiatan Inventarisasi mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan hasil inventarisasi dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tanag Laut Nomo.123 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Inventarisasi yang dilakukan oleh Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah yang telah dibentuk oleh SKPD.

Tahapan Inventarisasi dimulai dengan Persiapan pembentukan Tim Inventarisasi dan penyiapan data awal, Pelaksanaan dilakukan pendataan dan identifikasi barang milik daerah, selanjutnya Monitoring dan Evaluasi kegiatan inventarisasi dengan melihat kesesuaian antara rencana kerja dengan kesesuaian lembar kerja hasil inventarisasi. dan terakhir Pelaporan Rekapitulasi Barang Milik Daerah atas 11 (sebelas) permasalahan hasil Inventarisasi.

Tim Inventarisasi pada Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Penggun barang ditetapkan oleh SK Bupati..

Tugas Tim Inventarisasi adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja meliputi, Obyek yang dilakukan inventarisasi, Time e Line, Pelaksana sesuai lokasi dan rencana pelaksanaan.
2. Menyiapkan Dokumen Sumber meliputi, Daftar BMD/KIB, Dokumen Kepemilikan , KIR, dan Dokumen Lainnya
3. Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Inventarisasi meliputi, Label BMD, Kertas Kerja Inventarisasi dan Dokumen lain yang diperlukan
4. Melakukan Inventarisasi dengan melakukan Identifikasi atas BMD di lingkup unit kerjanya, meneliti dokumen kepemilikan dan menyusun laporan hasil inventarisasi

Proses pelaksanaan inventarisasi pengurus barang dan Tim Inventarisasi SKPD melakukan pendataan dan identifikasi dengan menghitung jumlah barang, meneliti kondisi barang, menempel label pada barang dan mencatat pada lembar kerja inventarisasi. Selanjutnya pengelompokan barang yang belum tercatat hal ini dimaksudkan agar tidak tercampur dengan barang yang akan dilakukan pendataan dan labelisasi, memisahkan barang berdasarkan kategori kondisi barang baik, rusak ringan dan rusak berat. Selanjutnya mengelompokkan kondisi dat hasil inventarisasi dengan kondisi aktual menjadi 11 (sebelas) kelompok hasil inventarisasi.

Adapun jenis jenis Barang Milik Daerah yang di inventarisasi adalah :

1. Tanah (KIB - A)
2. Peralatan dan Mesin (KIB - B)
3. Gedung dan Bangunan (KIB - C)
4. Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB - D)
5. Aset Tetap Lainnya (KIB – E)
6. Aset Tak Berwujud (ATB)

Ruang lingkup inventarisasi adalah Neraca Aset Tetap, untuk BMD Ekstrakomtabel dan Aset Lain Lain berupa Barang Rusak Berat dan Barang Tidak Ditemukan tidak masuk dalam lembar kerja inventarisasi namun tetap dilakukan penempelan label.

Untuk mempermudah proses Inventarisasi, dibantu dengan menggunakan kertas kerja berupa Lembar Kerja Inventarisasi. Lembar Kerja Inventarisasi merupakan isian data yang digunakan pada saat pelaksanaan Inventarisasi. Ada 6 (enam) lembar kerja yang digunakan yaitu :

1. Lembar Kerja Inventarisasi berupa Tanah
2. Lembar Kerja Inventarisasi berupa Peralatan dan Mesin.

3. Lembar Kerja Inventarisasi berupa Gedung dan Bangunan
4. Lembar Kerja Inventarisasi berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Lembar Kerja Inventarisasi berupa Aset Tetap Lainnya
6. Lembar Kerja Inventarisasi berupa Aset Tidak Berwujud.

Tata cara Teknis Pelaksanaan Inventarisasi untuk BMD khususnya Tanah (KIB A) dan Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB D) adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Inventarisasi tanah dan Jalan Irigasi jaringan dengan Titik Koordinat menggunakan perangkat HP android dengan Aplikasi Open Camera.
2. Mencantumkan titik koordinat ke dalam Lembar Kerja Inventarisasi
3. Menyandingkan kondisi dan status tanah seta Jalan Irigasi Jaringan yang berada di lokasi Inventarisasi dengan data yang tertera pada Lembar Kerja Inventarisasi
4. Melakukan Identifikasi atas tanah dan Jalan Irigasi Jaringan dan melakukan pengisian data centang (\checkmark) berdasarkan hasil identifikasi pada kolom yang telah tersedia di dalam Lembar Kerja Inventarisasi.

Tata cara Teknis Pelaksanaan Inventarisasi untuk BMD Peralatan dan Mesin (KIB B) Gedung dan Bangunan (KIB C) dan aset Tetap Lainnya (KIB E) adalah sebagai berikut :

1. Mencetak label yang sudah tersedia pada SIMDA BMD sebagai bahan utama untuk pelaksanaan Inventarisasi
2. Menyiapkan denah ruangan yang update beserta nomor dan nama ruangan sebagai pedoman untuk mengisi Lemabr Kerja Inventarisasi.
3. Menempelkan Label yang sudah dicetak ke fisik BMD, untuk peralatan mesin dan aset tetap lainnyaditempelkan ke bagian yang mudah terlihat dan diusahakan tidak mudah lepas, khusus untuk gedung dan bangunan penempelan dilakukan di bagian dalam bangunan.
4. Menyandingkan barang yang berada di lokasi Inventarisasi dengan data yang tertera pada Lembar Kerja Inventarisasi.Dan mengisi kolom pada Lembar Kerja Inventarisasi sesuai dengan kondisi barang dan hasil identifikasi di lokasi Inventarisasi (baik didalam maupun di luar ruangan)
5. Melakukan identifikasi atas peralatan dan mesin , gedung dan bangunan ,dan Jalan Irigasi Jaringan dengan melakukan pengisian tanda (\checkmark) berdasarkan hasil identifikasi pada kolom yang telah tersedia di dalam Lembar Kerja Inventarisasi.

Tata cara Teknis Pelaksanaan Inventarisasi untuk BMD Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut :

1. Jika berupa software/Film, maka Tim inventarisasi meminta user membuka dan mengoperasikan ATB bersama user untuk melihat kondisi dan fungsi software/film tersebut masih bisa digunakan atau tidak.
2. Jika berupa kajian maka yang diidentifikasi adalah dokumen atas kajian tersebut dan keberlangsungan fungsinya.
3. Melakukan identifikasi atas aset tak berwujud dengan melakukan pengisian tanda (\checkmark) berdasarkan hasil identifikasi pada kolom yang tersedia di dalam lembarkerja Inventarisasi.

Selanjutnya dari hasil inventarisasi tersebut di tuangkan dalam bentuk dokumen laporan hasil Inventarisasi. Sampai dengan Triwulan IV telah terealisasi 1 dokumen laporan, sehingga fisiknya terealisasi sebesar 100 %.

- 4).Jumlah Belanja Modal SKPD yang termonitoring sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 12 kegiatan , sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 sudah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sebanyak 12 kegiatan ke seluruh SKPD. Terkait proses Inventarisasi/ Sensus BMD dan tata cara pengelolaan BMD yang baik sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku saat ini, sehingga capaian kinerja fisiknya terealisasi sebesar 100 %.
- 5).Jumlah SKPD yang telah tersosialisasi terkait Tata cara Teknis Pelaksanaan Inventarisasi BMD Tahun 2023 dan menerapkan Penatausahaan BMD sesuai ketentuan pada tahun ini, sesuai dengan target kinerja kegiatan tersebut adalah 40 SKPD, yang diikuti oleh semua sekretaris dan pengurus barang SKPD sebagai pesertanya, Kegiatan tersebut telah terealisasi fisiknya 100 %
- 6). Jumlah SKPD yang mengikuti Pembinaan dan menerapkan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan sesuai dengan Target Kinerja pada tahun ini ada 40 SKPD (12 kegiatan), sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 sudah dilaksanakan Pembinaan ke kecamatan dan SKPD sehingga capaian kinerja fisiknya terealisasi sebesar 100 %.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Subbid Inventarisasi Tahun 2023

- 1). Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 86.237.535,- .

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. Gambaran umum Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi Barang Milik Daerah, tujuannya agar tersedia data Barang Milik Daerah yang baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik.

Pada tahun 2023 dilaksanakan Inventarisasi secara serentak di level Pengelola, Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang, dengan output Laporan Hasil BMD yang dikelompokkan menjadi 11 (sebelas) kelompok permasalahan sesuai dengan Permedagri No.47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Dari hasil Inventarisasi 40 (empat puluh) SKPD dihasilkan 11 (sebelas) kelompok permasalahan dari KIB A sampai dengan KIB F sebagai berikut :

1. BMD Hilang Kecurian sejumlah 67 item barang dengan Nilai sebesar Rp.258.846.158,80,-
2. BMD Hilang Tidak Ditemukan sejumlah 1.797 item barang, dengan Nilai sebesar Rp. 6.747.593.977,57,-
3. BMD Belum di Kapitalisasi Induk Aset di Ketahui sejumlah 118 item barang dengan Nilai sebesar Rp. 98.184.858.947,03,-
4. BMD Belum di Kapitalisasi Induk Aset Tidak di Ketahui sejumlah 11 item barang dengan Nilai sebesar Rp.600.000,-
5. BMD Digunakan Pegawai Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sejumlah 39 item barang dengan Nilai sebesar Rp. 8.867.694.026,-
6. BMD Digunakan Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak Lainnya sejumlah 146 item barang dengan Nilai sebesar Rp. 5.783.242.805,36,-
7. BMD Perubahan Fisik Barang sejumlah 5.362 item barang dengan Nilai sebesar Rp. 18.722.471.876,28,-
8. BMD Perubahan Data sejumlah 314 item barang dengan Nilai sebesar Rp. 13.437.181.288,79,-

9. BMD Tercatat Ganda sejumlah 8 item barang dengan Nilai sebesar Rp. 1.367.621.236,-
10. BMD Berdiri di atas Tanah Bukan Milik Pemerintah Daerah sejumlah 75 item barang dengan Nilai sebesar Rp. 7.647.599.357,-
11. BMD Belum Tercatat sejumlah 11 item barang.

Dari hasil Inventarisasi dapat disimpulkan bahwa Jumlah Obyek Inventarisasi pada Tahun 2023 dari KIB A sampai dengan KIB F sejumlah 115.786 item barang dengan Nilai sejumlah **Rp. 5.377.177.156.212,15,- (Lima Trilyun Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah Lima Belas Sen)**.

Selanjutnya dari hasil inventarisasi tersebut di tuangkan dalam bentuk dokumen laporan hasil Inventarisasi. Sampai dengan Triwulan IV telah terealisasi 1 dokumen laporan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 74.464.500,- atau capaian realisasi keuangannya sebesar 86,35 %.

- 2). Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 46.703.960,- sampai dengan triwulan IV Realisasi keuangan sebesar Rp. 45.052.000,- atau capaian sebesar 96,46 %. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai target, sampai dg triwulan IV telah tersusun 8 dokumen terdiri :
 1. Buku Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 Semester II
 2. Buku Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 Semester I
 3. Buku Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022 Semester II
 4. Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 Semester I
 5. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa TA.2022 Triwulan IV
 6. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa TA.2023 Triwulan I
 7. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa TA.2023 Triwulan II
 8. Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa TA.2023 Triwulan III
- 3). Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 281.168.559,-. Kegiatan ini merupakan sub kegiatan inti pada Sub Bidang Inventarisasi, karena Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah sangat

menunjang kegiatan kegiatan di Subbid Inventarisasi, agar tertib administrasi sehingga Barang Milik Daerah terkelola dengan baik. Dalam proses kegiatan ini didukung dengan Aplikasi Simda BMD, dimana Bidang Penatausahaan Aset bekerja sama dengan PT. Lawang Sewu melalui kontak kerjasama Pengadaan Sewa Layanan Cloud Simda BMD selama setahun dengan nilai kontrak sebesar RP. 199.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), Nomor Kontrak : 027/SPK/BPKAD/2023, tanggal 2 Januari 2023. Aplikasi Sewa Layanan Cloud Simda BMD ini sangat membantu dalam proses Penyusunan Tabulasi data aset, sehingga data data aset dapat disajikan dengan mudah, cepat dan akurat.

Adapun proses pembayaran layanan tersebut PT. Lawang Sewu mengirimkan Invoiceny tiap bulan, sebesar Rp.16.583.333,- baru kita lakukan pembayaran. Sampai dengan Triwulan IV sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 267.860.596,- atau capaian realisasi keuangannya sebesar 95,27 %.

4). Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah

Kabupaten / Kota dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 96,289,245,-.

Dalam rangka membangun pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan visi Kabupaten Tanah Laut, maka pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah harus di lakukan secara baik, tertib, sistematis, transparan dan akuntabel. Terdapat dua unsur pengelolaan tata pemerintahan yang sangat penting yaitu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, ujung tombak pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara teknis adalah pengurus barang dan bendahara pengeluaran.

Paradigma baru Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) juga menekankan pada penggunaan Teknologi Informasi dalam penatausahaannya.

Pengelolaan keuangan yang semakin meningkat dan bertambahnya jumlah Barang Milik Daerah setiap tahun maka akan bertambah pula tanggung jawab Pengurus barang dan Bendahara Pengeluaran sebagai garda terdepan pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui BPKAD melakukan inovasi inovasi yang dapat membantu dan mendukung lancarnya pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yaitu sebagai berikut :

Untuk Pengurus Barang, Inovasi yang dilaksanakan adalah berupa **QR Code Barang Milik Daerah** yang merupakan inovasi pelabelan BMD yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Untuk Bendahara Pengeluaran berupa **One Step Payroll** salah satu bentuk inovasi dalam rangka mendukung sistem pengganjian PNS yang sudah berjalan di Kabupaten Tanah Laut.

FGD (Focus Group Discussion) Persiapan Implementasi **QR Code** Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Evaluasi Pelaksanaan **ONE STEP PAYROLL** dilaksanakan dengan biaya di bebaskan pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota . FGD tersebut dilaksanakan pada tanggal, 25 s.d 27 Oktober 2023 di AONE Hotel Jakarta, dalam rangka Persiapan Implementasi QR Code Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Evaluasi Pelaksanaan ONE STEP PAYROLL. Peserta terdiri dari Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran pada seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut beserta BPKAD. Narasumber dari PT Lawang Sewu Teknologi sebagai pengisi materi *QR Code* Barang Milik Daerah dan Bank Kalsel sebagai pengisi materi *One Step Payroll*.

Hasil yang di capai Pengurus Barang dapat memahami penggunaan Aplikasi *QR Code* Barang Milik Daerah, Sedangkan Bendahara Pengeluaran mendapatkan pengetahuan tentang implementasi Aplikasi *One Step Payroll*, Sehingga Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Keuangan dapat dilakukan baik, tertib, Sistematis, transparan dan akuntabel . Sampai dengan Triwulan IV sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 87.297.750,- atau capaian realisasi keuangannya sebesar 90,66

Kasubbid Inventarisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung SDM yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur dilingkungan Kasubbid Inventarisasi yaitu sebanyak 4 (empat) orang staf PNS dan 1 (satu) orang staf PTT yang siap membantu dan melayani tugas dan fungsi yang dibutuhkan Organisasi. Kasubbid Inventarisasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah tercapai kinerjanya 100% dengan realisasi keuangan sebesar 93 % sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran rata-rata sebesar 7 % dari 1 Program 1 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Kasubbid Inventarisasi pada tahun 2023.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

- 1). Adanya perubahan Aplikasi Keuangan dari SIMDA Keuangan ke Aplikasi SIPD , sehingga bidang Penatausahaan Aset kesulitan memperoleh data Belanja SKPD.
- 2). Adanya beban kerja yang dirangkap oleh Pengurus Barang SKPD |
- 3). Adanya beberapa permasalahan dalam proses Inventarisasi antara lain :
 - Barang terbawa pemakai ke SKPD baru
 - Barang ada ditempat, namun perpindahan barang antar pemakai di SKPD setempat tidak diketahui oleh Pengurus Barang
 - Barang tidak ditemukan karena kehilangan/pencurian
 - Barang yang secara administrasi tercatat di neraca KIB/Buku Inventaris, sedangkan fisiknya sudah tidak diketahui keberadaannya

Rencana Aksi

- 1). Pengurus Barang SKPD wajib memberikan informasi data secara berkala tentang pengadaan BMD di SKPD melalui Surat Edaran.
- 2). Memberikan apresiasi kepada Pengurus Barang SKPD yang berprestasi dalam pengelolaan BMD..
- 3). Kepala SKPD selaku Pengguna Barang harus bertanggung jawab terhadap BMD yang dalam penguasaannya.

Pengurus barang harus segera membuat Berita Acara Serah Terima barang setiap ada pergantian/Mutasi pemakai BMD.

Kepala SKPD selaku Pengguna Barang harus segera melaporkan kepada pihak berwajib secepatnya dan disertai Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Kepala SKPD selaku Pengguna barang dan pengurus Barang SKPD segera melakukan penelusuran baik secara administrasi maupun fisik barang.

Foto - Foto Kegiatan Kasubbid Inventarisasi Tahun 2023

1. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah





LKj BPKAD TAHUN 2023

3. Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah



4. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota





7.ESELON III.A (SEKRETARIS)

7.1.Analisa Pencapaian Sasaran Strategis Nomor 5

Sasaran Strategis nomor 5 adalah menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Eselon III.A sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Pohon Kinerja SKPD yang telah ditandatangani.

Sasaran strategis Nomor 5 ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 (Sekretaris)																						
Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan																						
No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023(%)					
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi												
5	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	13	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
		14	Nilai Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	60	65,41	109,02%	65	77,80	119,69%	70	79,39	113,41%		
		15	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		16	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		17	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		18	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	64,15	64,74	100,92	66	74,98	113,61	67	88,43	131,99	68	88,91	130,75	69	80,5	116,67	70	81,5	116,43
			Rata-rata capaian kinerja				100,18			102,72			106,40			106,15			103,33			104,97

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan dengan 6 indikator sasaran yang terpenuhi kinerjanya dengan trend dari tahun 2018 sampai tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, dibuktikan dengan dengan telah terlayannya pemenuhan pelayanan kesekretariatan di Kantor BPKAD Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 5 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Keuangan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2023..

Berikut ini tabel yang menggambarkan efesiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja tahun 2023 yang menjadi tanggung jawab Sekretaris BPKAD :

TABEL EFESIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023												
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT												
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN % 2023	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi	Penanggungjawab	
3	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	5. Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	13	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	%	100	100	92,62%	100%	7,38%	Sekretaris	
			14	Nilai Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Nilai	70	79,39					113,41%
			15	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	%	100	100					100%
			16	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100					100%
			17	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	%	100	100					100%
			18	Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Nilai	70	81,5					116,43%

Sekretaris BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan SDM yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur dilingkungan Bagian Sekretariat yaitu sebanyak 9 PNS yang terdiri dari 3 (tiga) orang Pejabat Eselon IV dan 6 (enam) orang staf PNS serta dibantu staf PTT sebanyak 6 (enam) orang yang siap membantu dan melayani tugas dan fungsi yang dibutuhkan Organisasi. Sekretaris BPKAD telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah tercapai kinerjanya rata-rata 100% dengan realisasi anggaran rata-rata 92,62% sehingga terdapat efesiensi penggunaan anggaran di Bagian Sekretariat rata-rata

sebesar 7,38% dari 1 Program 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 5 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2023 dengan penjelasan dibawah ini.

7.1.1). ESELON IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)

Untuk mendukung Sasaran Strategis No 5 dengan indikator sasaran no 13,14 dan 15 adalah menjadi tanggungjawab Sekretaris diatas dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian yaitu dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditandatangani.

Pengelolaan administrasi perkantoran merupakan kegiatan rutin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, meliputi pelayanan surat masuk dan surat keluar, pelayanan sarana dan prasarana, pelayanan administrasi kepegawaian sebanyak 42 PNS dan 19 PTT dan semua terlayani dengan baik 100%.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023 sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dengan	Jumlah Administrasi Perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai	1 Jenis Pelayanan (Surat Menyurat)	1 Jenis Pelayanan (Surat Menyurat)	100%

	baik	ketentuan			
2	Melaksanakan pemenuhan pelayanan sarpras SKPD dengan baik	Jumlah Sarana prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 Jenis Pelayanan (Gedung dan Kendaraan Dinas Operasional)	2 Jenis Pelayanan (Gedung dan Kendaraan Dinas Operasional)	100%
3	Melaksanakan penyusunan RB SKPD	Jumlah Dokumen RB SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Melaksanakan pemenuhan dan peningkatan kualitas SDM SKPD	Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	44 ASN dan 19 PTT	42 ASN dan 18 PTT	100%

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian (Fisik)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (Keuangan)	
1	2	3	4			5	6	7	8
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
A.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket	2 paket	2 paket	100	69.930.000	62.000.000	88,66	
A.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket	1 paket	1 paket	100	6.569.361	5.625.000	85,62	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket	5 paket	11 paket	100	1.125.200.835	1.006.210.400	89,42	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket	3 paket	3 paket	100	72.822.362	63.424.600	87,09	

5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kali	250 kali	357 kali	100	1.616.000.000	1.572.294.735	97,30	
A.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	312.000.000	164.925.173	52,86	
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	468.768.000	442.219.960	94,34	
A.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit	1 unit	1 unit	100	16.250.000	15.398.800	94,76	
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit	15 unit	15 unit	100	68.750.000	52.073.000	75,74	
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis	36 unit	36 unit	100	19.800.000	19.800.000	100,00	

LKj BPKAD TAHUN 2023

11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	2 unit	2 unit	100	20.113.200	20.107.500	99,97	
----	--------------------------------------------------------------------	------------------	--------	--------	------------	------------	------------	--------------	--

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023

- 1) Jumlah Administrasi Perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 1 jenis pelayanan yaitu (surat menyurat), dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Jumlah Sarana prasarana yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 2 Jenis Pelayanan (Gedung dan Kendaraan Dinas Operasional) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Jumlah Dokumen RB SKPD yang telah terpenuhi sebanyak 1 Dokumen sehingga capaian 100% dengan Nilai RB BPKAD pada tahun 2023 atas penilaian RB tahun 2022 adalah sebesar 79,39 dengan Predikat BB.
- 4) Jumlah SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan dengan Target Kinerja sebanyak 42 ASN dan 18 PTT dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2023

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 69.930.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 62.000.000,00 atau capaian 88,66%;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 6.569.361,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.625.000,00 atau capaian 85,62%;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 1.125.200.835,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.006.210.400,00 atau capaian 89,42%;

- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 72.822.362,00 dengan realisasi sebesar Rp. 63.424.600,00 atau capaian 87,09%;
- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 1.616.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.572.294.735,00 atau capaian 97,30%;
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 312.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 164.925.173,00 atau capaian 52,86%;
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 468.768.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 442.219.960,00 atau capaian 94,34%;
- 8) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 16.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.398.800,00 atau capaian 94,76%;
- 9) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 68.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 52.073.000,00 atau capaian 75,74%;
- 10) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 19.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.800.000,00 atau capaian 100%;
- 11) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Pagu anggaran Sebesar Rp. 20.113.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.107.500,00 atau capaian 99,97%.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

Tidak ada permasalahan/kendala yang berarti.

Rencana Aksi

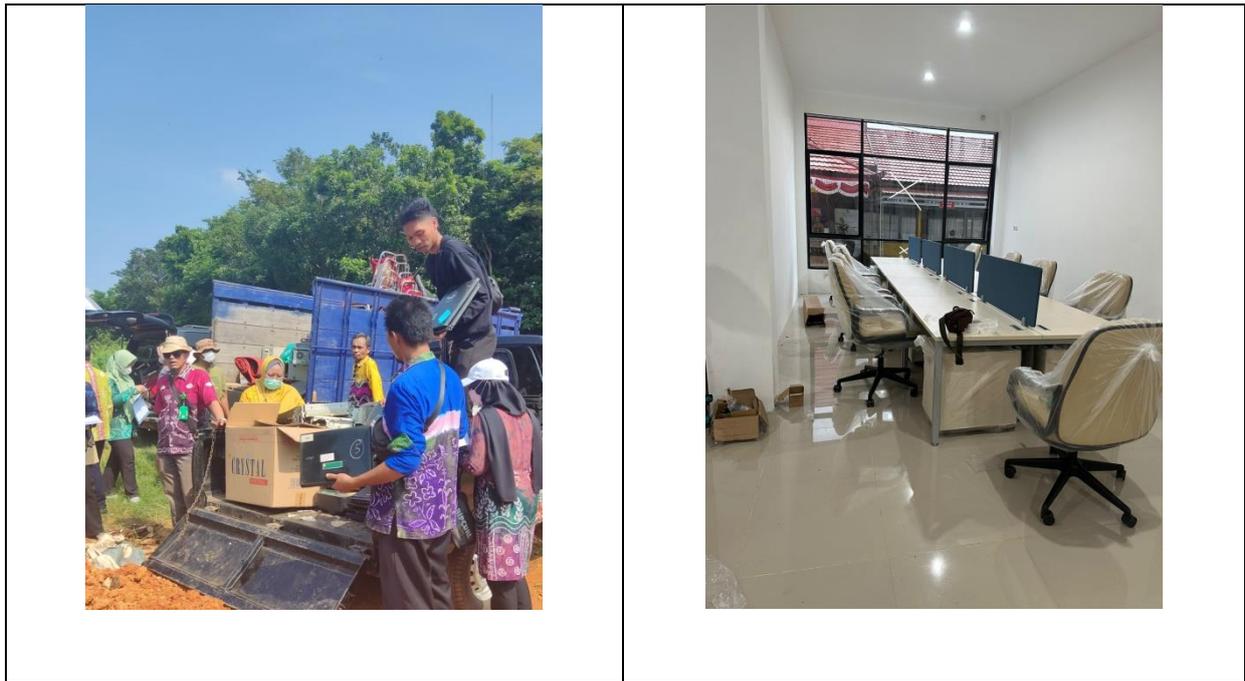
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada ASN BPKAD untuk Tahun 2024.

Foto – Foto Kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023









7.1.2). ESELON IV (Kasubbag Keuangan)

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 5 Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan dengan indikator sasaran no 16 yaitu Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan yang menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kabupaten Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Keuangan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2023 dengan penjelasan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan penyusunan laporan	1	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	5 dokumen	5 dokumen	100%

LKj BPKAD TAHUN 2023

	keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun)		SKPD			
2	Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan SKPD	2	Jumlah dokumen administrasi keuangan SKPD yang akuntabel	200 dokumen	338 dokumen	169%

**Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sesuai
Dokumen DPA Tahun 2023**

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran RP	Realisasi	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
A.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.463.769.348 ,-	7.605.535.320, -	93,74 %	
		Jumlah bulan terbayar Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	-	12 bulan	100%	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			13.162.576,-	9.627.836,-	73,15 %	
		Jumlah dokumen	94 dok	-	338 dok	359,57 %	

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbag Perencanaan Tahun 2023

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023

- 1). Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 5 dokumen yaitu Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Laporan- laporan Keuangan tersebut merupakan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Bendahara selama Tahun 2023.
Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 juga telah realisasi.
Laporan Bulanan telah ada realisasi berupa Laporan Bulanan bulan Januari sampai dengan Desember 2023 sehingga telah terealisasi 100%.
- 2). Jumlah dokumen administrasi keuangan SKPD yang akuntabel dengan Target Kinerja Sebanyak 200 dokumen berupa 200 Dokumen Pertanggungjawaban kegiatan di BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Pertanggungjawaban tersebut kemudian akan di proses lebih lanjut menjadi SPP, SPM, proses pencairan SP2D baik UP, GU, TU, LS. Proses tersebut meliputi pemindah-bukuan pada aplikasi IBB (Internet Banking Bendahara) dan pembuatan TBP (Tanda Bukti Potong), termasuk juga laporan bendahara.
Jumlah dokumen administrasi keuangan yang telah terealisasi pada Triwulan IV Tahun 2023 sebanyak 338 dokumen atau capaian sebesar 169%. Terjadinya target yang lebih kecil terjadi karena berdasarkan target Tahun 2022 dimana bidang- bidang di BPKAD terdapat BPP dengan proses transaksi tersendiri. Namun di Tahun 2023 transaksi kembali dipusatkan jadi satu di Bendahara Pengeluaran dengan dihapuskan kembali BPP tersebut, sehingga transaksi kembali melonjak di subbag keuangan.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2023

- 1). Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 13.162.576,- dengan realisasi sd TW IV sebesar Rp 9.627.836,- atau capaian sebesar 73,15%. Sub Kegiatan ini target kinerja sebanyak 94 Dokumen SPP/ SPM yang berasal dari transaksi GU dan LS sampai dengan TW IV telah terealisasi sebanyak 338 dokumen atau dengan capaian 359,57%. Realisasi kinerja telah melebihi capaian 100% disebabkan karena target dibuat hanya berdasarkan perkiraan SKPD akan melakukan transaksi SPP/SPM melalui mekanisme GU maupun LS.
- 2). Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 8.034.224.840,- dengan realisasi sd Tw IV sebesar Rp 7.605.535.320,- atau capaian sebesar 94,66%. Sub Kegiatan ini target kinerjanya adalah Jumlah bulan terbayar Gaji dan Tunjangan ASN termasuk BPJS, JKK dan JKM nya setiap bulannya. Adapun realisasi sampai dengan TW IV capaian kinerja fisik tercapai 100%.

Pada tahun ini Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS tidak ada realisasi karena belum ada tagihan dari pihak terkait. Selain itu penggajian PPPK pun tidak ada realisasi karena belum ada PPPK yang mengisi formasi di BPKAD.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

- Aplikasi penatausahaan yang belum sempurna sehingga menggunakan aplikasi penatausahaan ganda (dua sistem).

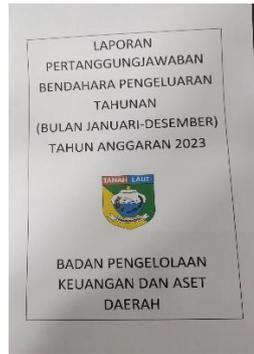
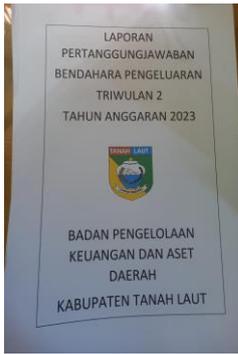
Rencana Aksi

- Mengusulkan adanya Pembinaan/ Pelatihan/ Bimtek mengenai Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah (SIPD RI).
- Melakukan koordinasi secara berkala dengan PPTK serta bidang lain yang terkait.

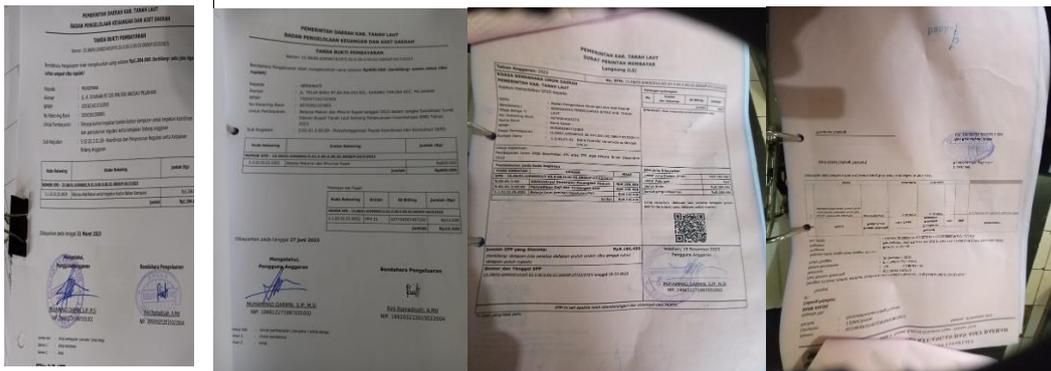
Foto - Foto Kegiatan Kasubbag Keuangan Triwulan IV Tahun 2023

1). Foto Dokumen Laporan Keuangan SKPD





2). Foto Dokumen Administrasi Keuangan SKPD



7.1.3). ESELON IV (Kasubbag Perencanaan)

Untuk mendukung Sasaran Strategis No 5 dengan indikator sasaran no 17 yang menjadi tanggungjawab Sekretaris diatas dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan yaitu dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditandatangani.

Untuk menggambarkan kinerja Kasubbag Perencanaan Tahun 2023 sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perjanjian Kinerja yaitu berupa tabel pencapaian beserta analisisnya dapat diuraikan dibawah ini.

Tabel Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan	1	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%
2	Melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan	2	Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100%
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan kinerja SKPD	3	Jumlah dokumen Laporan Monitoring & Evaluasi perencanaan kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100%
4	Melaksanakan penyusunan SAKIP SKPD	4	Jumlah dokumen SAKIP SKPD	8 dokumen	8 dokumen	100%
5	Melaksanakan penyusunan dokumen SKM SKPD	5	Jumlah dokumen SKM SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%

Tabel Pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran RP	Realisasi	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
A.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8.549.972	7.478.400	87,47%	
		Jumlah dokumen	7 Dok		7 Dok	100%	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.478.191	8.452.005	89,17%	
		Jumlah dokumen	6 Dok		6 Dok	100%	

Analisis Pencapaian Kinerja Kasubbag Perencanaan Tahun 2023

Analisis Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023

- 1). Jumlah dokumen perencanaan SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 2 dokumen yaitu (Renja Murni Thn 2024 dan Renja Perubahan Thn 2023), sampai Triwulan IV Tahun 2023 terealisasi kinerja sebanyak 2 Dokumen sehingga telah terealisasi sebesar 100%.
- 2). Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD dengan Target Kinerja Sebanyak 3 dokumen yaitu (Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022, LKPJ Thn 2022 dan LPPD Thn 2022) telah terealisasi seluruhnya sebanyak 3 dokumen, sehingga realisasi capaian sebesar 100%.
- 3). Jumlah dokumen Laporan monitoring dan evaluasi perencanaan dan kinerja SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 4 dokumen yaitu (Lap. Monev Tw I, Lap . Monev Tw II, lap. Monev Tw III dan Lap. Monev Tw IV Thn 2023), sampai dengan TW IV ini telah terealisasi 4 Dokumen Tahun 2023, sehingga capaian kinerja terealisasi sebesar 100%.

- 4). Jumlah Dokumen SAKIP SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 8 dokumen yaitu (Renstra 2018-2023, Renja Thn 2022, Renja Thn 2023, Perjanjian Kinerja Thn 2022, IKU Thn 2022, Pohon Kinerja Thn 2022, Laporan Kinerja Thn 2022, Matrik Keselarasan Thn 2022), sampai dengan Tw I ini seluruh dokumen sebanyak 8 dokumen tersebut telah terealisasi 100% dengan telah di upload pada Aplikasi ESR Menpan RB pada tanggal 30 Maret 2023.
- 5). Jumlah dokumen SKM SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 1 dokumen yaitu (Dokumen SKM Thn 2023) telah terealisasi sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Pencapaian Kinerja atas Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2023

- 1). Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 8.549.972,- dengan realisasi sd TW IV sebesar Rp 7.478.400,- atau capaian sebesar 87,47%. Sub Kegiatan ini sudah terealisasi dokumen Renja 2024, Dokumen Renja Perubahan Tahun 2023, Renstra 2024-2026, DPA P 2023, DPA 2024, RKA P 2023 dan RKA 2024 sebanyak 7 Dokumen dari target 7 Dokumen sehingga tercapai sebesar 100%.
- 2). Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu anggaran Sebesar Rp 9.478.191,- dengan realisasi sd Triwulan IV sebesar Rp 8.452.005,- atau capaian sebesar 89,17%. Sub Kegiatan ini telah terealisasi sebanyak 6 Dokumen dari 6 Dokumen yang ditargetkan yaitu (LKJ 2022, LKPJ 2022, LPPD 2022, Laporan Monev Triwulanan, Laporan Monev Semesteran dan Laporan SKM) sehingga telah tercapai 100%.

Kasubbag Perencanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung SDM yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur dilingkungan Kasubbag Perencanaan yaitu sebanyak 1 (satu) orang staf PNS yang siap membantu dan melayani tugas dan fungsi yang dibutuhkan Organisasi. Kasubbag Perencanaan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah tercapai kinerjanya 100% dengan realisasi keuangan sebesar 88,36% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran rata-rata sebesar 11,64% dari 1 Program 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Kasubbag Perencanaan pada tahun 2023.

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

- Tidak ada permasalahan dan kendala yang dihadapi

Rencana Aksi

- Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja BPKAD untuk Tahun 2023

Foto - Foto Kegiatan Kasubbag Perencanaan Tahun 2023

1). Foto Dokumen Laporan Kinerja (LKj) SKPD tahun 2022



2). Foto Dokumen SAKIP SKPD



LKj BPKAD TAHUN 2023

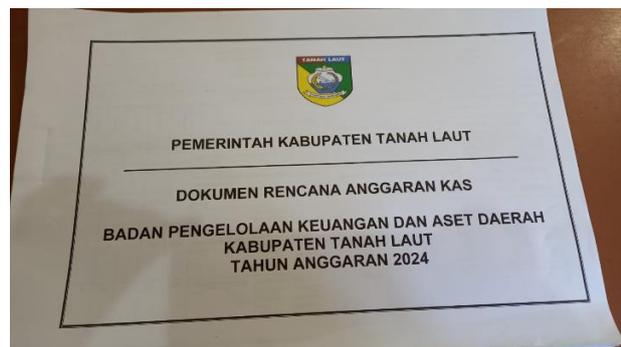
3). Foto Dokumen Laporan LKPJ dan LPPD 2022



4). Foto Dokumen Perencanaan (Renja 2024 dan Renja Perubahan 2023)



5). Foto Dokumen Laporan Money Tw I, Tw II dan Semester I Thn 2023



Sasaran strategis 5 dengan indikator sasaran no 18 Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah penilaian LAKIP Tahun 2017 sebesar 100,92% dan tahun 2019 adalah penilaian LAKIP Tahun 2018 sebesar 113,61%, Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2020 adalah penilaian LAKIP Tahun 2019 sebesar 131,98%, sedangkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 adalah penilaian LAKIP Tahun 2020 sebesar 130,75% mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 1,23%. Sedangkan untuk mendukung sasaran strategis nomor 5 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2023 .

Sedangkan pada tahun 2021 dilaksanakan Reviu SAKIP Tahun 2020 BPKAD Kabupaten Tanah Laut terhadap 9 dokumen SAKIP BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dan telah mendapatkan Nilai A (88,91) dari target nilai 68 atau dengan capaian kinerja sebesar 130,75%, sehingga capaian kinerja BPKAD Kab. Tanah Laut telah melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022 dilaksanakan Reviu SAKIP Tahun 2021 BPKAD Kabupaten Tanah Laut terhadap 9 dokumen SAKIP BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 dan telah mendapatkan Nilai A (80,5) dari target nilai 69 atau dengan capaian kinerja sebesar 116,67%, sehingga dengan demikian capaian kinerja BPKAD Kab. Tanah Laut telah melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2023 dilaksanakan Reviu SAKIP Tahun 2022 BPKAD Kabupaten Tanah Laut terhadap 9 dokumen SAKIP BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 dan telah mendapatkan Nilai A (81,50) dari target nilai 70 atau dengan capaian kinerja sebesar 116,43%, sehingga dengan demikian capaian kinerja BPKAD Kab. Tanah Laut telah melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Rencana Kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Rencana Kinerja tahunan yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang sudah ditentukan.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Sesuai pilihan prioritas rencana kinerja tahunan BPKAD Kabupaten Tanah Laut ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah Instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur besar pencapaian target – target yang ditetapkan.

Rencana-rencana yang telah ditetapkan selanjutnya diaplikasikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam bentuk Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD). Berkaitan dengan pelaksanaan anggaran tentunya haruslah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, penatausahaan/pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1). ANGGARAN DAN REALISASI APBD BPKAD 2023

Ringkasan realisasi APBD khusus untuk SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut realisasi belanjanya pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Target dan Realisasi Belanja BPKAD sebagai SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selain sebagai SKPD juga sebagai Pejabat Pengelola keuangan Daerah PPKD yang bertugas sebagai koordinator dan membina 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 285.240.884.026,- setelah perubahan adalah sebesar Rp 300.537.244.894,- yaitu bertambah sebesar Rp 15.296.360.868,- dengan realisasi pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp 274.778.042.543,-.

Jumlah tingkat capaian kinerja belanja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 91,43 %. dengan capaian kinerja fisik rata-rata sebesar 100%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 8,57% dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut :

a). Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Operasi dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran sebesar Rp 18.546.361.366,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.781.666.878,- atau capaian 90,48% dengan rincian anggaran perjenis belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 anggaran sebesar Rp 8.113.769.343,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.605.535.320,- atau capaian sebesar 93,74%.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran sebesar Rp 10.432.592.023,- ini terealisasi sebesar Rp. 9.176.131.558,- atau capaian 87,96%.

b) . Belanja Modal

Belanja Modal dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran sebesar Rp 13.474.504.037 ini telah terealisasi sebesar Rp. 12.802.532.000,- dengan capaian 95,01% rincian per jenis belanja sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran sebesar Rp 200.572.639,- terealisasi sebesar Rp. 38.954.000,- atau capaian 19,42%.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran sebesar Rp 13.260.545.300,- terealisasi sebesar Rp. 12.750.658.000,- atau capaian 96,15%.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran sebesar Rp 13.386.098,- terealisasi sebesar Rp. 12.920.000,- atau capaian 96,52%.

c) Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak anggaran tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran sebesar Rp 22.172.915.145,- telah terealisasi sebesar Rp. **540.899.999,-** atau capaian 2,44%.

d). Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Transfer dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp 246.343.464.346 dan telah terealisasi sebesar Rp. 244.652.753.666,- atau capaian sebesar 99,31 dengan rincian anggaran per jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil untuk pemerintah desa dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 6.124.680.450,- dan telah terealisasi sebesar Rp 6.111.780.450,- atau capaian sebesar 99,79%.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan untuk pemerintah desa dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 240.218.783.896,- dan telah terealisasi sebesar Rp 238.540.973.216 ,- atau capaian sebesar 99,30%.

8. Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sesuai Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menutupi dari pembiayaan neto karena SILPA lebih besar dari pengeluaran pembiayaan daerah.

Dalam rancangan APBD Tahun anggaran 2023 ini penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 906.703.550.940,- penerimaan pembiayaan daerah itu masih berupa perkiraan mengingat tahun anggaran 2023 masih berjalan, namun pada akhir periode telah terealisasi sebesar Rp 906.951.911.440 atau dengan capaian sebesar 100,03%.

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tersebut digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi, karena dalam Rancangan Peraturan daerah kabupaten tanah laut tentang APBD Tahun Anggaran 2023 anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.739.292.358.915,- masih lebih kecil dari anggaran belanja sebesar Rp. 2.502.766.740.528,- sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 763.474.381.613,-.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 ini dianggarkan sebesar Rp. 58.318.896.928,- dan telah terealisasi sebesar Rp 58.318.896.928, atau capaian sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembentukan dana cadangan Rp. 20.000.000.000,-
2. Pernyataan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Rp. 28.318.896.928,-
3. Pemberian pinjaman berupa investasi langsung kepada lembaga keuangan Rp. 10.000.000.000,-

Dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Mengambil langkah dimana defisit anggaran yang terjadi akan ditutupi dengan pembiayaan neto.

Hal ini karena adanya kebijakan untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya untuk menandai belanja, terutama untuk membiayai program dan kegiatan yang dirasa cukup penting untuk dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

1. RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI APBD BPKAD TAHUN 2023 BERDASARKAN SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2023 pada umumnya sudah tercapai dan sesuai dengan target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan

dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi APBD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2023 berdasarkan Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdiri dari 3 Program, 11 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL REALISASI RENCANA KERJA SESUAI SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	NO	KEGIATAN			TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN (%)	KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN Y/T	ANGGARAN (RP)		REALISASI (RP.)	CAPAIAN (%)
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN					TERKAIT	TIDAK / TERKAIT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24

1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.Opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	100%																	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2.Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	(86) BAIK	(97,02) SANGAT BAIK	112,81 %																	
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	3.Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Ya	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											
										1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Ya	59.643.027	Terkait	43.669.400	73,22	
										2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perubahan KUA	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Ya	48.646.200	Terkait	40.360.600	82,97	

										8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Perda Perubahan APBD dan Perkada Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Ya	154.312.113	Terkait	79.687.000	51,64
										9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen Pedoman Penyusunan RKA SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	Ya	28.341.775	Terkait	19.699.000	69,51
										10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran pembiayaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	Ya	1.958.702	Terkait	1.686.400	86,10
		4.Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan	100 %	100%	100%					2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										

		pembiayaan daerah sesuai ketentuan																			
									11	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen SPD	480 Dokumen	480 Dokumen	100 %	Ya	6.360.978	Terkait	3.935.800	61,87	
									12	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Ya	49.336.132	Terkait	36.886.750	74,77	
									13	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Jenis	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	Ya	2.250.000	Terkait	1.350.000	60,00	

										14	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Ya	14.456.000	Terkait	14.306.000	98,96
										15	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah kali	4 kali	4 kali	100 %	Ya	1.620.000	Terkait	400.000	24,69
										16	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Ya	13.326.000	Terkait	12.126.000	91,00
										17	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	100 %	Ya	193.495.282	Terkait	155.845.171	80,54

			100 %	100 %	100%					3	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
										18	Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Desa yang tersalurkan Bantuan Keuangan	130 Desa	130 Desa	100 %	Ya	246.343.464.346	244.652.753.666	99,31
										19	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Ya	22.172.915.145	540.899.999	2,44
		5.Persentase kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Pemkab dan Pelaporan Keuangan SKPD sesuai	100 %	100%	100%					4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									

LKj BPKAD TAHUN 2023

										24	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	Ya	218.337.456	Terkait	188.506.600	86,34	
										25	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	Ya	34.192.365	Terkait	28.496.420	83,34	
										26	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah FGD	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Ya	-	Terkait	-	#DIV/0!	
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik	6.Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai	95%	60%	63,16%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerin	WTP	Ya	5	Pengelolaan Barang Milik Daerah											

LKj BPKAD TAHUN 2023

Daerah (BMD) sesuai ketentuan	ketentuan						Daerah														
	7.Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100 %	0%	0%					27	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah buku rekonsiliasi penganan dan pemeliharaan BMD	5 buku 40 papan nama 80 Patok tanda batas 1	5 buku 40 papan nama 80 Patok tanda batas 1	100 %	Ya	396.675.125	Terkait	161.176.004		40,63

		8.Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	100 %	500,00%	500,00 %					28	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Buku Hasil Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 buku 5 alat angkut , 5 buah rumah negara, 1 buah rumah negara, 1 buah rumah negara	1 buku 5 alat angkut, 5 buah rumah negara, 1 buah rumah negara	100 %	Ya	12.407.911.235	Terkait	11.959.058.329	96,38
--	--	---------------------------------------------------------	-------	---------	----------	--	--	--	--	----	-------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------	----	----------------	---------	----------------	-------

		9.Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	100 %	100 %	100%				29	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah dokumen	1 dokumen hibah keluar, 1 dokumen hibah masuk, 1 dokumen laporan hasil kegiatan, 1 dokumen laporan hasil monitoring penggunaan, 1 dokumen monitoring pemanfaatan dan penggunaan BMD, 1 dokumen pelaksanaan pemanfaatan BMD	1 dokumen hibah keluar, 1 dokumen hibah masuk, 1 dokumen laporan hasil kegiatan, 1 dokumen monitoring penggunaan, 1 dokumen monitoring pemanfaatan dan penggunaan BMD, 1 dokumen pelaksanaan pemanfaatan BMD	100 %	Ya	115.288.960	Terkait	79.703.094	69,13
--	--	-----------------------------------------------------	-------	-------	------	--	--	--	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	-------------	---------	------------	-------

													n BMD 1 doku men pemus nahan BMD 1 doku men pengh apusa n BMD 1 doku men rekons iliasi pema nfaata n dan pengg unaan BMD 15 sosiali sasi	pemusn ahan BMD 1 dokume n pengha pusan BMD 1 dokume n rekonsili asi pemanf ataan dan penggu naan BMD 15 sosialisa si							
		10.Perse ntase Peminda htangan n, Pemusna han dan Penghap usan BMD sesuai	100 %	1170 %	1170%					30	Penilaian Barang Milik Daerah	Pemer intah Kabupa ten Tanah	Jumlah Obyek BMD yang dinilai untuk dicatat, dimanf aatkan dan dipinda htanga nkan	3 Obyek	3 Obyek	100 %	Ya	177.064.980	Ter kait	136.591.918	77,14

LKj BPKAD TAHUN 2023

		ketentuan																			
		11.Perse ntase RKBMD SKPD sesuai ketentua n	100 %	100%	100%				31	Penyusunan Standar Harga	Pemeri ntah Kabupa ten Tanah	Jumlah dokum en	1 Doku men	1 Dokume n	100 %	Ya	69.282.234	Ter kait	47.607.000	68,71	
									32	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pemeri ntah Kabupa ten Tanah	Jumlah dokum en	5 Doku men	5 Dokume n	100 %	Ya	4.874.185.254	Ter kait	4.461.720.132	91,54	
									33	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemeri ntah Kabupa ten Tanah	Jumlah dokum en	2 Doku men	2 Dokume n	100 %	Ya	49.896.438	Ter kait	39.750.000	79,67	
		12,Perse ntase inventari sasi BMD yang akurat sesuai ketentua n	100 %	100%	100%				34	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pemeri ntah Kabupa ten Tanah	Jumlah Dokum en Penata usahaa n BMD	16 Doku men	16 Dokume n	100 %	Ya	281.168.559	Ter kait	267.860.596	95,27	
									35	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pemeri ntah Kabupa ten Tanah	Jumlah Dokum en Inventa risasi BMD	1 Doku men	1 Dokume n	100 %	Ya	86.237.535	Ter kait	74.464.500	86,35	

										36	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Dokumen Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD	8 dokumen BMD	8 dokumen BMD	100 %	Ya	46.703.960	Terkait	45.052.000	96,46
										37	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah SKPD peserta Pembinaan Pengelolaan BMD	40 SKPD	40 SKPD	100 %	Ya	96.289.245	Terkait	87.297.750	90,66
5	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	13. Pensektarian kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100 %	100%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	Baik	Ya	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
										38	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis	1 Jenis	100 %	Ya	6.569.361	Terkait	5.625.000	85,62

LKj BPKAD TAHUN 2023

										42	Pengadaan Mebel	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah jenis pengad aan mebel	2 Jenis	2 Jenis	100 %	Ya	-	Ter kait	-	#DIV/ 0!
										8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
										43	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100 %	Ya	312.000.000	Ter kait	164.925.173	52,86
										44	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100 %	Ya	468.768.000	Ter kait	442.219.960	94,34
										9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
										45	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100 %	Ya	16.250.000	Ter kait	15.398.800	94,76
										46	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis	21 Jenis	21 Jenis	100 %	Ya	68.750.000	Ter kait	52.073.000	75,74

		16.Perse ntase Laporan Keuanga n dan Kinerja Keuanga n SKPD sesuai ketentua n	100%	100%	100%					12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
										50	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumla h pemba yaran Gaji, Tunjan gan, Jamina n Keseh atan ASN	53 ASN/ 12 Bulan	53 ASN/ 12 Bulan	100 %	Ya	8.113.769.343	Ter kait	7.605.725.320	93,74
										51	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumla h dokum en Penata usaha an Keuan gan SKPD yang tersus un	94 Doku men	94 Dokume n	100 %	Ya	13.162.576	Ter kait	9.581.336	72,79

									11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		17. Perse- ntase Perencan- aan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentu- an	100%	100%	100%				52	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumla- h Doku- men Perenc- anaan Perang- kat Daera- h tersus- un	7 Doku- men	7 Dokume- n	100 %	Ya	8.549.972	Ter- kait	7.478.400	87,47
		18. Nilai akuntabil- itas kinerja instansi p- emerinta h	70	81,5 0	116,43 %				53	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumla- h dokum- en Evalua- si Kinerja Perang- kat Daera- h tersus- un	6 Doku- men	6 Dokume- n	100 %	Ya	9.478.191	Ter- kait	8.452.005	89,17
Jumlah Total Anggaran																	300.537.244.894,00		274.778.042.543,00	91,43

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi APBD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2022 berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdiri dari 3 Program, 11 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2023

PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.936.163.840	11.055.166.229	92,62
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	18.028.163	15.930.405	88,36
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.549.972	7.478.400	87,47
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.478.191	8.452.005	89,17
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	8.126.931.919	7.615.306.656	93,70
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.113.769.343	7.605.725.320	93,74
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD	13.162.576	9.581.336	72,79
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	69.930.000	62.000.000	88,66
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	69.930.000	62.000.000	88,66
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	2.815.592.558	2.647.404.735	94,03
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.569.361	5.625.000	85,62
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.120.200.835	1.006.210.400	89,82
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.822.362	63.424.600	87,09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.616.000.000	1.572.144.735	97,29

LKj BPKAD TAHUN 2023

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	780.768.000	607.145.133	77,76
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	312.000.000	164.925.173	52,86
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	468.768.000	442.219.960	94,34
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.913.200	107.379.300	85,96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.250.000	15.398.800	94,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.750.000	52.073.000	75,74
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.800.000	19.800.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.113.200	20.107.500	99,97
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	270.000.377.529	246.362.594.991	91,25
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	537.393.669	346.289.670	64,44
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	59.643.027	43.669.400	73,22
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	48.646.200	40.360.600	82,97
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	14.844.613	14.124.500	95,15
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	14.844.699	13.590.500	91,55
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.800.610	1.182.800	31,12
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	3.871.950	1.022.000	26,39
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	207.129.980	131.267.470	63,37
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	154.312.113	79.687.000	51,64

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	28.341.775	19.699.000	69,51
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1.958.702	1.686.400	86,10
<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	280.844.392	224.849.721	80,06
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	6.360.978	3.935.800	61,87
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	49.336.132	36.886.750	74,77
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2.250.000	1.350.000	60,00
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14.456.000	14.306.000	98,96
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	1.620.000	400.000	24,69
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	13.326.000	12.126.000	91,00
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	193.495.282	155.845.171	80,54
<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	665.759.977	597.801.935	89,79
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	88.586.578	83.267.285	94,00
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	92.638.638	88.388.580	95,41

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	157.191.942	139.336.450	88,64
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	74.812.998	69.806.600	93,31
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	218.337.456	188.506.600	86,34
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	34.192.365	28.496.420	83,34
<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	268.516.379.491	245.193.653.665	91,31
Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	246.343.464.346	244.652.753.666	99,31
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	22.172.915.145	540.899.999	2,44
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	18.600.703.525	17.360.281.323	93,33
<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	18.600.703.525	17.360.281.323	93,33
Penyusunan Standar Harga	69.282.234	47.607.000	68,71
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	4.874.185.254	4.461.720.132	91,54
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	49.896.438	39.750.000	79,67
Penatausahaan Barang Milik Daerah	281.168.559	267.860.596	95,27

Inventarisasi Barang Milik Daerah	86.237.535	74.464.500	86,35
Pengamanan Barang Milik Daerah	396.675.125	161.176.004	40,63
Penilaian Barang Milik Daerah	177.064.980	136.591.918	77,14
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12.407.911.235	11.959.058.329	96,38
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	115.288.960	79.703.094	69,13
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	46.703.960	45.052.000	96,46
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	96.289.245	87.297.750	90,66
JUMLAH	300.537.244.894	274.778.042.543	91,43

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 285.240.884.026,-setelah perubahan adalah sebesar Rp 300.537.448.124,- dengan realisasi pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp 274.778.042.543,-. Jumlah tingkat capaian kinerja belanja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 91,43 %. dengan capaian kinerja fisik rata-rata sebesar 100%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 8,57%.

Adapun ringkasan anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

3. PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 DAN 2023

Untuk menggambarkan pencapaian realisasi belanja Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut serta membandingkannya

LKj BPKAD TAHUN 2023

selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2022 dan tahun 2023 dan untuk mengetahui pengukuran terhadap pencapaian peningkatan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

Tabel perbandingan realisasi capaian sasaran strategis Program dan Kegiatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023

Berikut ini disajikan realisasi pencapaian sasaran strategis BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018 dan tahun 2022 dapat dibandingkan realisasi pencapaian sasaran tahun 2023 dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Selain perbandingan realisasi pencapaian sasaran seperti yang telah dibahas sebelumnya dapat dilihat baik peningkatan maupun penurunan dalam realisasi pencapaian sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Gambaran tentang target dan realisasi pencapaian sasaran strategis dan realisasi pendanaan BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

TABEL PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019, 2019, 2020, 2021, 2022 DAN 2023																										
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT																										
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN %	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN %	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN %	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN %	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN %	KET			
1	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara terb, akurat, tabel dan transparan.	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Omni BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%	Kepala BPKAD																		
			2. Tingkat Kepuasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai	82	87	106,10%	82	90	109,76%	83	93	112,05%	84	94,16	112,10%	85	95,32	112,14%	86	97,02	112,81%				
			3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	Kabid Baitaru & Pembayaran
			4. Persentase stakeholder yang dilayani/pertanggungjawaban keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	Kabid Akuntansi
			5. Persentase kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Pemkab dan Pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
2	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Perencanaan aset Daerah	4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan	6. Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	%	100	100	100%	87	100	114,95%	89	30	33,70%	90	140	155,55%	92	109	118,48%	95	60	63,16%				
			7. Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	0	0%	100	0	100%	0	0	0%	0	0	0%				
			8. Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	150	150%	100	120	120%	100	133,30	133,30%	100	500	500%				
			9. Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	107	107%				
			10. Persentase Pemeliharaan, Pemantauan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	108,80	108,80%	100	2700	2700%	100	850	850%	100	1170	1170%	100	245	245%				
			11. Persentase RKBM SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	Kabid PA
			12. Persentase inventarisasi BMD yang akurat sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
3	Terwujudnya tata laksana Administrasi yang terb, efektif dan efisien	5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan	13. Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%				
			14. Nilai Rekamasi Biokasi Instansi Pemerintah	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	65,41	109,02%	65	77,80	119,69%	70	79,39	113,41%		
			15. Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	Sekretaris
			16. Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
			17. Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
			18. Nilai akurabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	64,15	64,74	100,92%	66	74,98	113,61%	67	88,43	131,99%	68	88,91	130,75%	69	80,5	116,87%	70	81,5	116,43%				

TABEL PERBANDINGAN REALISASI
 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS
 TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN
 TAHUN 2023
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASSET DAERAH KABUPATEN
 TANAH LAUT

NO	SARJIS	IKRGI	IKU/BUKNIKU	TARGET KINERJA 2022 IKU / BUKAN IKU	TARGET KINERJA 2023 IKU / BUKAN IKU	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	NO	PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA OUTPUT 2022	TARGET KINERJA OUTPUT 2023	REALISASI OUTPUT TAHUN 2022	REALISASI FISIK % TAHUN 2022	REALISASI FISIK % TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2022(RP.)	REALISASI KEUANGAN TAHUN 2022	CAPAIAN % TAHUN 2022	ANGGARAN TAHUN 2023(RP.)	REALISASI KEUANGAN TAHUN 2023	CAPAIAN % TAHUN 2023				
									URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM													URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	
1	2	3	4	6	6	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	18	21	22	21	22	26	27	28	26	27	28

			8. Per sent ase BMD yang telah dipel ihara sesu ai kete ntua n	10 0%	100 %	1 3 3 , 3 0 %	50 0%					2 8	Pengawa san dan Pengenda lian Pengelolan an Barang Milik Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanah	Jumlah Buku Hasil Monitoring Pengawa san dan Pengend alian Pengelolan an Barang Milik Daerah		1 buku 5 alat angkutan, 5 buah rumah negara, 1 buah rumah negara			1 bu ku 5 ala t ang kut , 5 bu ah ru ma h neg ara , 1 bu ah ru ma h neg ara	10 0%	3.381.191.731	3.284.840.8 25	97,15	12.407 .911.2 35	## ## ## ## ## ## #	96,38
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------------------------------	----------	--	--	--	--	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	-------------------	--------------	------------------------	---------------------------------------	--------------

			9.Per sent ase BMD yang dima nfaat kan sesu ai kete ntua n	10 0%	10 0%	1 0 0 %	10 0%					2 9	Optimalis asi Pengguna an, Pemanfa atan, Peminda htangana n, Pemusna han, dan Penghap usan Barang Milik Daerah	Pemerin tah Kabupat en Tanah	Jumlah dokume n		1 doku men hibah kelua r, 1 doku men hibah masu k, 1 doku men lap hasil kegiat an, 1 doku men monit oring pengg unaan n, 1 doku men monit oring pema nfaat an dan pengg unan BMD, 1 doku men pelak			1 do ku me n hib ah kel uar , 1 do ku me n hib ah ma suk , 1 do ku me n lap has il keg iat an, 1 do ku me n mo nit ori ng pe ngg	10 0%	64.944.850	52.188.600	80,36	115.28 8.960	79. 70 3.0 94	69,13
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------------------	----------	--	--	--	--	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------	------------	--------------	-----------------	------------------------	--------------

LKj BPKAD TAHUN 2023

			10.P erse ntas e Pemi ndah tang anan , Pem usna han dan Peng hapu san BMD sesu ai kete ntua n	10 0%	10 0%	1 1 7 0 %	24 5%					3 0	Penilaian Barang Milik Daerah	Pemerin tah Kabupat en Tanah	Jumlah Obyek BMD yang dinilai untuk dicatat, dimanfa atkan dan dipindah tanganka n		41 Obye k			41 Ob yek	10 0%	75.686.919	71.831.975	94,91	177.06 4.980	13 6.5 91. 91 8	77,14
			11.P erse ntas e RKB MD SKPD	10 0%	10 0%	1 0 0 0 %	10 0%					3 1	Penyusun an Standar Harga	Pemerin tah Kabupat en Tanah	Jumlah dokume n		1 Doku men			1 Do ku me n	10 0%	39.951.796	30.479.000	76,29	69.282 .234	47. 60 7.0 00	68,71

LKj BPKAD TAHUN 2023

												40	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		2 Jenis			2 Jenis	100%	68.563.753	46.305.500	67,54	72.822.362	63.424.600	87,09
												41	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah Unit Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		3 Jenis			3 Jenis	100%	812.800.000	776.104.913	95,49	1.616.000.000	1.572.144.735	97,29
												7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
												42	Pengadaan Mebel	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah jenis pengadaan mebel		1 Jenis			1 Jenis	100%	17.497.500	17.449.880	99,73	-	-	0,00

											51	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi Kantor 75 dokumen BPKAD		94 Dokumen			94 Dokumen	100%	14.173.237	9.513.985	67,13	13.162.576	9.581.336	72,79
											11	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>														
			17.Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik	100%	100%	100%	100%				52	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor BPKAD Kab. Tanah Laut	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPKAD	6 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	100%	100%	6.415.750	5.022.000	78,28	8.549.972	7.478.400	87,47

LKj BPKAD TAHUN 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja keuangan pada tahun 2023 adalah sebesar 91,43% mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dari tahun 2022 yaitu sebesar 90,95%, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan pada masa Renstra SKPD Tahun 2018-2023, yaitu telah dicapai target akuntabel / dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu terbukti dengan telah diraihnya opini WTP dari auditor BPK RI selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, hal ini dikarenakan adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk bersama-sama dalam meningkatkan kinerja pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Tanah Laut.

Sedangkan untuk mengetahui efisiensi penggunaan dana dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 yaitu dengan membandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 91,43% sehingga menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 8,57% dengan rincian per Sasaran Strategis dan indikatornya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023													
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT													
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN % 2023	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi	Penanggungjawab		
1.	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%	91,43%	100%	8,57%	Kepala Badan	
			2	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Nilai	86	97,02	112,81%					
			3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	3	Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	%	100	100	100%	91,25%	100%	8,75%	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan
				4	Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100%				
				5	Persentase kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Pemkab dan Pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%				
2.	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.	4. Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan	6	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	%	95	60	63,16%	94,19%	100%	5,81%	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	
			7	Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	%	0	0	0%					
			8	Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	%	100	500	500,00%					
			9	Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	%	100	100	100%					
			10	Persentase Pemindahtanganan, Pemsruhan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	%	100	245	245%					
			11	Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%					
3	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	5. Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	13	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	%	100	100	100%	91,28%	100%	8,72%	Kepala Bidang Penatausahaan Aset	
			14	Nilai Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Nilai	70	79,39	113,41%					
			15	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	%	100	100	100%					
			16	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	%	100	100	100%					
			17	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	%	100	100	100%					
			18	Nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Nilai	70	81,5	116,43%					

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 yang merupakan tahun keempat Renstra 2018-2023, sehingga dengan demikian tujuan BPKAD yaitu

1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan keuangan secara tertib, akuntabel & transparan.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penatausahaan aset daerah secara tertib.
3. Terwujudnya tata kelola administrasi yg tertib, efektif dan efisien, sudah tercapai dengan diraihnya predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Laporan Kinerja (LKj) ini memuat perencanaan dan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan serta telah dilaksanakan secara akuntabel, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

Dapat disimpulkan bahwa dari 5 indikator kinerja sasaran strategis yang ditargetkan hampir semuanya dapat dilaksanakan dan tercapai target kinerjanya, pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2018,2019, 2020,2021, 2022 dan 2023 antara lain sebagai berikut:

- 1). Sasaran Strategis Nomor 1 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator sasaran nomor 1 Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2021 sebesar 100%, dan pada Tahun 2018,2019 dan 2020 juga mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 untuk yang keenam kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 8 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2018 dan Nomor : 12.C/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2019,sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 untuk yang ketujuh kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 10 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 6 temuan, bukti surat Nomor : 7.B/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan bukti surat Nomor : 7.C/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 untuk yang kedelapan kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 26 temuan, bukti surat Nomor : 12.A/LHP/IX.BJM/05/2021 tanggal 27 Mei 2021, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%, Pada tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk yang kesembilan kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 19 temuan dengan bukti surat Nomor : 5.B/LHP/XIX.BJM/05/2022 tanggal 13 Mei 2022. Sedangkan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 untuk yang kesepuluh kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 19 temuan dengan bukti surat Nomor : 9.B/LHP/XIX.BJM/05/2023 tanggal 4 Mei 2023, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tercantum dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023, bahwa cita-cita BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab pada tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan 100%.

Untuk mendukung sasaran nomor 1 dan IKU BPKAD ini dilaksanakan dan menjadi Perjanjian Kinerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta tanggungjawab Bidang Belanja & Pembiayaan, Bidang Akuntansi, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset dan Bidang Penatausahaan Aset.

- 2). Sasaran Strategis Nomor 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama BPKAD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan

keuangan dan aset daerah dan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama BPKAD nomor 2 ini maka sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 selama 10 (sepuluh) tahun dilaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKPD khususnya terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah terhadap 4 bidang pelayanan yaitu pelayanan satu pintu di Sekretariat, pelayanan bantuan keuangan lainnya, pelayanan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pada bidang Akuntansi. Jumlah responden sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dari Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survei kepada masyarakat yang menjadi konsumen dari 4 bidang pelayanan tersebut, dengan jumlah responden adalah 150 (seratus lima puluh) orang. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan per triwulan selama kurun waktu 1 tahun 2023 (Triwulan I, II, III dan IV) dan setiap triwulan dilaporkan melalui alamat web ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai pertanggungjawaban terhadap peraturan yang berlaku. Dari hasil survey yang telah dilaksanakan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun didapat nilai indeks dengan hasil 87 dari target 82 pada tahun 2018 atau capaian 106,10%, kemudian pada tahun 2019 didapat nilai indeks dengan hasil 90 dari target 82 atau capaian sebesar 109,76%, sedangkan pada tahun 2020 didapat nilai indeks dengan hasil 93 dari target 83 atau capaian sebesar 112,05%, pada tahun 2021 didapat nilai indeks dengan hasil 94,16 dari target 84 atau capaian sebesar 112,10%, sedangkan pada tahun 2022 didapat nilai indeks dengan hasil 95,32 dari target 85 atau capaian sebesar 112,14%, dan pada tahun 2023 didapat nilai indeks dengan hasil 97,02 dari target 86 atau dengan capaian 112,81%, sehingga dengan demikian terdapat peningkatan trend kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pencapaian nilai hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut berada dalam mutu

pelayanan SANGAT BAIK, sehingga dengan demikian realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. atau terdapat peningkatan sebesar 0,67 % dari tahun 2022 Dengan demikian bahwa dengan adanya hasil survey kepuasan masyarakat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut berada dalam mutu pelayanan Sangat Baik.

Untuk mendukung sasaran nomor 2 dan IKU BPKAD ini dilaksanakan dan menjadi Perjanjian Kinerja, Program dan kegiatan serta tanggungjawab Bagian Sekretariat.

- 3). Sasaran Strategis Nomor 3 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dengan indikator sasaran no 3 Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan sesuai ketentuan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan 100%. Penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas waktu penyampaian penetapan APBD dan APBD Perubahan yaitu paling lambat pada tanggal 31 Desember.

Pada tahun 2018 penetapan APBD Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017, dan untuk penetapan APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2018 Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Sedangkan pada tahun 2019 penetapan APBD Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019 Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang

APBD Perubahan Tahun 2019 Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Pada tahun 2020 penetapan APBD Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2020 Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Pada tahun 2021 penetapan APBD Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2021 Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2021 Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Pada tahun 2022 penetapan APBD Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2022 Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2020, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2022 Nomor 121 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 sehingga dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Pada tahun 2023 penetapan APBD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023 Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022, dan untuk penetapan APBD Perubahan tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2022 Nomor 121 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 sehingga

dengan demikian penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu 100%.

Sasaran nomor 3 ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan dan indikator sasaran nomor 3 ini dilaksanakan oleh Kasubbid Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023.

- 4).Sasaran Strategis Nomor 3 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dengan indikator sasaran no 4 Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan yang merupakan perjanjian kinerja Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %. Untuk mendukung sasaran strategis Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan nomor 3 ini Indikator sasaran dilaksanakan oleh Kasubbid Perbendaharaan dan Pembiayaan dengan pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA Tahun 2023. Penyerapan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2018 pagu anggaran sebesar Rp 1.588.171.203.597,00,- dengan realisasi sebesar Rp 1.350.553.289.307,60 ,- atau capaian sebesar 85,04%. Penyerapan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.746.968.360.693,50,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.515.185.842.727,95,- atau 86,74%. Anggaran belanja daerah (BTL dan BL) Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2020 adalah sebesarRp 2.041.948.857.213,36 dengan realisasi sebesar Rp 1.508.835.025.639,47 atau 73,89%. terdapat penurunan kinerja realisasi belanja sebesar 12,85%. Sedangkan penyerapan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.220.694.238.313,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.881.305.839.322,37,- atau 84,72%, terdapat peningkatan kinerja realisasi belanja sebesar 10,83% dari tahun 2020.

Sedangkan penyerapan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.122.153.778.445,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.821.565.866.670,- atau 85,84%, terdapat peningkatan kinerja realisasi belanja sebesar 1,12% dari tahun 2021.

Sedangkan penyerapan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.502.266.740.528,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 2.195.940.113.348,- atau 87,76%, terdapat peningkatan kinerja realisasi belanja sebesar 1,92% dari tahun 2022.

- 5). Sasaran Strategis Nomor 3 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dengan indikator sasaran Persentase kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Pemkab dan Pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan adalah perjanjian kinerja Kepala Bidang Akuntansi capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %. Untuk mendukung sasaran strategis Kepala Bidang Akuntansi nomor 3 Indikator sasaran ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Kasubbid yaitu Kasubbid Pendapatan dan Pengelolaan Kas dan Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban dengan pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA Tahun 2023.

Pada tahun 2014 Laporan Keuangan SKPD berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual), sehingga capaian kinerja hanya mencapai 50%, karena Laporan Keuangan SKPD belum sepenuhnya berbasis akrual.

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) dan pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 dibuat

berdasarkan Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 ini adalah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yaitu BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Demikian juga pada tahun 2016,tahun 2017,tahun 2018,tahun 2019, tahun 2020,tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual telah disampaikan oleh seluruh SKPD dan telah di Audit oleh BPK – RI dan telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual. Dengan demikian bahwa pelaporan keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berbasis Akrual dapat dijamin terpenuhi 100%.

6).Sasaran Strategis Nomor 4 Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset dengan indikator sasaran no 7 Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan, indikator sasaran no 8 Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan dan indikator sasaran no 9 Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan pada tahun 2019 capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 104,99% dari tahun 2018 terdapat peningkatan kinerja sebesar 4,99%. Namun pada tahun 2020 capaian kinerja mengalami penurunan yaitu 61,23% dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kendala pandemi Covid 19, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kinerja sebesar 91,85% sehingga untuk indikator sasaran strategis no 7 yaitu presentase BMD (Tanah) yang memiliki sertifikat sesuai ketentuan hanya tercapai 140% dari target sebesar 90%, atau capaian sebesar 155,55% hal ini dikarenakan adanya dukungan dari Pihak BPN, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kinerja sebesar 37,07% dengan realisasi sebesar 109 dari target sebesar 92 atau

capaian kinerja sebesar 118,48%, kemudian indikator sasaran strategis no 8 yaitu Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan tidak tercapai atau 0% dikarenakan pelaksanaan pengajuan permohonan duplikasi BPKB BMD (Kendaraan Bermotor) dari target 2 buah, realisasi 0 buah (tidak dapat realisasi). Namun pada indikator sasaran strategis no 9 milik Kepala Bidang PPA mengalami kenaikan capaian pada tahun 2021 yaitu sebesar 120%, hal ini dikarenakan dari target BMD sebesar 10 telah tercapai sebesar 12 yang dipelihara, sehingga dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan kinerja. Sehingga secara keseluruhan untuk sasaran strategis no 4 Kepala Bidang PPA pada tahun 2021 capaian kinerjanya mengalami peningkatan kinerja sebesar 30,62%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian kinerja juga mengalami peningkatan sebesar 133,30% dari target 100 telah terealisasi sebesar 133,30, sehingga terdapat peningkatan sebesar 13,3% dari tahun 2021. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 4 Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pengamanan dan Pemeliharaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2022. Rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran no 4 adalah sebesar 91,85%, sehingga realisasi tersebut sudah mencapai 96,68% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 95%.

- 7). Sasaran Strategis Nomor 4 Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan dengan indikator sasaran no 10 Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan dan indikator sasaran no 11 Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Pemanfaatan dan Pemindahtanganan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2023.

Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah tercapai kinerjanya rata-rata diatas 92% dengan realisasi anggaran rata-rata diatas 84% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran di Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset rata-rata sebesar 8% dari 1 Program 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset pada tahun 2022.

- 8). Sasaran Strategis Nomor 4 Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan dengan indikator sasaran no 11 Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan dan indikator sasaran no 12 Persentase Inventarisasi BMD yang dicatat dengan akurat sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penatausahaan Aset capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 4 Kepala Bidang Penatausahaan Aset ini dilaksanakan oleh Kasubbid Perencanaan Kebutuhan dan Kasubbid Inventarisasi dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2023.
- 9). Sasaran Strategis Nomor 5 Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan dengan indikator sasaran Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik dan Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 5 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2023.
- 10). Sasaran Strategis Nomor 5 Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan dengan indikator sasaran Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan

SKPD sesuai ketentuan adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 5 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Keuangan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2023.

- 11). Sasaran Strategis Nomor 5 Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan dengan indikator sasaran Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan dan Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk mendukung sasaran strategis nomor 5 Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut ini dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai DPA tahun 2023. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah penilaian SAKIP Tahun 2017 sebesar 100,92% dan tahun 2019 adalah penilaian SAKIP Tahun 2018 adalah sebesar 113,61%, sedangkan Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2020 adalah penilaian SAKIP Tahun 2019 sebesar 131,98%, sedangkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 adalah penilaian SAKIP Tahun 2020 sebesar 130,75% mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 1,23%. Pada tahun 2022 adalah penilaian SAKIP Tahun 2021 sebesar 116,67% mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 14,08%. Pada tahun 2023 adalah penilaian SAKIP Tahun 2022 sebesar 116,43% mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 0,24%.

Telah dilaksanakan penyusunan dokumen SKM SKPD dengan Target Kinerja sebanyak 1 dokumen yaitu (Dokumen SKM Thn 2023), telah terealisasi dengan SK Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Hasil SKM BPKAD Tanah Laut Nomor : 800/ 21 /BPKAD/2023 tanggal 29 Desember 2023.

LKj BPKAD TAHUN 2023

Sehingga dengan demikian pernyataan sasaran strategis nomor 5 yang menjadi tanggungjawab Sekretaris BPKAD Kab. Tanah Laut yang dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan telah terpenuhi 100%.

- 12).Pejabat struktural Eselon IV setiap triwulan telah membuat Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023 yang menjadi tanggungjawabnya sebagai langkah Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsungnya sebagai bukti telah dilakukan pengawasan internal dari Atasan Langsung kepada Pejabat Struktural dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut terhadap kinerja kegiatan-kegiatan di Bidanganya masing-masing sebagai bahan acuan pedoman untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Berhasilnya pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentunya sangat ditunjang oleh kualitas sumber daya aparatur, sumber dana serta dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait. Selain itu, masih terdapatnya kelemahan-kelemahan seperti terbatasnya tenaga profesional serta pelaksanaan tugas pada BPKAD sangat tergantung dari input SKPD lainnya sehingga diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis dengan SKPD dalam mengelola keuangan dan aset daerah.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi persoalan tersebut diantaranya dengan berupaya secara bertahap terus meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin SDM aparatur pada BPKAD serta peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas. Serta upaya untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja baik pada waktu tahun berjalan maupun setelah akhir tahun sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah perbaikan, salah satunya dengan memberikan reward dan penghargaan

kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pengurus Barang terbaik setiap tahunnya. Selain itu diperlukan peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta kerjasama dengan institusi lain.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan dan pencapaian kinerja SKPD khususnya bagi BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, 30 Januari 2024

Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002